



UNIVERSITAS INDONESIA

**OPTIMALISASI STRATEGI UNTUK MENGHADAPI
DINAMIKA REGIONALISME ASEAN
STUDI KASUS: ASEAN 5 DAN CHINA**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si.)

DEDI RUSTANDI
0806448415

**PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI KAJIAN KETAHANAN NASIONAL
KEKHUSUSAN KAJIAN INTELIJEN STRATEJIK**

**JAKARTA
JANUARI 2011**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan Plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Jakarta, 17 Desember 2010



Dedi Rustandi

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dedi Rustandi

NPM : 0806448415

Tanda Tangan :

Tanggal : 17 Desember 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh

Nama : Dedi Rustandi

NPM : 0806448415

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Kekhususan Kajian Intelijen Strategik

Judul : Optimalisasi Strategi Untuk Menghadapi

Dinamika Regionalisme ASEAN

Studi Kasus: ASEAN 5 dan China

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Dra. F. Iriani Shopiaan Yudoyoko, M.Si. (.....*fshopiaan*.....)

Pembimbing : Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D (.....*heru*.....) 10/11/2011

Penguji : Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D (.....*Anggoro*.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : Januari 2011

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Pascasarjana, Program Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) Bapak Prof. Heru Subiyantoro, Ph.D selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
- (2) Ibu Dra. Fadjar Iriani Sophiaan Yudoyoko, M.Si., selaku Ketua Program Studi Kajian Strategik Intelijen Universitas Indonesia dan juga sebagai Ketua Tim Penguji tesis ini;
- (3) Bapak Joko Kusnanto Anggoro, Ph.D selaku dosen penguji;
- (4) Bapak Edy Faisal, SE., MM., selaku Sekretaris Program Bidang Akademik Program Studi KSI UI, yang banyak membantu dan memberi kesempatan penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
- (5) Kedua Orangtua, yang tanpa doanya, akan sulit bagi penulis untuk menghadapi berbagai halangan dalam penyusunan tesis ini;
- (6) Sahabat yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan tesis ini, Riahna, Mas Piet, Mbak Nafis, Om Wing, Dwi dan Om Falih;

Akhir kata, saya berharap Allah Swt, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 17 Desember 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dedi Rustandi

NPM : 0806448415

Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional

Departemen :

Fakultas :

Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“OPTIMALISASI STRATEGI UNTUK MENGHADAPI DINAMIKA REGIONALISME ASEAN STUDI KASUS: ASEAN 5 DAN CHINA”

berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 17 Desember 2010

Yang menyatakan



(Dedi Rustandi)

ABSTRAK

Nama : Dedi Rustandi
Program Studi : Kajian Ketahanan Nasional
Kekhususan Kajian Intelijen Strategik
Judul : Optimalisasi Strategi Menghadapi Dinamika Regionalisme
ASEAN Studi Kasus: ASEAN 5 dan China

Setelah berlalunya krisis moneter, regionalisme tidak lagi ditujukan untuk penguatan “ke dalam” akan tetapi sudah melebar ke luar kawasan seperti China, India, Australia, Selandia Baru dan Jepang. Sehingga memunculkan pertanyaan mengenai arah regionalisme dan pilihan strategi apa yang tersedia untuk menghadapi perubahan regionalisme tersebut. Selanjutnya melalui analisis terhadap proses regionalisme dari sebelum pembentukan ASEAN sampai sekarang, ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan regionalisme di antaranya *non-state actor* yaitu *multi-national corporation*. Pilihan strategi dibuat berdasarkan *TOWS matrix*, yang merupakan kombinasi dari peluang dan ancaman yang berasal dari proses regionalisme serta kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki Indonesia.

Kata kunci: regionalisme, integrasi ekonomi, strategi, *TOWS matrix*

After the monetary crisis, regionalism is no longer aimed at inward strengthening but had spread to outside the region such as China, India, Australia, New Zealand and Japan. There are questions about the pattern of regionalism and what the strategic options that available to deal with such changes in regionalism. Furthermore, through analysis of the process from the establishment of ASEAN regionalism up to present, researcher has identified several factors that affect the change in regionalism such as non-state actor (multinational corporation). The strategy options are based on *TOWS matrix*, which is a combination of opportunities and threats arising from regionalism process and Indonesia’s internal strength and weakness.

Keyword: regionalism, economic integration, strategy, *TOWS matrix*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Pokok	7
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Kerangka Pemikiran	9
1.5 Batasan Penelitian	11
1.6 Hipotesis Penelitian	11
1.7 Model Analisis	12
1.8 Metode Penelitian	14
1.9 Sistematika Penulisan	14
BAB 2 : LANDASAN TEORI	16
2.1 Regionalisme, Kepentingan Nasional dan Ancaman.....	16
2.1.1 Regionalisme	16
2.1.2 Kepentingan Nasional dan Ancaman	19
2.2 Daya Saing Nasional dan Faktor-Faktor Penentu Daya Saing.....	21
2.2.1 Daya Saing Nasional	21
2.2.2 Faktor-faktor Penentu Daya Saing	23
2.2.2.1 <i>Endowed Resource</i>	24
2.2.2.2 <i>Infrastructure</i>	24
2.2.2.3 <i>Domestic Demand</i>	24

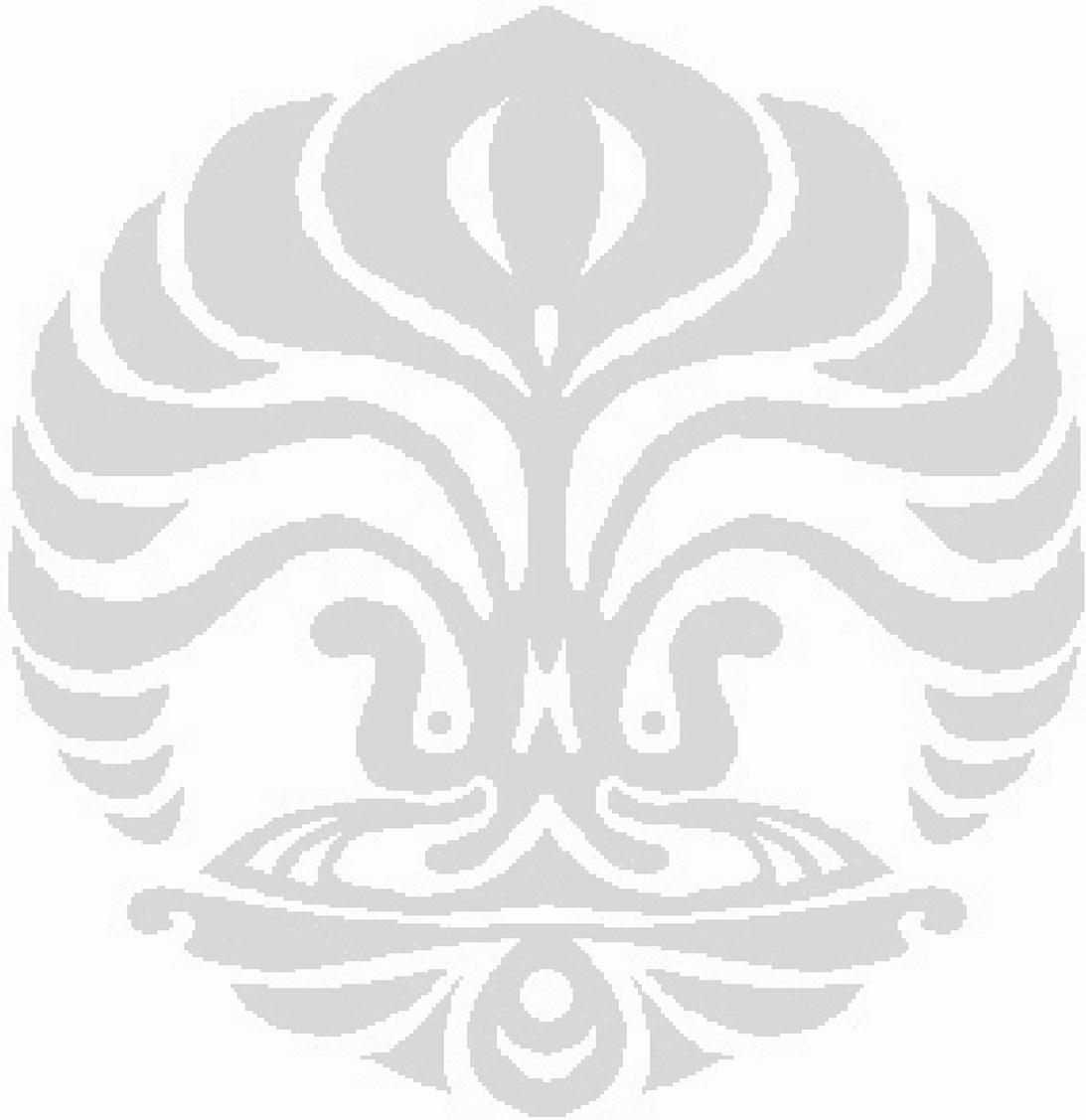
2.2.2.4 <i>Workers</i>	25
2.2.2.5 <i>Bureaucrats</i>	25
2.2.2.6 <i>Entrepreneurs</i>	26
2.3 Strategi	27
2.3.1 Definisi	27
2.3.2 TOWS Matrix.....	27
BAB 3 : PROSES REGIONALISME ASEAN DAN KONDISI FAKTOR PENENTU DAYA SAING.....	30
3.1 Proses Regionalisme ASEAN	30
3.1.1 Regionalisme sebelum berdirinya ASEAN	30
3.1.2 Regionalisme Tahun 1966-1997	35
3.1.3 Regionalisme Setelah Tahun 1997	43
3.2 Kondisi Faktor-faktor Penentu Daya Saing Indonesia	48
3.2.1 <i>Endowed Resource</i>	48
3.2.2 <i>Infrastructure</i>	52
3.2.3 <i>Domestic Demand</i>	53
3.2.4 <i>Workers</i>	54
3.2.5 <i>Bureaucrats</i>	56
3.2.6 <i>Entrepreneur</i>	57
BAB 4 : PEMBAHASAN.....	60
4.1 Regionalisme Sebelum 1966	60
4.2 Regionalisme Tahun 1966-1997	62
4.3 Regionalisme Setelah Tahun 1997	70
4.4 Pola Regionalisme ASEAN	78
4.5 Identifikasi <i>Opportunity</i> dan <i>Threat</i> dari Regionalisme ASEAN..	83
4.5.1 Peluang	84
4.5.2 Ancaman	86
4.6 Pembahasan Kondisi Faktor Penentu Daya Saing Indonesia.....	88
4.7 Identifikasi <i>Strength</i> dan <i>Weakness</i>	91
4.7.1 Kekuatan	91
4.7.2 Kelemahan	92
4.8 Strategi	95
BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN	101
5.1 Kesimpulan.....	101
5.2 Saran	103
DAFTAR REFERENSI.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dampak Pada Real GDP dari ACFTA	3
Tabel 1.2. FTA ASEAN selain ACFTA dan AFTA.....	4
Tabel 1.3. FTA Bilateral dan Multilateral Anggota ASEAN	5
Tabel 1.4. Peringkat Daya Saing Negara Anggota ASEAN	7
Tabel 3.1. Cadangan Batubara, Produksi, dan Konsumsi di ASEAN.....	49
Tabel 3.2. Ladang Gas Alam Terbukti, Produksi, Konsumsi.....	49
Tabel 3.3. Ladang Minyak Terbukti	50
Tabel 3.4. Estimasi Cadangan Mineral Logam.....	51
Tabel 3.5. Data Produksi Mineral ASEAN	51
Tabel 3.6. Data Luas Daratan dan Lautan.....	52
Tabel 3.7. <i>Infrastructure Access Indicators</i>	53
Tabel 3.8. Peringkat Kualitas Infrastruktur Transportasi	53
Tabel 3.9. Domestic Demand.....	54
Tabel 3.10. Angkatan Kerja (Usia 15+).....	54
Tabel 3.11. Indeks Tingkat Pendidikan dan Pelatihan.....	55
Tabel 3.12. Output per Pekerja.....	56
Tabel 3.13. Indeks Persepsi Korupsi.....	56
Tabel 3.14. Index Hak Kekayaan Internasional.....	58
Tabel 3.15. Tingkat Bunga Deposito.....	59
Tabel 4.1. Intra-Regional Export Shares.....	70
Tabel 4.2. Neraca Perdagangan Indonesia-China.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Model Analisis	12
Gambar 2.1. TOWS Matrix	28



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia menjelang tahun 2010, diwarnai dengan kekhawatiran yang melanda sebagian kalangan pengusaha dan industri nasional akan implikasi negatif dari pelaksanaan perjanjian ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA). Implikasi yang dikhawatirkan tersebut antara lain semakin dipenuhinya pasar domestik oleh produk China mengingat terhitung mulai 1 Januari 2010 sebanyak 8.097 pos tarif dari 17 sektor industri akan dibebaskan menjadi 0% akibat pemberlakuan ACFTA¹. Kekhawatiran lain yang disuarakan kalangan industri adalah meningkatnya pengangguran, deindustrialisasi, dan meningkatnya kesulitan untuk melakukan ekspor². Hal itulah yang kemudian mendorong pengusaha dan industri nasional mendesak pemerintah untuk meninjau ulang pemberlakuan ACFTA atau menunda penghapusan tarif bea masuk.

Tanggapan negatif atas pemberlakuan ACFTA yang kemudian bermuara pada dorongan untuk melakukan peninjauan ulang atau penundaan pemberlakuan tidak hanya disuarakan pengusaha dan industri, melainkan juga disuarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) Gabungan dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN dan Menteri Koperasi dan UKM dengan agenda pembahasan terhadap dampak penerapan ACFTA, DPR meminta pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk segera mengirimkan notifikasi ke sekretariat ASEAN dan pemerintah China guna melakukan penangguhan dan renegotiasi

¹ ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Dikhawatirkan Rugikan Industri, http://kadin-indonesia.or.id/id/berita_isi.php?news_id=3970, diakses 5 April 2010.

² Dawis, Aimee, ASEAN-China FTA: Lesson to learn for policy makers, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/21/aseanchina-fta-lessonslearn-policy-makers.html>, diakses 5 April 2010.

terhadap sejumlah pos tarif untuk berbagai sektor industri di antaranya tekstil dan produk tekstil, makanan dan minuman, petrokimia, alat-alat dan mesin hasil pertanian, alas kaki, *synthetic fiber*, elektronika, kabel dan peralatan listrik, industri permesinan, besi dan baja, industri komponen manufaktur otomotif, kosmetik dan jamu, mebel dan furniture, ban dan jasa konstruksi/ *engineering procurement construction*³.

Meskipun terjadi penolakan dari kalangan pengusaha dan industri, pemerintah tetap memutuskan bahwa ACFTA akan diimplementasikan sesuai jadwal yang telah disepakati dalam perjanjian. Selain penegasan pemerintah melalui pernyataan Menteri Perdagangan bahwa ACFTA akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, keinginan pemerintah untuk tetap mengimplementasikan ACFTA juga tercermin dari tidak adanya perubahan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ACFTA, yang didalamnya memuat mengenai penyelesaian penghapusan tarif di awal 2010.

Mengingat perjanjian ini mengikat ASEAN, maka selain Indonesia, anggota ASEAN-6 lainnya seperti Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina dan Brunei Darussalam juga harus melakukan hal yang serupa, sedangkan untuk negara anggota ASEAN yang baru seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam diselesaikan di awal tahun 2015. Pemerintah Indonesia dan pemerintahan negara anggota ASEAN lainnya pada saat pendirian memiliki keyakinan bahwa pendirian ACFTA akan menciptakan kemitraan antara China dan ASEAN, dan memberikan suatu mekanisme yang penting untuk memperkuat kerjasama dan mendukung stabilitas ekonomi dalam Asia Timur⁴. Sebelum penandatanganan perjanjian, telah dilakukan studi oleh ASEAN-China Expert Group di tahun 2001 yang hasilnya

³ Dewan Perwakilan Rakyat, *Laporan Kegiatan Komisi VI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010*, 13 Maret 2010, Jakarta, 2010, halaman 2.

⁴ *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China*, Phnom Penh, 4 November 2002.

memperlihatkan bahwa negara-negara ASEAN dan China diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari perjanjian FTA dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Dampak pada real GDP dari ACFTA

Negara	Real GDP (jutaan US Dolar)	Peningkatan (jutaan US Dolar)	% Peningkatan
Indonesia	204.031,4	2.267,8	1,12
Malaysia	98.032,3	1.133,5	1,17
Philipina	71.167,1	229,1	0,32
Singapura	72.734,9	753,3	1,05
Thailand	165.516,0	673,6	0,41
Vietnam	16.110,9	339,1	2,15
China	815.163,0	2.214,9	0,27

Sumber: ASEAN-China *Expert Group*⁵

Selain hasil studi yang dilakukan ASEAN-China Expert, terdapat beberapa alasan yang mendorong pemerintah ASEAN bersedia melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan China, diantaranya adalah kondisi perekonomian China yang besar dan dinamis, sehingga peningkatan permintaan China atas barang dan jasa dari ASEAN merupakan potensi sebagai mesin pertumbuhan baru kawasan Asia Tenggara. Selain itu, kedekatan hubungan ekonomi dengan China juga dapat mengurangi ketergantungan ASEAN pada Amerika Serikat, Uni Eropa dan Jepang⁶.

Selanjutnya, setelah menjalin kerjasama FTA dengan China, ASEAN membuat kesepakatan FTA dengan Australia dan Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area/ AANZFTA), Korea (ASEAN-Korea Free Trade Area/ AKFTA), Jepang (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership/AJCEP) dan India (ASEAN-India Free Trade Area/ AIFTA). Berikut tabel mengenai ringkasan FTA yang ditandatangani ASEAN:

⁵ Medalla M. Erlinda dan Balboa D. Jenny, *The Impact of ASEAN-China FTA Early Harvest Program: The Case of the Philippines with Focus on Short-Run Effects on the Agriculture Sector*, 2007, halaman 11.

⁶ Chia Siow Yue, *ASEAN-China Free Trade Area*, Hongkong, April 2004, halaman 14.

Tabel 1.2
FTA ASEAN selain ACFTA dan AFTA

Negara Partner FTA	Penandatanganan	Keterangan
Korea (AKFTA)	13 Desember 2005	ASEAN-6 dan Korea sepakat untuk menghapuskan tarif dari 90% produk mulai tahun 2010. Indonesia mendapat fleksibilitas 2 tahun hingga tahun 2012.
Australia dan Selandia Baru (AANZFTA)	27 Februari 2009	Diimplementasikan mulai 1 Januari 2010, dengan jadwal penurunan tarif dibedakan per komoditi. Indonesia mulai melakukan penurunan tahun 2012.
Jepang (AJCEP)	14 April 2008	Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Thailand mengimplementasikan pada tanggal 1 Juni 2009.
India (AIFTA)	13 Agustus 2009	Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei mengimplementasikan pada tanggal 1 Juni 2010, Indonesia mulai 24 Agustus 2010.

Sumber: <http://www.fta.gov.sg> dan <http://ditjenkpi.depdag.go.id>

Perluasan cakupan FTA oleh ASEAN dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan China memperlihatkan sebuah perubahan pola regionalisme⁷. Regionalisme tidak hanya terjadi di kawasan Asia Timur saja, melainkan juga terjadi di kawasan lain seperti Eropa dengan terbentuknya Uni Eropa, Amerika Utara dengan terbentuknya NAFTA, Mercosur (Mercado Comun del Sur/ Common Market of the South) di Amerika Selatan, SAPTA (South Asia Preferential Trade Arrangement) di Asia Selatan, Greater Arab Free Trade Area (GAFTA), CISFTA (Commonwealth of Independen States) yang beranggotakan Rusia dan negara di sekitarnya serta Uni Afrika.

Tidak hanya kelompok-kelompok negara yang aktif melakukan perluasan kawasan perdagangan bebas, pada tingkat negara, banyak yang secara aktif

⁷ Gao Xian, *Regionalization of Emerging Countries: a Case Study of East Asia*, Brasil, Oktober 2005.

membentuk FTA secara bilateral dengan negara atau kelompok negara lainnya. Di antara negara anggota ASEAN, yang paling aktif melakukan perjanjian perdagangan bebas secara bilateral adalah Singapura. FTA Singapura yang terbentuk selain melalui ASEAN di antaranya adalah Australia (SAFTA), China (CSFTA), Yordania (SJFTA), India (CECA), Japan (JSEPA), Korea (KSFTA), New Zealand (ANZSCEP), Panama (PSFT), Peru (PeSFTA), Swiss, Liechtenstein, Iceland dan Norwegia (ESFTA), Brunei, New Zealand, Chile (Trans-Pacific SEP), Amerika Serikat (USSFTA), Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, dan Uni Emirat Arab (GSFTA), dan Kosta Rika (SCRFTA), serta segera menyusul lagi empat negara yang masih dalam tahap negosiasi yaitu Kanada, Ukraina, Pakistan dan Meksiko⁸.

Selain Singapura, negara anggota ASEAN yang cukup aktif menjalin kerjasama FTA secara bilateral adalah Malaysia. FTA yang telah ditandatangani Malaysia misalnya FTA dengan Jepang (MJEPA) dan Pakistan (MPCEPA), sedangkan FTA bilateral yang masih dalam tahap negosiasi adalah FTA dengan negara Australia, Chili, India, New Zealand dan Amerika Serikat⁹. Berikut, ringkasan FTA negara anggota ASEAN yang sudah ditandatangani maupun yang masih dalam tahap negosiasi:

Tabel 1.3

FTA Bilateral dan Multilateral Negara Anggota ASEAN

Negara	Sudah Ditandatangani	Keterangan
Singapura	20	6 FTA ASEAN, 12 bilateral FTA, 2 multilateral
Thailand	12	6 FTA ASEAN, 4 bulateral FTA, 2 multilateral
Malaysia	10	6 FTA ASEAN, 3 bulateral FTA, 1 multilateral
Philipina	9	6 FTA ASEAN, 1 bulateral FTA, 2 multilateral
Brunei Darussalam	8	6 FTA ASEAN, 1 bulateral FTA, 1 multilateral
Indonesia	8	6 FTA ASEAN, 1 bulateral FTA, 1 multilateral

⁸ Singapore FTAs, <http://www.fta.gov.sg/index.asp>, diakses tanggal 20 April 2010.

⁹ *Malaysia's Free Trade Agreements (FTAs)*, Matrade, Kuala Lumpur, Juli 2008, halaman 4.

Vietnam	8	6 FTA ASEAN, 1 bulateral FTA, 1 multilateral
Myanmar	8	6 FTA ASEAN, 0 bulateral FTA, 2 multilateral
Kamboja	6	6 FTA ASEAN
Laos	n/a	Belum menjadi anggota WTO.

Sumber: World Trade Organization¹⁰, kecuali untuk Laos.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa regionalisme ASEAN tidak lagi berfokus pada wilayah Asia Tenggara, akan tetapi sudah meluas ke berbagai wilayah seperti Asia Selatan, Eropa, Asia Timur dan Australia. Di samping itu, banyak negara anggota ASEAN yang tidak lagi mempergunakan institusi regional untuk melakukan perjanjian *free trade area* dengan negara lain. Tentunya hal ini menimbulkan ketidakpastian pada arah regionalisme ke depan, dan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana sebenarnya proses regionalisme ASEAN yang terjadi selama ini?

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya kondisi faktor-faktor penentu daya saing Indonesia relatif terhadap Malaysia, Thailand dan Singapura? Pertanyaan tersebut didasarkan pada perbedaan sikap antara pelaku usaha di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya terhadap salah satu proses regionalisme yaitu ACFTA. Penolakan terhadap implementasi ACFTA lebih besar dilakukan di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, di samping itu, berdasarkan penilaian dari *World Economy Forum* mengenai daya saing, menunjukkan bahwa Indonesia memiliki daya saing yang lemah relatif terhadap Thailand, Malaysia dan Singapura.

Dari kedua pertanyaan tersebut di atas, pertanyaan yang dapat dikembangkan adalah bagaimana pilihan strategi yang tersedia bagi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian arah regionalisme?

¹⁰ WTO, <http://rtais.wto.org/ui/PublicSearchByMember.aspx>, update per 1 Oktober 2010.

Tabel 1.4
Peringkat Daya Saing Negara Anggota ASEAN

Tahun Peringkat	2006	2007	2008	2009	2010
1	Singapura (8)	Singapura (7)	Singapura (5)	Singapura (3)	Singapura (3)
2	Malaysia (19)	Malaysia (21)	Malaysia (21)	Malaysia (24)	Malaysia (26)
3	Brunei (n/a)	Brunei (n/a)	Thailand(34)	Brunei (32)	Brunei (28)
4	Thailand (28)	Thailand (28)	Brunei (39)	Thailand (36)	Thailand (38)
5	Indonesia(54)	Indonesia(54)	Indonesia(55)	Indonesia(54)	Indonesia(44)
6	Vietnam (64)	Vietnam (68)	Vietnam (70)	Vietnam(75)	Vietnam (59)
7	Philipina (75)	Philipina (71)	Philipina (71)	Philipina (87)	Philipina (85)
8	Kamboja(106)	Kamboja(110)	Kamboja(109)	Kamboja(110)	Kamboja(109)

Sumber : *World Economy Forum*

1.2 Permasalahan Pokok

a. Potensi Ancaman

Dinamika regionalisme yang dilakukan melalui ASEAN menjadi penting bagi pengambil keputusan, dalam hal ini pemerintah dan pelaku usaha (misalnya kalangan industri). Bagi pemerintah, regionalisme merupakan langkah untuk merespon perubahan lingkungan internasional yang memerlukan koordinasi kebijakan dengan negara ASEAN lainnya. Sedangkan bagi pelaku ekonomi, regionalisme memberikan pengaruh pada aktivitas perekonomian yang mereka jalani seperti perdagangan, investasi maupun kegiatan produksi.

Koordinasi kebijakan antar negara yang membawa kepentingan nasionalnya masing-masing dapat memberikan ancaman ketika keputusan yang kemudian dihasilkan memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Meskipun seandainya pemerintah, melalui "ASEAN way" dapat menghindari kesepakatan yang merugikan kepentingan nasional, akan tetapi ekonomi bukanlah militer. Kesepakatan militer antar negara sahabat, bilateral maupun multilateral tidak akan

Universitas Indonesia

membahayakan keamanan nasional. Akan tetapi kesepakatan ekonomi antar negara sahabat dapat memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional dan mengancam *economic security*. Kesepakatan *Free Trade Area* (FTA) bisa saja dihindari oleh pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri, akan tetapi ketidakikutsertaan pemerintah akan menyebabkan *comparative advantage* Indonesia menjadi turun. Tidak hanya bagi investor luar negeri, investor dalam negeri pun menjadi terpengaruh. Investasi di Indonesia, khususnya dalam industri yang "*outward looking*" tidak akan menguntungkan dibandingkan dengan investasi di negara ASEAN lainnya yang melakukan kesepakatan FTA. Pertimbangan tersebut berpotensi menyebabkan peralihan investasi asing langsung (FDI) maupun modal dalam negeri ke negara lain, yang menyebabkan terhambatnya industrialisasi. Industrialisasi di Indonesia akan bersifat "*inward looking*" yang hanya mengandalkan pasar domestik karena tidak mampu bersaing di pasar internasional. Apabila regionalisme yang kemudian terjadi membuka hambatan masuk pada pasar domestik, maka industri "*inward looking*" harus berhadapan dengan produk internasional yang umumnya memiliki banyak kelebihan dalam harga maupun teknologi. Dalam jangka panjang, ancaman deindustrialisasi akan semakin meningkat bagi perekonomian Indonesia.

Oleh sebab itu, dinamika regionalisme dan dampaknya bagi perekonomian nasional merupakan hal penting yang harus diketahui tidak hanya oleh pemerintah sebagai pengambil keputusan, akan tetapi juga penting diketahui oleh pelaku ekonomi sebagai entitas yang langsung berhadapan dengan lingkungan ekonomi regional dan internasional, sehingga *surprise* yang diakibatkan proses regionalisme dapat dihindari. Menghadapi regionalisme tentunya membutuhkan penyusunan strategi melalui pemanfaatan kekuatan internal untuk memperoleh kesempatan yang dihasilkan regionalisme, menghindari ancaman regionalisme, maupun untuk memperkuat sektor-sektor internal yang masih lemah.

Universitas Indonesia

b. Pertanyaan Penelitian

Dari uraian di atas maka beberapa hal penting dan menjadi pertanyaan pokok dalam penelitian adalah:

- A. Bagaimanakah proses regionalisme yang terjadi di ASEAN?
- B. Bagaimanakah kondisi faktor penentu daya saing Indonesia?
- C. Pilihan strategi apa yang memungkinkan untuk menghadapi dinamika regionalisme ASEAN?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Mengetahui proses regionalisme ASEAN untuk dapat memahami berbagai faktor yang berpengaruh terhadap arah regionalisme.
2. Mengetahui kondisi internal Indonesia yang dicerminkan dari faktor-faktor penentu daya saing nasional.
3. Mengetahui pilihan strategi yang memungkinkan dalam menghadapi *uncertainty* regionalisme di masa datang.

1.4 Kerangka Pemikiran

Menurut paradigma *neoliberal institutionalism*, politik ekonomi internasional dicirikan dengan adanya saling ketergantungan yang kompleks di antara negara. Peningkatan ketergantungan tersebut mendorong pemerintah masing-masing negara untuk melakukan kerjasama melalui koordinasi kebijakan yang diperkirakan akan melebar dari satu area permasalahan ke area permasalahan lainnya sehingga akan menghasilkan integrasi yang lebih mendalam. Helen Milner dan Moravesix memandang regionalisme sebagai hasil "*demand*" *domestic groups* dan merupakan "*supply*" dari negara-negara yang bersepakat, sehingga tekanan untuk membentuk kesepakatan perdagangan regional akan meningkat ketika (1) perusahaan lebih tergantung pada ekspor, (2) level aktivitas multinasional perusahaan meningkat, atau (3) komposisi perdagangan berubah dari *inter* ke *intra-industry* (Busch dan Milner). Selain itu, perusahaan yang

Universitas Indonesia

diuntungkan dengan skala ekonomi akan menekan pemerintah untuk membentuk perjanjian perdagangan bebas secara regional (Milner)¹¹.

Dua hal yang mendorong terbentuknya regionalisme, pertama adanya situasi dimana negara-negara memiliki kepentingan (nasional) yang sama (biasanya diakibatkan tingginya tingkat ketergantungan) untuk menciptakan mekanisme koordinasi kebijakan, untuk mendapatkan *public goods* atau menghindari dampak buruk dari luar yang diakibatkan dari ketergantungan. Kedua, adanya pengaruh dari *social groups* (domestik) yang memiliki dukungan politik¹².

Grugel dan Hout berpendapat bahwa regionalisme merupakan hasil dari perhitungan strategik yang dilakukan oleh aktor-aktor yang berada dalam negara dan masyarakat sebagai cara menentukan posisi mereka dalam merespon globalisasi. Regionalisme, seperti halnya globalisasi akan menghasilkan perubahan struktur pada tingkat regional dan global, yang menentukan *opportunity* dan batasan bagi kebijakan negara¹³.

Opportunity yang ditawarkan regionalisme tidak dapat diperoleh begitu saja tanpa adanya strategi yang tepat. Demikian juga dengan kondisi yang dapat membatasi kebijakan negara sebagai akibat dari regionalisme. Diperlukan strategi yang sesuai untuk dapat terlepas atau terhindar dari kondisi yang membatasi pilihan negara dalam upayanya untuk mencapai kepentingan nasional. Dalam penyusunan strategi, selain perubahan faktor lingkungan eksternal (global dan regional) hal yang juga menjadi penting dalam penyusunan strategi adalah kondisi internal yang dapat mempengaruhi lingkungan eksternal, baik aspek manusia maupun aspek fisik.

¹¹ Grugel, J., Hout, W., 2005, *Regionalism Across the North-South Divide: State Strategies and Globalization*, hal.15.

¹² Ibid. hal.16-17.

¹³ Ibid. hal.9.

1.5 Batasan Penelitian

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Proses Regionalisme yang melibatkan ASEAN 5 dan ASEAN-China.

Pemilihan ASEAN 5 dilandasi pemikiran bahwa dinamika regionalisme ASEAN lebih didominasi oleh lima negara yaitu Thailand, Indonesia, Malaysia, Philipina dan Singapura yaitu sejak pembentukan sampai dengan 1984, dengan bertambahnya Brunei. Secara ekonomi, dengan hitungan *Gross Domestic Product* (GDP), populasi dan geografis, masuknya Brunei Darussalam tidak mempengaruhi ASEAN secara signifikan. Hal demikian (signifikansi secara ekonomi) juga menjadi pertimbangan untuk tidak memasukkan CLMV (Cambodia, Laos, Myanmar dan Vietnam).

2. Faktor-faktor penentu daya saing yang dianalisis adalah *endowed resource*, infrastruktur, *domestic demand*, tenaga kerja, birokrasi, dan *entrepreneurs*.

1.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah:

1. Pola regionalisme ASEAN yang terbentuk akan sangat tergantung pada negara sebagai aktor yang menentukan kebijakan dan bertanggung jawab terhadap kepentingan nasional.
2. Melihat pada posisi daya saing Indonesia yang berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand, maka kondisi semua faktor-faktor penentu daya saing Indonesia relatif lemah.
3. Dengan asumsi bahwa batasan pada kebijakan negara merupakan bentuk ancaman, maka proses regionalisme menghasilkan dua hal, yaitu peluang dan ancaman. Ditambah dengan hipotesis kedua, dimana kondisi internal hanya menampilkan sisi kelemahan, maka

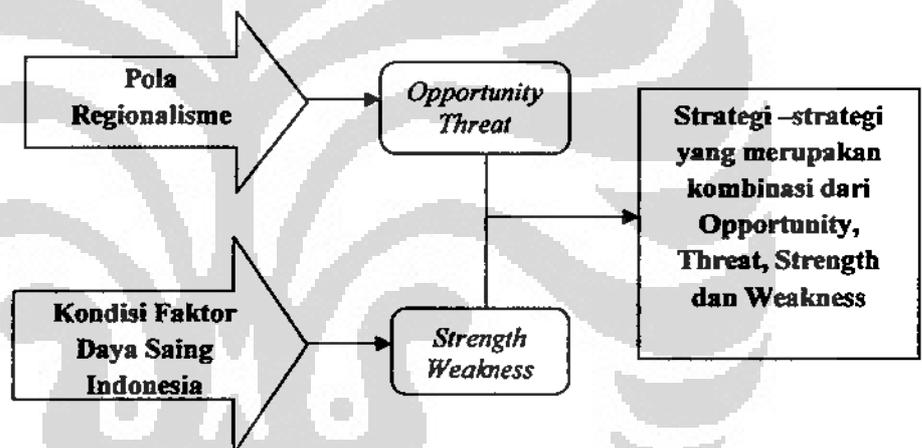
Universitas Indonesia

pilihan strategi yang terbentuk merupakan kombinasi dari Kelemahan internal dengan Peluang dan Ancaman yang dihasilkan regionalisme.

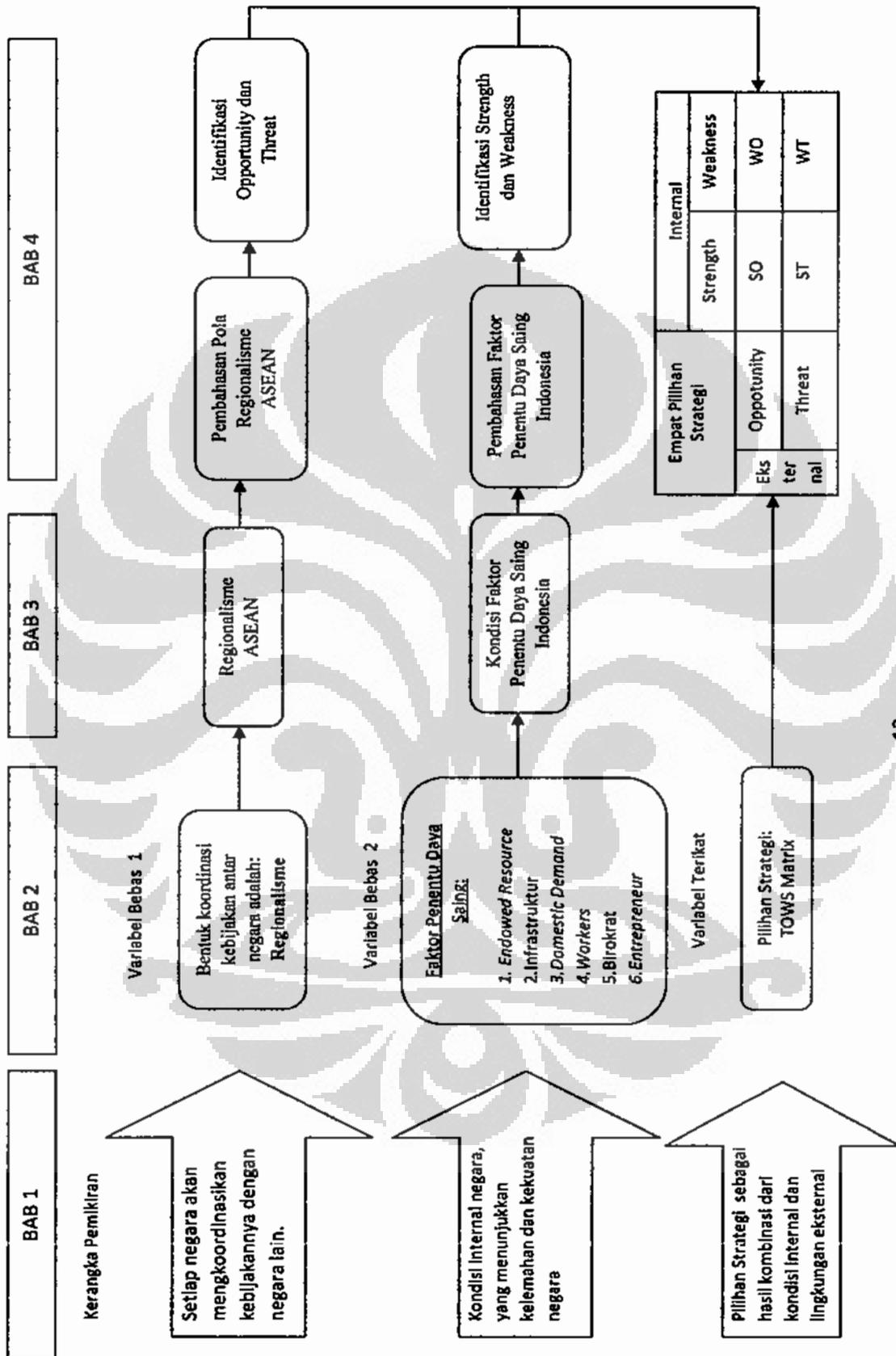
1.7 Model Analisis

1. Variabel bebas terdiri dari regionalisme ASEAN dan kondisi faktor penentu daya saing Indonesia.
2. Variabel terikat adalah pilihan strategi yang mungkin untuk menghadapi regionalisme ASEAN.
3. Gambar model analisis:

Gambar 1.1



Gambar 1.2. Skema Penelitian



1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai proses regionalisme ASEAN dan kondisi faktor penentu daya saing Indonesia, sehingga selain mempergunakan pendekatan kualitatif, dibutuhkan juga pendekatan kuantitatif. Oleh sebab itu, pendekatan penelitian yang dipakai pada dasarnya adalah *mixed approach*. Kombinasi ini dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif.

Metode pengumpulan data diperoleh melalui studi literatur baik dari buku, jurnal ilmiah, paper presentasi, artikel internet yang terkait dan relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu, data sekunder yang berhubungan dengan kondisi faktor penentu daya saing Indonesia, diperoleh melalui lembaga nasional seperti Badan Pusat Statistik, dan lembaga internasional seperti *World Economic Forum*, *International Labor Organization*, *Energy Information Administration*, dan lain sebagainya.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, permasalahan pokok, tujuan penelitian, hipotesa penelitian, model analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN TEORI

- A. Regionalisme
- B. Daya Saing dan Faktor Penentu Daya Saing Nasional
- C. Strategi

BAB 3 : PROSES REGIONALISME ASEAN DAN KONDISI FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA SAING INDONESIA.

Pada Bab ini peneliti akan menguraikan mengenai:

- A. Proses Regionalisme ASEAN

B. Kondisi Faktor-Faktor Penentu Daya Saing Indonesia

BAB 4 : ARAH REGIONALISME ASEAN DAN PILIHAN STRATEGI

- A. Pola Regionalisme ASEAN
- B. Kekuatan dan Kelemahan Kondisi Daya Saing Nasional
- C. Pilihan Strategi Menghadapi Regionalisme

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN



BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Regionalisme, Kepentingan Nasional, serta Ancaman

2.1.1 Regionalisme

Secara umum regionalisme didefinisikan sebagai orientasi mental dan atau fisik ke arah pembentukan identitas regional, yang akan mengarah pada regionalisasi yang lebih jauh (pembentukan entitas regional, kerjasama erat, dan atau integrasi), yang selanjutnya dapat mendorong kedamaian dan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut¹. Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa proses regionalisme berawal dari adanya suatu identitas regional tertentu, yang kemudian mengarah kepada pendalaman hubungan di antara entitas yang ada dalam wilayah identitas regional tersebut.

Sejalan dengan definisi tersebut, Hurrel dalam tulisannya, *Regionalism in Theoretical Perspectives*, membagi regionalisme ke dalam 5 (lima) proses yang berbeda, yaitu *regionalization*, *regional awareness and identity*, *interstate-cooperation*, *state-promoted regional integration* dan *regional cohesion*².

- *Regionalization* merupakan perkembangan integrasi sosial dalam sebuah wilayah dan seringkali terjadi melalui proses tidak langsung dari interaksi sosial dan ekonomi. Oleh sebab itu, *regionalization* seringkali bersifat informal dan tidak melibatkan negara serta tidak ditentukan batas teritorial negara.

¹ Bono, N. *Regionalism in East Asia: The transformation of regional political economy in East Asia*, Ritsumeikan Policy Science, Vol.10 No.1, pp. 117-130, 2002.

² Hurrel, A. *Regionalism in Theoretical Perspectives*, dalam Louise Fawcett dan Andrew Hurrel, eds., *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*, 1995. Oxford University Press, hal.39.

- *Regional awareness and identity* merupakan persepsi bersama atas kepemilikan tertentu seperti budaya, sejarah, tradisi agama atau dapat juga karena adanya musuh bersama.
- *Regional interstate-cooperation* merupakan regionalisme yang terbentuk sebagai upaya untuk merespon tantangan eksternal. Dalam regionalisme ini ditekankan adanya koordinasi untuk menentukan posisi regional dalam sistem internasional.
- *Stated-promoted regional integration* menekankan pada pengurangan atau bahkan usaha untuk menghilangkan batas antar negara. Dalam konteks ini bukan batas geografis yang ingin dihilangkan, namun batas interaksi seperti batasan pajak ekspor dan impor. Terdapat dua pertimbangan untuk melakukan integrasi regional yaitu pertimbangan ekonomi dan pertimbangan stratejik. Menurut Berthellon (2004) dalam tulisan Cosbey, Tay, Lim, Walls (2004), pertimbangan ekonomi bagi suatu negara untuk melakukan integrasi regional adalah dapat menciptakan pasar secara efektif dan lebih besar (melalui penurunan tarif dan non-tarif *barrier*), sehingga dapat mengambil keuntungan dari skala ekonomi dalam produksi barang dan jasa, serta meningkatkan kesempatan investasi yang produktif. Sedangkan pertimbangan stratejik untuk melakukan integrasi regional adalah mempererat hubungan keamanan dan politik di antara anggota, mengatasi kekhawatiran menjadi tertinggal dalam proses integrasi, lambatnya proses liberalisasi dalam tingkat multilateral (WTO) serta untuk meminimalkan dan menstabilkan efek negatif dari potensial konflik antar negara³.
- *Regional cohesion*, merupakan kombinasi dari keempat regionalisme sebelumnya yang membentuk unit regional yang terkonsolidasi. Pembentukan kohesi regional dapat dilatarbelakangi oleh keinginan

³ Cosbey Aaron, Tay Simon, Lim Hank, *The Rush to Regionalism: Sustainable Development and Regional/ Bilateral Approaches to Trade and Investment Liberalization*, November 2004.

untuk membentuk organisasi regional yang supranasional untuk memperdalam integrasi ekonomi dan membentuk rezim serta hegemoni regional yang kuat.

Integrasi ekonomi sebagai bagian dari proses regionalisme termasuk dalam kategori *stated-promoted regional integration*. Definisi lebih jauh mengenai integrasi ekonomi dilakukan oleh Pelkmans (1997) dalam Bogdanova (2010) sebagai penghilangan batasan ekonomi di antara dua negara atau lebih, dimana batasan ekonomi tersebut secara aktual maupun potensial, menghambat pergerakan barang, jasa dan faktor produksi serta arus komunikasi⁴. Sedangkan organisasi internasional seperti *United Nation Conference on Trade and Development* (UNCTAD), mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara⁵.

Selain untuk menghilangkan batasan ekonomi dan untuk memfasilitasi perdagangan internasional serta pergerakan faktor produksi lintas negara, terdapat tiga tujuan dari integrasi ekonomi menurut Walter S. Jones yang dikutip Sukendar (2003)⁶, yaitu potensi ekonomi, potensi politik dan resolusi konflik. Potensi ekonomi yang hendak diraih misalnya peningkatan daya saing dalam menghadapi perekonomian atau negara yang lebih kuat. Potensi politik biasanya dipergunakan negara kecil untuk menghindari ketersisihan mereka dari kancah internasional. Resolusi konflik melalui integrasi ekonomi dicapai melalui hubungan saling ketergantungan di antara negara yang berkonflik, sehingga potensi konflik dapat diredam.

⁴ Bogdanova, A. *Economic Growth and Income Convergence: Impact of European Integration*, Norges Handelshoyskole, 2010, hal.19.

⁵ Arifin, S. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, (PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2008), hal.26.

⁶ Sukendar, *Keanggotaan China di WTO dan Dampaknya terhadap Hubungan Ekonomi China-Amerika Serikat*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal.15.

Tahapan integrasi ekonomi menurut Balassa ada 6 (enam) yaitu⁷:

- 1) *Preferential Trading Area (PTA)*: adalah blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali.
- 2) *Free Trade Area (FTA)*: suatu kawasan dimana tarif dan kuota antar negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.
- 3) *Custom Union (CU)*: merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antar negara anggota dan menetapkan tarif yang sama terhadap negara yang bukan anggota.
- 4) *Common Market (CM)*: Merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber daya yang efisien.
- 5) *Economic Union*: Merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural)
- 6) *Total Economic Integration*: Penyatuan moneter, fiskal dan kebijakan sosial yang diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh anggota.

2.1.2 Kepentingan Nasional dan Ancaman

Negara memiliki kepentingan-kepentingan yang didasarkan pada nilai internal dan tujuan yang memotivasi tindakan mereka (negara). Kepentingan

⁷Arifin Sjamsul, op.cit. hal.35.

nasional suatu negara menentukan keikutsertaannya dalam pembangunan global dan menentukan langkah suatu negara dalam mengidentifikasi tujuan dan garis-garis besar kebijakan nasional serta strategi nasional⁸. Menurut Papp, kepentingan nasional secara sederhana adalah kepentingan yang dimiliki oleh sebuah negara, yang dapat dipandang sebagai tujuan nasional yang secara konstan dipengaruhi oleh unsur ekonomi, ideologi, militer, moralitas dan legalitas, serta peningkatan kekuatan⁹.

Unsur (kekuatan) ekonomi mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan militer dalam pembahasan *national security* semenjak berakhirnya perang dingin¹⁰. Masuknya unsur ekonomi dalam *national security* memunculkan gagasan mengenai *economic security* yang merupakan bagian integral dari *national security* selain militer. Sebagai bagian integral dari *national security*, *economic security* menunjukkan kesiapan sistem perekonomian negara untuk tanggap terhadap faktor eksternal dan faktor internal, yang menentukan berfungsinya perekonomian negara, terciptanya keadaan dan kesempatan untuk melakukan pembangunan¹¹. Definisi lain dari *economic security* suatu negara adalah kombinasi dari kondisi ekonomi, politik dan hukum yang dapat menjamin kuantitas maksimum reproduksi sumber daya ekonomi perkapita dalam jangka panjang dan dalam cara yang paling efisien¹². Menurut Jiang Yong, definisi terbaik dari *economic security* adalah kemampuan untuk meningkatkan standar kehidupan semua penduduk

⁸ Grebliauskas, A. *Analysis of Threats to Economic Security of Lithuania*, Kaunas Vytautas Magnus University, 2003, hal. 283.

⁹ Herlisrianto, Igor, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menggagas Pembentukan ASEAN Security Community Tahun 2003*, UI, Depok, 2008.

¹⁰ Snyder, D.C., Gregory, Sean. *Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issue for Reform*, Washington: Federation of American Scientists, 1997.

¹¹ Pukeliene, V., Cepaitiene, N. *Economic Security: a Regional Public Goods Approach*, Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, 2007.

¹² Grebliauskas, A. *Ibid.*

melalui pembangunan ekonomi dan mempertahankan perekonomian dari ketergantungan¹³.

Berdasarkan definisi dari *economic security* di atas, maka berbagai hal yang dapat menyebabkan terganggunya fungsi perekonomian negara dan terhambatnya reproduksi (produktivitas) sumber daya ekonomi perkapita dalam kuantitas maksimum dapat dikategorikan sebagai ancaman. Definisi yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi ancaman adalah definisi menurut Ullman, yang menyatakan bahwa ancaman adalah tindakan atau rangkaian kejadian yang:

- mengancam secara drastis dan berlangsung dalam beberapa periode waktu yang mengakibatkan degradasi kualitas hidup penduduk negara, atau
- mengancam secara signifikan sehingga membatasi pilihan kebijakan yang tersedia bagi negara atau entitas swasta non-pemerintah (perorangan, kelompok atau perusahaan) yang berada di dalam negara¹⁴.

2.2 Daya Saing Nasional dan Faktor Penentu Kekuatan Daya Saing

2.2.1 Daya Saing Nasional

Dalam menyusun strategi untuk menghadapi dinamika regionalisme dan implikasinya, diperlukan informasi mengenai kondisi kekuatan atau kelemahan internal. Kondisi internal yang menghasilkan gambaran mengenai kekuatan dan kelemahan, akan menentukan strategi yang akan dibuat, apakah bersifat *offensive* untuk mendapatkan *opportunity* ataukah bersifat *defensive* untuk menghindari atau meminimalkan *threat*. Dinamika regionalisme yang mengubah struktur lingkungan global dan regional tentunya mempengaruhi hubungan atau interaksi di antara pelaku ekonomi dari masing-masing negara.

¹³ Jiang Yong, *Economic Security: Redressing Imbalance*, China Security, Vol. 3(2), 2007.

¹⁴ Charles, Eugenia. *A Future of Small States: Overcoming Vulnerability*. London: Commonwealth Secretariat, 1997, hal 17-20.

Kondisi internal perekonomian yang penting dan berpengaruh dalam interaksi antar pelaku ekonomi, adalah kondisi mengenai daya saing nasional. Kondisi daya saing yang perlu diketahui bukanlah kondisi daya saing nasional secara keseluruhan, akan tetapi kondisi dari pembentuk daya saing yang terdiri dari berbagai faktor.

Sebelum menguraikan faktor-faktor pembentuk daya saing, penting kiranya untuk menentukan definisi daya saing sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Ada sebagian kalangan yang memandang daya saing sebagai harga jual termurah atau biaya yang terkecil. Harga jual termurah tidaklah mencerminkan tingginya daya saing, ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan rendahnya harga jual, di antaranya produk baru, atau pasar yang sedang mengalami perang harga. Demikian juga dengan biaya yang rendah, misalnya upah rendah, tidak dapat mencerminkan tingginya daya saing. Upah yang rendah dapat disebabkan oleh rendahnya kualitas pekerja atau tingginya persaingan di antara pekerja. Upah yang lebih rendah dari “yang seharusnya” akan menyebabkan dampak sosial jangka panjang terhadap perekonomian di wilayah. Selain upah tidak memenuhi standar hidup yang layak, juga dapat mempengaruhi perkembangan infrastruktur pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan pekerja.

Definisi yang dipakai adalah dari Karl Aiginger yang menyatakan bahwa daya saing nasional merupakan kemampuan suatu negara atau suatu wilayah untuk menciptakan kemakmuran¹⁵. Sedangkan *World Economic Forum* (WEF) menjabarkan definisi daya saing nasional sebagai seperangkat institusi, kebijakan, dan faktor-faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara¹⁶. Dalam bukunya, *The Competitiveness Advantage of Nations*, Porter menegaskan bahwa konsep terpenting dari daya saing pada level negara

¹⁵ Aiginger Karl, *Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities*, 2006.

¹⁶ <http://www.weforum.org>, di akses tanggal 25 Oktober 2010.

adalah produktivitas nasional. Dikatakan bahwa kemampuan untuk mencapai tujuan negara dalam meningkatkan standar hidup penduduknya, tidaklah tergantung pada gagasan “daya saing” akan tetapi tergantung pada produktivitas sumber daya nasional (tenaga kerja dan modal) yang dipergunakan. Produktivitas adalah nilai output yang diproduksi oleh satu unit tenaga kerja atau modal¹⁷. Definisi yang paling populer mengenai daya saing pada tingkat nasional adalah seperti yang tertulis dalam Report of the President’s Commission on Competitiveness yang ditujukan untuk pemerintahan Reagan di tahun 1984, yaitu¹⁸:

“A nation’s competitiveness is the degree to which it can, under free and fair market conditions, produce goods and services that meet the test of international markets while simultaneously expanding the real incomes of its citizens. Competitiveness at the national level is based on superior productivity performance.”

Keempat definisi tersebut sejalan dengan pengertian *economic security* yaitu “... menjamin kuantitas maksimum reproduksi (produktivitas) sumber daya ekonomi perkapita dalam jangka panjang dan dalam cara yang paling efisien”.

2.2.2 Faktor Penentu Daya Saing Nasional

Daya saing nasional sebagai suatu “seperangkat” atau “kemampuan negara”, seperti yang dinyatakan dalam definisi sebelumnya, tentunya terdiri dari berbagai elemen atau faktor pembentuk, yang dapat dirinci sampai pada tingkatan terkecil. Secara garis besar faktor pembentuk atau penentu daya saing terdiri dari faktor fisik, faktor manusia dan faktor lingkungan¹⁹. Ketiga

¹⁷ Porter E. Michael, *The Competitive Advantage of Nations*, The Macmillan Press Ltd, London, 1990, hal.6.

¹⁸ Dong Sung Cho, H. Chang Moon. *A Nation’s International Competitiveness in Different Stages of Economic Development*, *Advances in Competitiveness Research (ACR)*, Vol.6(1), 1998.

¹⁹ Dong Sung Cho, *From National Competitiveness to Bloc and Global Competitiveness*, *Competitiveness Review*, Vol.8(1), 1998.

faktor penentu daya saing, dapat dibagi lagi menjadi beberapa faktor yang lebih rinci. Berikut adalah beberapa faktor penentu daya saing yang dipilih untuk menggambarkan kondisi internal Indonesia:

2.2.2.1 *Endowed Resource*

Merupakan sumber daya yang digunakan sebagai *input* untuk kegiatan aktivitas perekonomian yang tersedia di alam. *Endowed resource* bisa berbentuk sumber daya mineral energi maupun non energi, seperti batubara, minyak, gas alam, sedangkan sumber daya non energi dapat berupa *raw material* seperti biji besi, emas dan perak²⁰.

2.2.2.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan bagian dari lingkungan bisnis, dapat berupa jalan, pelabuhan, fasilitas telekomunikasi yang memberi dukungan pada mobilitas faktor-faktor produksi²¹. Infrastruktur berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan *sharing* keuntungan dengan daerah yang lebih miskin khususnya wilayah yang jauh dan terisolasi²².

2.2.2.3 *Domestic Demand*

Domestic demand pada satu sisi dapat memberikan keuntungan pada industri domestik yang baru berkembang dan belum mampu melakukan penetrasi ke pasar luar negeri. Di sisi lain, globalisasi pada perdagangan memberikan kesempatan yang sama pada semua negara untuk menjual produknya diberbagai negara. Sehingga, industri domestik tidaklah secara bebas menjual barangnya di pasar domestik tanpa adanya persaingan. Meskipun demikian, tetaplah bahwa dalam beberapa hal, industri domestik diuntungkan oleh kedekatannya dengan pasar dalam negeri dari pada industri

²⁰ Nafziger Wayne E., *Economic Development*, New York: Cambridge University Press, 2006, hal. 414.

²¹ Dong-Sung Cho, *op.cit.*

²² Bhattacharyay, *Infrastructure for ASEAN Connectivity and Integration*, ASEAN Economic Bulletin, Vol.27(2), 2010, pp.200-220.

negara lain, misalnya biaya transportasi, modifikasi pada produknya untuk memenuhi ketentuan, waktu, membaca perubahan permintaan konsumen²³. *Domestic demand* atau *domestic market* ditentukan dengan cara: *Gross Domestic Product* (GDP) dikurangi total ekspor dan ditambah total impor²⁴.

2.2.2.4 *Workers*

Sumber daya manusia berupa pekerja merupakan bagian dari faktor produksi yang memegang peranan penting dalam menghasilkan barang maupun jasa. Produktivitas tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan karena meningkatnya produktivitas pekerja akan mempengaruhi setidaknya pada dua hal yaitu peningkatan daya saing nasional dan perbaikan standar hidup pekerja²⁵.

Produktivitas tenaga kerja dapat menggambarkan perolehan keuntungan bersama antara pekerja dan pemilik usaha. Bagi pekerja, suatu produktivitas kerja memberikan manfaat apabila menggambarkan tingkat upah yang tinggi diiringi dengan perbaikan kualitas hidup (kesehatan, kesejahteraan, pendidikan, ketrampilan) pekerja. Bagi pemilik usaha, produktivitas tinggi menguntungkan apabila menggambarkan profitability, proses produksi yang berkembang, tingginya daya saing dan besarnya pangsa pasar²⁶.

2.2.2.5 *Bureaucrats*

Birokrat adalah faktor yang penting dalam perekonomian. Perannya sebagai regulator mempengaruhi alokasi sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi nasional. Formulasi kebijakan yang tepat dapat mendorong

²³ Porter, M.E., Op.Cit

²⁴ United Nations, *Asia-Pacific Trade and Investment Report 2009: Trade Led Recovery and Beyond*, Thailand, 2009, hal. 185.

²⁵ Arifin Sjamsul, op.cit.hal.260.

²⁶ International Labor Organization, *Labor and Social Trends in ASEAN 2010: Sustaining Recovery and Development through Decent Work*, ILO, 2010, hal. 21.

dan merangsang perekonomian negara. Tidak ada negara yang maju tanpa dorongan dari positif dari birokrasi²⁷. Birokrat yang menjalankan kebijakan dan fungsinya dengan cara yang efisien, secara langsung akan mengangkat daya saing nasional²⁸. Sebaliknya, suatu birokrasi yang tidak efisien dan sangat korup, akan membuat sendi-sendi perekonomian negara menjadi rapuh, alokasi sumberdaya perekonomian yang tidak optimal, perekonomian biaya tinggi dan timbulnya ketidakpastian hukum²⁹.

2.2.2.6 *Entrepreneurs*

Entrepreneur adalah individu-individu yang mengenali opportunity ketika individu lainnya mengenalinya sebagai *chaos* atau *confusion*, dan merupakan *catalyst* yang agresif dalam perubahan pasar³⁰. *Entrepreneur* dapat dilihat dari paling tidak dalam empat cara: pertama sebagai pengelola sumber daya produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal; kedua, sebagai pengambil keputusan dalam kondisi ketidakpastian; ketiga, sebagai inovator; keempat sebagai pengisi kekosongan dan pelengkap *input* (dalam proses produksi). *Entrepreneur* membawa hal baru dalam perekonomian melalui pengenalan produk baru, fungsi produksi baru yang menurunkan kebutuhan input untuk memproduksi barang yang sama, menggunakan sumber material baru dan melakukan reorganisasi industri³¹.

²⁷ Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan oleh Guritno, D., 2008, Jakarta, PT Radja Grafindo Persada, hal.76-77.

²⁸ Dong-Sung Cho, op.,cit.

²⁹ Winarno, B. *Globalisasi: peluang dan ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, 2008, hal. 7.

³⁰ Kuratko, D.F., *Entrepreneurship: Theory, Process, Practice*, (edisi 8), South Western Cengage Learning, 2009, hal. 3.

³¹ Nafziger Wayne E., *Economic Development*, New York, Cambridge University Press, 2006, hal. 393-394.

Ada berbagai kendala yang dapat menghalangi kesuksesan atau keberhasilan *entrepreneur*, di antaranya adalah³² :

- a. Kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan
- b. Akses yang terbatas pada sumber-sumber keuangan
- c. Ilmu dan Teknologi

2.3 Strategi

2.3.1 Definisi

Terdapat banyak definisi mengenai strategi yang dipakai kalangan akademis. di antaranya menurut adalah Hofer & Schendel (1978) yang dikutip Tangkilisan³³ (2005), "*fundamental pattern of present and planned resources deployments and environmental interactions that indicates how the organization will achieve its objectives.*"

2.3.2 TOWS Matrix

TOWS Matrix pertama kali diperkenalkan sebagai formula untuk penyusunan strategi dalam lingkungan bisnis atau perusahaan. Dalam perkembangannya, TOWS Matrix dapat dipergunakan sebagai kerangka kerja untuk menyusun pilihan strategi, sebagai hasil kombinasi dari kondisi internal berupa *strength* dan *weakness* nasional dengan *opportunity* dan *threat* yang tersedia dalam lingkungan eksternal³⁴.

³² Nijkamp P., Moomaw R.L., Traistaru I, *Entrepreneurship, investment, and spatial dynamics: Lessons and Implications for enlarged EU*, Edward Elgar, 2006, hal.127.

³³ Tangkilisan H.N., *Manajemen Publik*, Grasindo, Jakarta 2005, hal. 253.

³⁴ Harold K, Weihrich H., *Essentials of Management: An International Perspective*, Tata McGraw-Hill, ed(7), 2004, hal. 107.

Berikut adalah gambar TOWS Matrix³⁵:

Gambar 2.2 Matriks TOWS

Faktor Internal	Internal Strength (S)	Internal Weakness (W)
Faktor Eksternal		
<i>External Opportunities (O)</i>	S-O Strategy: Maxi-Maxi	W-O Strategy: Mini-Maxi
<i>External Threats (T)</i>	S-T Strategy: Maxi-Mini	W-T Strategy: Mini-Mini

Sumber: Heinz, dan diolah penulis

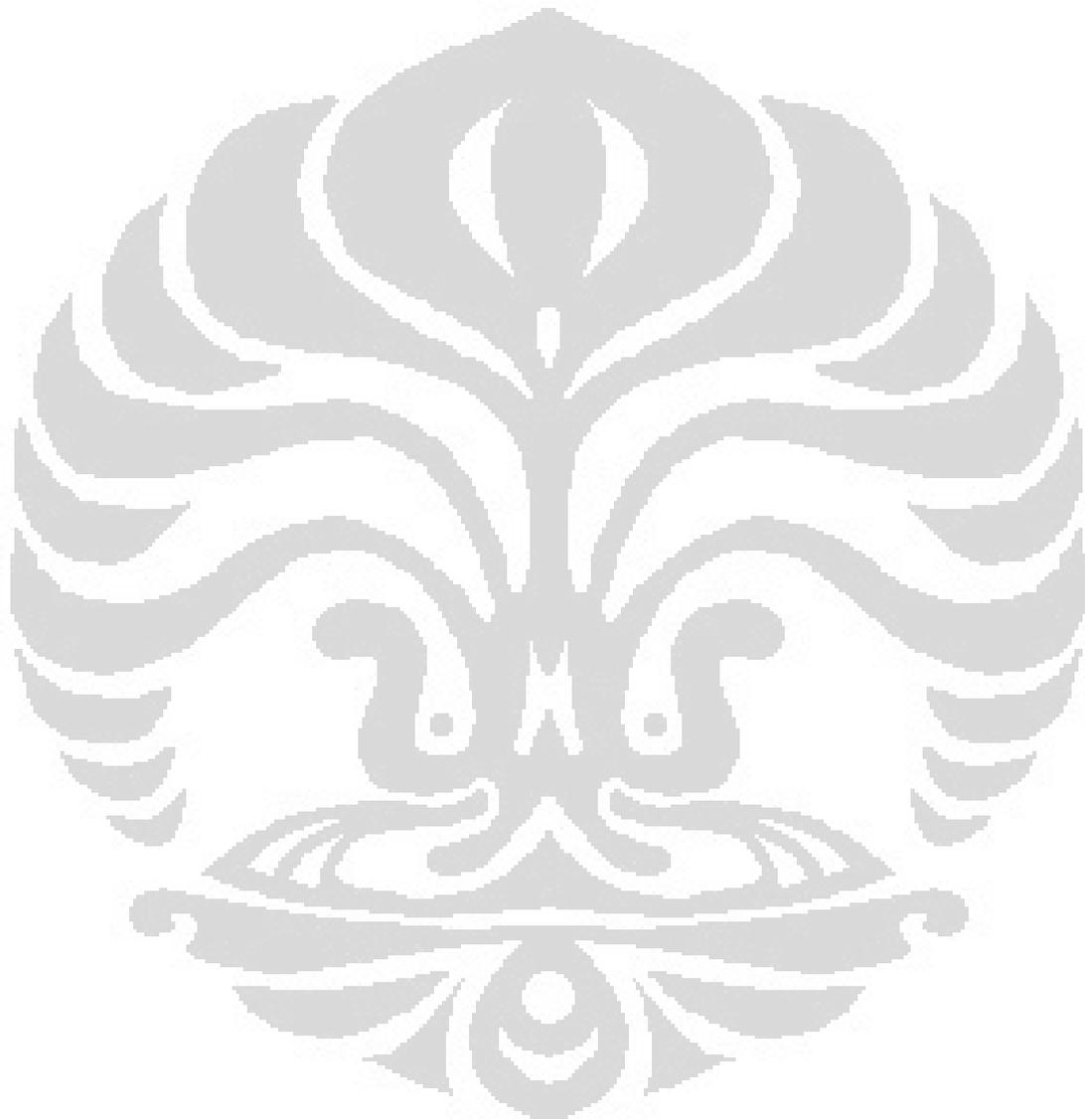
Matriks TOWS memberikan empat pilihan strategi yang didasarkan pada kombinasi dari kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

Keempat pilihan strategi tersebut adalah:

1. Strategi SO atau *maxi-maxi*, merupakan strategi yang disusun dengan memanfaatkan kekuatan internal untuk memperoleh keuntungan dari kesempatan yang tersedia oleh lingkungan eksternal.
2. Strategi WO atau *mini maxi*, adalah strategi yang ditujukan untuk meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan perolehan keuntungan dari peluang yang disediakan lingkungan eksternal. Meminimalkan kelemahan dapat dilakukan dengan mengembangkan area yang lemah atau mempergunakan kekuatan entitas luar yang memiliki kelebihan di dalam area tersebut.

³⁵ Ibid, hal.108

3. Strategi ST atau *maxi mini*, merupakan strategi yang disusun dengan cara memaksimalkan penggunaan kekuatan internal untuk menghindari atau meminimalkan ancaman.
4. Strategi WT atau *mini mini*, yaitu strategi yang berfokus pada upaya menghindari ancaman eksternal atau meminimalkan kelemahan internal.



Universitas Indonesia

BAB 3

PROSES REGIONALISME ASEAN DAN KONDISI FAKTOR-FAKTOR PENENTU DAYA SAING INDONESIA

3.1 Proses Regionalisme ASEAN

Pembahasan mengenai proses regionalisme ASEAN dimulai sejak pembentukan institusi di kawasan Asia Tenggara setelah berakhirnya Perang Dunia II, sampai dengan regionalisme terakhir, yaitu FTA yang dilakukan secara bilateral oleh anggota dan FTA antara ASEAN dengan negara di luar kawasan. Rentang waktu ditentukan berdasarkan pengaruh kejadian yang signifikan terhadap proses regionalism, yaitu pembentukan ASEAN dan Krisis Moneter 1997. Sehingga pembahasan dilakukan dengan terlebih dahulu menguraikan proses regionalisme sebelum ASEAN berdiri, proses regionalisme saat berdirinya ASEAN sampai dengan krisis moneter, dan regionalisme setelah terjadinya krisis moneter.

3.1.1 Regionalisme sebelum berdirinya ASEAN

Setelah perang dunia berakhir sampai dengan pembentukan ASEAN, negara-negara di kawasan Asia Tenggara, kecuali Thailand, baru saja terbentuk. Philipina memperoleh kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya tahun 1945, Malaysia diberi kemerdekaan oleh Inggris pada tahun 1957 dan Singapura mendapat ijin untuk membentuk pemerintahan sendiri pada tahun 1959. Kondisi umum masing-masing negara ASEAN 5 adalah sebagai berikut:

– Thailand

Meskipun Thailand tidak mengalami penjajahan dari negara lain, akan tetapi hal tersebut tidak menjamin kestabilan pemerintahannya. Berbagai kudeta militer mewarnai pergantian pemerintahan di Thailand sejak tahun 1932 sampai dengan 1966. Di rentang waktu tersebut, telah ada sedikitnya lima kali kudeta militer untuk menggulingkan pemerintahan

Thailand. Terbentuknya pemerintahan (militer) tanpa proses demokratis tidak mencegah terjalinnya hubungan Amerika Serikat dengan Thailand. Hal tersebut disebabkan Thailand memiliki kondisi yang memadai untuk melawan komunisme, sehingga dianggap penting oleh Amerika Serikat. Terjalannya hubungan antara Thailand dan Amerika Serikat secara resmi ditandai dengan kehadiran militer Amerika Serikat melalui program *Military Assistance Advisory Group* (MAAG) di tahun 1950. Secara tidak resmi, Amerika Serikat telah menjalin hubungan dengan (militer) Thailand akhir 1940an melalui operasi tertutup untuk mendukung gerakan militer yang anti-komunis¹.

- Indonesia

Meskipun Indonesia menyatakan kemerdekaannya di tahun 1945, akan tetapi masih diperlukan perjuangan untuk memperoleh pengakuan secara resmi dari Belanda. Amerika Serikat mencoba memainkan peran dalam menyelesaikan hubungan antara Indonesia dan Belanda melalui perjanjian Renville di awal 1948, dimana hasilnya sangat mengecewakan pihak Indonesia. Terlepas dari hasil yang mengecewakan, terdapat keuntungan dari kegagalan perjanjian Renville, terhadap perjuangan diplomasi Indonesia. Kegagalan Amir Sjarifuddin, tokoh sosialis, sebagai wakil Indonesia dalam perjanjian Renville menjadi perhatian kaum komunis di luar negeri. Pembubaran Kabinet Amir Sjarifuddin II pada 23 Januari 1948² tentunya meningkatkan kekhawatiran akan hilangnya pengaruh komunis di Indonesia. Di sisi lain, negara Barat (Amerika Serikat) tentunya merasa bahwa hasil perjanjian Renville akan mempengaruhi pandangan Indonesia terhadap Barat dan akan mengalihkan kedekatannya dengan komunis.

Meningkatnya aktivitas komunis di Indonesia, semakin membuat khawatir Amerika Serikat, ditambah dengan adanya pemberontakan PKI di

¹ Fineman, Daniel. *A Special Relationship: The United States and Military Government in Thailand, 1947-1958*, University of Hawaii Press, 1997.

² Insaniwati, I.N., (2002) *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya*, Indonesia Tera, hal.72.

Madiun pada September 1948, membuat posisi Amerika Serikat menjadi tegas dalam mendukung pemerintah Indonesia yang anti-komunis. Bagi Amerika Serikat, lebih penting Indonesia merdeka dibandingkan dengan terus dalam kekuasaan Belanda dan situasi menjadi *chaos*, kondisi yang memudahkan komunis masuk dan berkembang.

Meskipun akhirnya Indonesia memperoleh kemerdekaan melalui Konferensi Meja Bundar, akan tetapi karena hasilnya mengecewakan, dimana Indonesia dibebani hutang yang ditimbulkan Belanda, ditambah dengan tidak dipenuhinya janji Amerika Serikat untuk memberi bantuan ekonomi, maka timbullah kekecewaan pemerintahan Indonesia terhadap Barat. Demikian juga sebaliknya, netralitas yang dikedepankan Indonesia menimbulkan kecurigaan terhadap arah kebijakan pemerintah Indonesia³. Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat semakin menjauh, sejalan dengan meningkatnya kedekatan Indonesia dengan Uni Sovyet. Dukungan Uni Sovyet terhadap keanggotaan Indonesia di PBB pada September 1950, bantuan militer dalam pembebasan Irian Barat di tahun 1960an semakin mempererat hubungan keduanya⁴.

– Philipina

Philipina mendapat kemerdekaan dari Amerika Serikat pada tahun 1946, dan tetap membina hubungan yang erat dengan Amerika Serikat, di antaranya melalui persetujuan pengoperasian pangkalan militer di beberapa lokasi di Philipina sejak tahun 1947.

– Malaysia dan Singapura

Malaysia merupakan negara jajahan Inggris yang mendapat kemerdekaan sejak tahun 1957. Sedangkan Singapura mendapatkan persetujuan dari Parlemen Inggris untuk membentuk negara pada Agustus 1958, dan memulai pemilu untuk membentuk legislatif pada Mei 1959. Pada

³ Gouda, F., Zaalberg, T.B., (2002) *American Visions of the Netherlands East Indies/ Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949*, Amsterdam University Press.

⁴ Lebang, T., Susanto A.F., (2010), *Sahabat Lama, Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Grasindo, hal. 130.

16 September 1963, Singapura bergabung dengan Federasi Malaysia untuk beberapa alasan di antaranya, kelangkaan sumber daya alam, pertumbuhan populasi yang tajam, dan serangan komunis yang mengancam stabilitas pemerintahan⁵.

Terbentuknya SEATO

SEATO merupakan organisasi pertama yang terbentuk di kawasan Asia Tenggara setelah berakhirnya perang dunia I. Jatuhnya kekuasaan Perancis di Indochina, setelah kekalahannya dalam perang yang terkenal di Dienbienphu pada 20 November 1953⁶, membawa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap perluasan komunis di Asia Tenggara. Sebelum kejatuhan Perancis, Indochina tidaklah dipandang penting bagi kepentingan Amerika Serikat, baik dari sisi ekonomi, politik maupun strategis. Efek domino dari jatuhnya Indochina oleh komunis akan diikuti dengan kejatuhan semua kawasan di Asia Tenggara. Hal itulah yang menyebabkan Amerika Serikat mengajak beberapa negara sekutu lainnya yang memiliki kepentingan di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama membentuk pakta pertahanan untuk mencegah perluasan komunis di kawasan. Negara yang terlibat dalam SEATO adalah Inggris, Perancis, Australia, Selandia Baru, Philipina, Thailand dan Pakistan.

Keikutsertaan Inggris didorong motivasi untuk menjaga kepentingan di daerah kekuasaannya yaitu Malaya, Singapura, Sabah, Serawak dan Brunei. Sedangkan keikutsertaan Thailand didorong oleh kekhawatiran pergerakan pasukan Ho Chi Minh yang sudah menginvasi Laos di awal 1954 dan menguasai kota strategis Takhek yang berbatasan dengan Thailand⁷. Keanggotaan Philipina dalam SEATO selain didorong oleh pandangannya

⁵ Quah, J.S.T, *Public Administration Singapore-Style, Emerald*, 2010, hal.246.

⁶ Pierre Asselin, *New Perspectives on Dien Bien Phu*, University of Hawaii, 1997.

⁷ Nuechterlein, D.E., *Thailand and SEATO: A Ten Year Appraisal*, Asian Survey, Vol.4, No.12, 1964, pp. 1174-1181.

terhadap komunis sebagai ancaman juga dipengaruhi oleh faktor kedekatan hubungan dengan Amerika Serikat⁸.

SEATO dibentuk melalui penandatanganan *The Southeast Asia Collective Defense Treaty* di Manila pada tanggal 8 September 1954, dengan menyatakan tujuannya yaitu untuk membentuk sistem keamanan kolektif yang dapat melindungi wilayah Pasifik Barat dari kekhawatiran ancaman agresi komunis⁹. Indonesia tidak turut serta dalam keanggotaan SEATO, begitu juga Malaysia setelah mendapat kemerdekaan dari Inggris di tahun 1957.

Setelah pembentukan SEATO, organisasi yang kemudian terbentuk di kawasan Asia Tenggara pada Juli 1961 adalah *Association of Southeast Asia* (ASA) yang beranggotakan Malaya, Philipina dan Thailand. Berdirinya ASA diawali oleh gagasan Malaya untuk membentuk kerjasama regional yang bertujuan untuk melawan pemberontakan komunis. Gagasan ini disetujui oleh Philipina pada tahun 1959, yang kemudian setuju untuk mengusulkan *Southeast Asia Friendship and Economic Treaty*. Menteri Luar Negeri Thailand, Thanat Khoman tertarik dengan gagasan kerjasama ekonomi dan mencoba untuk mengikutsertakan semua negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki kedekatan dengan Vietnam Utara untuk ikut serta, akan tetapi upaya Thailand tersebut gagal. Akhirnya pada Juli 1961, dengan hanya beranggotakan tiga negara, Malaya, Philipina dan Thailand terjadi kesepakatan untuk membentuk ASA yang menekankan pada kerjasama ekonomi¹⁰.

Indonesia sedari awal sudah menolak pembentukan ASA. Hal tersebut disebabkan, selain tidak menyentuh aspek keamanan, kerjasama pembangunan ekonomi dalam ASA juga didisain untuk menghambat

⁸ Banlaoi, R.C. *The Philippines and Australia: Defense and Security Cooperation Against Terrorism*, PIPVTR, Quezon City, 2008.

⁹ Franklin J.F. (2006), *The Hollow Pact: Pacific Security and The Southeast Asia Treaty Organization*, Texas: Midwestern State University, hal.1.

¹⁰ Tarling, N. (1999), *Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.2, Part II, Cambridge University Press, hal.287.

pergerakan komunis, yang bukan merupakan kebijakan pemerintah Indonesia saat itu. Menteri Luar Negeri Indonesia Sumitro, berkomentar: "Spirit dibalik proposal (ASA) adalah anti-ini dan anti-itu...dan Indonesia tidak mau mengambil bagian dalam dalam kebijakan negatif dalam hubungan internasional". Keberlangsungan ASA kemudian terganggu dengan konflik antara Indonesia dan Philipina dengan Malaya yang berencana menggabungkan Sabah, Serawak dan Brunei dalam federasi Malaya. Untuk menyelesaikan konflik, pada tahun 1963 dibentuklah Malaya, Philippina, Indonesia (MAPHILINDO) yang mencoba memecahkan sengketa di antara ketiga negara tersebut¹¹. Ketidakberhasilan MAPHILINDO dalam menyelesaikan masalah, dan Malaysia tetap mengintegrasikan Sabah, Serawak, Brunei memicu konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. ASA walaupun belum dibubarkan, akan tetapi tidak lagi dapat menjalankan tujuannya.

3.1.2 Regionalisme setelah 1966-1997

Konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia akhirnya mereda setelah terjadinya pergolakan politik pada akhir 1965 di Indonesia yang kemudian membawa perubahan pemerintahan dari Sukarno ke Suharto di bulan Maret 1966. Selain Indonesia, di Philipina juga terjadi pergantian pemerintahan melalui proses pemilihan umum di akhir 1965. Pada bulan Januari 1966, Ferdinand Marcos resmi menduduki kursi pemerintahan Philipina. Sedangkan Federasi Malaysia mengalami perubahan keanggotaan, dimana Singapura terpisah dari Federasi pada Agustus 1965¹².

Setelah tercapai kesepakatan damai antara Indonesia dan Malaysia, selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, lima Wakil Negara/ Pemerintahan Asia Tenggara yaitu Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri Indonesia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi ASEAN atau

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

Deklarasi Bangkok. Deklarasi tersebut menandai berdirinya suatu organisasi regional yang diberi nama *Association of Southeast Asian Nations/ASEAN* (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Organisasi ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional yang masih pada tahap kooperatif dan belum bersifat integratif¹³.

1) Preferential Trade Agreement

Gagasan awal pembentukan *free trade area* dan *custom union* pertama kali diperbincangkan selama Pertemuan Menteri-menteri ASEAN di Manila pada tahun 1971. Akan tetapi karena kekurangterlibatan menteri keuangan dalam skema kerjasama regional di awal-awal tahun pendirian ASEAN, menjadi hambatan dalam upaya untuk melakukan kerjasama ekonomi yang lebih dekat¹⁴.

Pada pertemuan pertama menteri ekonomi ASEAN di Jakarta tahun 1975, Singapura berinisiatif mengkampanyekan pembentukan ASEAN *Free Trade Agreement*. Bahkan Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew datang ke Jakarta untuk mendapatkan dukungan dari pimpinan Philipina dan Thailand. Akan tetapi upaya Singapura untuk membentuk *free trade area* terhalang oleh kekhawatiran Indonesia akan masuknya Singapura ke dalam pasar domestiknya. Akibatnya Indonesia menghilangkan proposal pembentukan ASEAN Free Trade Area dari agenda Pertemuan Tahunan Pimpinan kedua di Bali tahun 1976¹⁵.

Upaya Singapura untuk meliberalisasi perdagangan dengan pembentukan *free trade area*, tidak terlepas dari kepentingannya sebagai negara yang perekonomiannya sangat tergantung pada perdagangan internasional dan sumber daya dari luar untuk industrinya

¹³ *ibid*

¹⁴ Daquila, Huy, *Singapore and ASEAN in the Global Economy: The Case of Free Trade Agreements*, University California Press, 2003.

¹⁵ *ibid*

yang *export-oriented*. Harapan Singapura dari pembentukan *free trade area* adalah penurunan tarif bea masuk di semua negara ASEAN. Saat itu, di kawasan Asia Tenggara, tarif bea masuk terendah di kawasan adalah Singapura dengan sebagian besar tarifnya antara 10% - 0%¹⁶. Rata-rata tertimbang tarif Singapura adalah 3,7%, sedangkan rata-rata keseluruhan kawasan adalah 20,9%. Indonesia sendiri memiliki rata-rata tarif bea masuk sebesar 20,2%, Malaysia 6,6%, Philipina 23% dan Thailand 30,4%¹⁷.

Dukungan terhadap upaya Singapura datang dari Philipina meskipun negara tersebut memiliki tarif tinggi. Karena sesuai dengan program peningkatan ekspor di saat itu, pemerintahan Philipina bersedia menurunkan tingkat tarif untuk meningkatkan *intraregional trade*. Selanjutnya kedua negara ini menekankan untuk pada penurunan tarif, peningkatan ekspor, dan perencanaan skema keuangan regional¹⁸.

Negara ASEAN yang menentang liberalisasi perdagangan melalui penurunan tarif secara keseluruhan adalah Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini mendukung penurunan tarif yang dilakukan secara *item by item*. Penolakan Indonesia dapat dimengerti karena kondisi manufakturnya tidak memungkinkan untuk melakukan substitusi impor. Persentase manufaktur Indonesia terhadap *Gross Domestic Product* (GDP) terkecil di ASEAN saat itu, yaitu 12,3%, sedangkan negara lain seperti Thailand adalah 21,3%, Malaysia 19,1%, Philipina 24,4% dan Singapura 21,7%. Kondisi itulah yang menyebabkan kekhawatiran Indonesia akan membanjirnya produk industri Singapura dan Philipina ke pasar domestik, sehingga sektor industri yang baru berkembang mendapat proteksi yang tinggi melalui tarif¹⁹.

¹⁶ Ooi, Guat Tin, *Preferential Trading Arrangement (PTA): an analysis of potential effects on intra-ASEAN trade*, Singapura, 1981.

¹⁷ Ibid

¹⁸ Ibid

¹⁹ Ibid

Kelambanan pembangunan sektor manufaktur di Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya pada masa itu antara lain disebabkan oleh:

1. Pembangunan industri yang mulai berkembang pada pertengahan tahun 1930-an terhenti dengan meletusnya Perang Dunia II dan masuknya Jepang ke Indonesia.
2. Sikap nasionalisme saat itu mempengaruhi kebijakan industri *inward-looking*, sedikit sekali menggunakan pengetahuan negara asing pada pembangunan industri dan membatasi impor barang-barang penting.
3. Masalah kekurangan pasokan listrik, suku cadang dan barang mentah impor²⁰.

Selain Indonesia, penolakan terhadap liberalisasi perdagangan juga datang dari Malaysia. Meskipun sikap Malaysia ini berlawanan dengan kondisi perekonomiannya saat itu, dimana tingkat inflasi rendah, 6,4%, dan sektor perindustriannya yang modern secara umum beroperasi secara efisien. Pertumbuhan ekspor manufakturnya juga tinggi yaitu 36,8% di tahun 1978 dan 32,3% di tahun 1979, tarif bea masuknya pun paling rendah setelah Singapura. Sehingga sikap penolakan terhadap liberalisasi perdagangan dipandang sebagai akibat dari kondisi sosial politik dalam negeri Malaysia, dimana liberalisasi perdagangan dikhawatirkan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi *bumiputera* dan penolakan terhadap liberalisasi adalah bentuk simpatinya bagi Indonesia, yang memiliki hubungan serumpun²¹. Posisi Thailand netral dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, akan tetapi memiliki tendensi untuk mengikuti Pihilipina dan Singapura. Selain karena

²⁰ Hayashi, Mitsuhiro, *SMEs, Subcontracting and Economic Development in Indonesia: With Reference to Japan's Experience*, Japan International Cooperation Publishing Co.,Ltd, Tokyo, 2005, hal.83-84.

²¹ Op.Cit.

tarifnya yang rendah, dukungannya pada intra-ASEAN trade melalui penurunan tarif adalah keinginan Thailand²².

Perbedaan kepentingan di antara negara ASEAN akhirnya terjembatani dengan terbentuknya *Preferential Trade Arrangement* sebagai jalan tengah antara proteksionisme dan liberalisme. Tidak seperti *free trade area*, PTA menghilangkan hambatan tarif untuk produk tertentu dan komoditi tertentu, sehingga negara khususnya yang belum setuju dengan liberalism, dapat memilih komoditi apa yang tidak diproteksi.

Tujuan dibentuknya PTA adalah untuk meningkatkan perdagangan di antara negara anggota ASEAN (*intra-ASEAN trade*), meningkatkan penggunaan raw material yang tersedia di kawasan ASEAN, dan mendukung pemasaran hasil produksi ASEAN *Industrial Project* (AIP)²³.

2) ASEAN Industrial Project (AIP)

Meskipun sudah direncanakan sejak KTT I di Bali tahun 1976, pembentukan dasar persetujuan AIP baru dilakukan pada 6 Maret 1980. AIP merupakan bentuk kerjasama industri di antara negara ASEAN yang bertujuan untuk:

- membentuk industri skala besar dalam memenuhi kebutuhan akan barang-barang esensial di kawasan regional,
- memprioritaskan proyek-proyek yang mempergunakan sumberdaya yang dimiliki oleh negara anggota, dan proyek-proyek yang berperan dalam memproduksi makanan dan pendapatan valuta asing, atau

²² Op.Cit.

²³ ASEAN, *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements*, Manila, 1977, <http://www.ascansec.org/1376.htm> diakses 25 November 2010.

proyek-proyek yang dapat menghemat valuta asing dan menciptakan lapangan kerja²⁴.

Proyek yang dikerjakan oleh masing-masing negara anggota ASEAN adalah:

- industri pupuk di Indonesia,
- urea di Malaysia,
- *superphosphate* di Philipina,
- mesin diesel di Singapura dan
- abu soda di Thailand²⁵.

Philipina mengubah proyek *superphosphate*nya menjadi menjadi proyek pabrik tembaga, sedangkan Singapura mengubah proyek diesel menjadi proyek vaksin hepatitis B, dan Thailand tidak jadi mengerjakan proyek abu soda. Sedangkan Indonesia baru menjalankan proyeknya di tahun 1984, bahkan Malaysia baru membangun industri pupuknya²⁶.

3) ASEAN Industrial Complementary(AIC) dan ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV)

Untuk meningkatkan industrialisasi di ASEAN, diperkenalkan skema kerjasama yang melibatkan sektor swasta. Konsep AIC diperkenalkan pada tahun 1976, akan tetapi dasar perjanjian baru dicapai pada tahun 1981. Gagasan dari pembentukan AIC adalah, barang yang berbeda yang merupakan bagian dari proses produksi, dibuat terpisah oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Barang jadi yang dihasilkan dari proses produksi tersebut akan diperdagangkan di dalam kawasan ASEAN, dengan menggunakan fasilitas PTA

²⁴ ASEAN, *Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects*, Kuala Lumpur, 1980.
<http://www.aseansec.org/1362.htm> diakses 25 November 2010.

²⁵ ASEAN Secretariat, *ASEAN Economic Co-operation: Transition and Transformation*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore, 1997, hal. 54.

²⁶ *Gagal di Pasar Sendiri*, Majalah Tempo, 12 Mei 1984,
<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1984/05/12/EB/mbm.19840512.EB40551.id.html>,
diakses 13 November 2010.

(pengurangan tarif). Tujuan yang hendak dicapai dari AIC adalah terciptanya perdagangan bebas terhadap produk manufaktur terpilih²⁷.

Skema kerjasama yang dibuat untuk lebih menarik keterlibatan sektor swasta adalah AIJV, yang merupakan pengembangan dari AIC. Skema AIJV menambahkan insentif pada tarif maupun non tarif. Tidak hanya barang komponen dan sparepart saja yang memperoleh fasilitas pengurangan tarif sesuai PTA, akan tetapi sumber daya lain yang terlibat dalam proses produksi juga mendapat perlakuan yang sama²⁸.

4) Pembentukan ASEAN *Free Trade Area*

Di akhir tahun 1980an, dua trend terjadi dalam perekonomian dunia, yaitu globalisasi dan regionalisasi yang terjadi secara bersamaan. MERCOSUR terbentuk pada Maret 1991, perjanjian final putaran Uruguay mengenai negosiasi perdagangan multilateral selesai pada Desember 1991, dan terjadi reorganisasi GATT menjadi WTO. Di benua Eropa, Uni Eropa terbentuk pada Pebruari 1992, sedangkan di Amerika Utara, NAFTA sedang dalam tahap negosiasi. Di Asia, kehadiran China sebagai kekuatan baru ekonomi mulai terasa.

Perkembangan perekonomian dunia tersebut, membuat ASEAN merasa harus bergerak ke arah integrasi ekonomi regional, untuk menghadapi tantangan perubahan dalam perekonomian dunia. Sebagai wujud dari kesiapan untuk melakukan integrasi ekonomi lebih dalam, di tahun 1991, Anand Panyarachun, Perdana Menteri ASEAN mengusulkan pembentukan AFTA, dengan memberikan argument:

- a. Mengarahkan industri masing-masing negara pada kompetisi regional akan membantu mempersiapkan mereka untuk

²⁷ Weatherbee, D.E., Emmers, R., *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Rowman & Littlefield, 2005, 189.

²⁸ ASEAN Secretariat, Op.Cit, hal. 59.

- liberalisasi perdagangan global seperti yang dihasilkan dalam putaran Uruguay.
- b. Membebaskan perdagangan dalam wilayah ASEAN yang akan menarik investasi dan meningkatkan ekspor industri, melalui pembentukan pabrik yang terintegrasi secara global.
 - c. Pasar Tunggal Eropa dan NAFTA mengharuskan ASEAN bersatu secara ekonomi untuk menghindari keterabaian dalam negosiasi ekonomi internasional²⁹.

Akhirnya ASEAN *Free Trade Area* dibentuk saat pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN IV tahun 1992, di Singapura, dengan tujuan yang dinyatakan adalah³⁰:

- a. Menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global.
- b. Menarik lebih banyak *Foreign Direct Investment* (FDI)
- c. Meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN (intra-ASEAN trade).

Latar belakang dari terbentuknya AFTA adalah kesadaran akan pentingnya perdagangan luar negeri bagi pertumbuhan ekonomi, serta harapan bahwa kerangka kerjasama yang lebih erat dan melibatkan seluruh anggota ASEAN dapat meningkatkan pada hubungan perdagangan. Kondisi perekonomian ASEAN sebelum AFTA dibentuk, dimana GDP ASEAN mewakili 2% dari total GDP dunia, akan tetapi nilai perdagangan ASEAN adalah 5% dari total seluruh perdagangan dunia. Dengan tingkat pertumbuhan total ekspor ASEAN adalah sebesar lebih dari 13% dalam dua dekade³¹.

²⁹ Severino, R.C., Op.Cit, hal. 223.

³⁰ Op.Cit.

³¹ Denoon B.H. David and Colbert Evelyn, Op.Cit.

Dengan terbentuknya AFTA, maka masing-masing negara anggota akan membebaskan tarif bea masuk dalam perdagangan mereka, sedangkan terhadap negara di luar anggota masih diberlakukan tarif bea masuk untuk melawan barang dan jasa dari luar AFTA. Tarif yang dibebaskan terbatas pada barang saja, dengan kandungan lokal/ *Rule of Origin* sebesar 40% atau penambahan nilai sebesar 40% di dalam ASEAN. Tujuan jangka panjang AFTA adalah memiliki perlakuan sistematis atas semua barang yang diperdagangkan di ASEAN. Awalnya, Persetujuan yang sudah dilakukan menyerukan agar AFTA diluncurkan di tahun 2000, dengan pelaksanaan ketentuan perjanjian terbanyak adalah di tahun 2003. Tahapan dalam AFTA dilaksanakan berdasarkan penggolongan barang sebagai berikut:

- Lima belas produk dimana tarif akan menjadi 0-5% di tahun 2000
- Dua kelompok besar dimana tarifnya akan diturunkan dalam dua sampai 5 tahun hingga menjadi 0-5% di tahun 2003
- Berbagai produk yang kecualikan, dimana masing-masing anggota dapat menentukan di depan produk apa saja yang akan terus dilakukan proteksi (barang yang masuk dalam *sensitive list*).

3.1.3 Regionalisme setelah 1997

1. FTA bilateral

Dua tahun setelah krisis moneter, Singapura melakukan negosiasi dengan Selandia Baru untuk membentuk bilateral *free trade area*, yang mencakup perdagangan barang dan jasa. FTA bilateral antara Singapura dan Selandia Baru diimplementasikan mulai 1 Januari 2001. Selanjutnya pada 12 Oktober 2001 Singapura dan Jepang mencapai kesepakatan FTA komprehensif yang akan meningkatkan perdagangan bilateral dan investasi. Empat negara

Universitas Indonesia

Eropa dan Singapura menyepakati ASFTA pada Juni 2002, sedangkan dengan Amerika Serikat, FTA ditandatangani 4 September 2003³².

Malaysia menyusul dengan merintis bilateral FTA dengan Jepang di awal 2003 yang diakhiri dengan penandatanganan pada 2005, dan dimplementasikan pada 2006³³. Selain dengan Jepang, pada tahun 2007 Malaysia dan Pakistan sepakat melakukan liberalisasi di bidang perdagangan barang, jasa dan investasi³⁴. Sedangkan Thailand menandatangani bilateral agreement dengan Amerika Serikat, Selandia Baru, Australia, China, Jepang³⁵.

2. Pembentukan ASEAN-China *Free Trade Area*

a. Sejarah Hubungan ASEAN-China

Hubungan ASEAN dan China mengalami pasang surut sejak era sebelum 1966 sampai dengan pembentukan ACFTA. Sebelum 1966 China merupakan sumber ancaman bagi sebagian besar negara anggota ASEAN. Pemberontakan komunis di Thailand, Malaysia, Philipina dan Singapura, kesemuanya diduga terkait dengan China. Kondisi sebaliknya dari hubungan dengan China ditunjukkan Indonesia, dimana sebelum tahun 1966 adalah masa dimana hubungan Indonesia dengan China sangat dekat.

Titik balik hubungan Indonesia dengan China terjadi setelah peristiwa pemberontakan PKI yang berujung pada pergeseran kekuasaan dari Sukarno pada Suharto pada Maret 1966. Dugaan keterlibatan China dibalik pemberontakan komunis

³² Daquila, T.C., Huy, L.H., *ASEAN in The Global Economy: The Case of Free Trade Agreements*, ASEAN Survey, Vol.43, No.6, University of California Press, 2003, pp. 908-928.

³³ Rahman, K.M. Japan-Malaysia Free Trade Agreement: Expectations and Achievements, *Journal of Comparative International Management*, 2008.

³⁴ Syal, Huma Nawaz. *Pakistan and Malaysia: Economic and Trade Relations*, The Institute of Strategic Studies Islamabad, 2007.

³⁵ Khor, Martin. *Bilateral/ Regional Free Trade Agreements: An Outline of Elements, Nature and Development Implications*, Third World Network, 2005.

tersebut, menyebabkan pemutusan hubungan diplomatik oleh Indonesia.

Hubungan China dengan Indonesia mulai terjalin lagi pada tahun 1977 dengan kehadiran KADIN pada saat berlangsungnya pameran perdagangan di Guangzhou. Setelah melalui berbagai kontak dagang, hubungan dagang antara Indonesia dan China resmi dibuka pada tahun 1985. Meskipun sudah membuka hubungan dagang di tahun 1985, karena faktor politik dalam negeri, hubungan diplomatik baru dibuka pada 1990, diikuti oleh Singapura³⁶.

Pendekatan pertama kali oleh China dilakukan Qian Qichen saat pertemuan menteri tahunan ASEAN di bulan Juli 1991³⁷, dilanjutkan dengan penetapan China sebagai mitra dialog ASEAN. Kehadiran Presiden Jiang Zemin di Kuala Lumpur pada tahun 1997 menambah hubungan dekat ASEAN dengan China³⁸.

Proses pembentukan ACFTA sendiri dimulai sejak tahun 2001 pada pertemuan puncak ASEAN-China yang diadakan di Brunei Darussalam, dan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan kerangka kerja pembentukan ACFTA di tahun 2002 di Vietnam. Persetujuan ACFTA direncanakan akan selesai dalam 10 tahun bagi anggota ASEAN dengan perlakuan khusus terhadap empat negara anggota baru yaitu Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja³⁹. Pembentukan ACFTA bertujuan untuk:

- 1) Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi di antara para pihak;

³⁶ Hadi, Syamsul., Wibowo, I. *Merangkul China: Hubungan Indonesia-China pasca Suharto*, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hal. 33.

³⁷ <http://www.aseansec.org/5874.htm>, di akses 1 November 2010.

³⁸ <http://www.aseansec.org/4055.htm>, di akses 1 November 2010.

³⁹ ASEAN, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation*, Phnom Penh, 4 Nopember 2002.

- 2) Meliberalisasikan secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu rezim investasi yang transparan, liberal dan mudah;
- 3) Menggali bidang-bidang baru dan langkah-langkah pengembangan yang tepat untuk kerjasama ekonomi yang lebih erat di antara masing-masing Pihak; dan
- 4) Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru dan menjembatani perbedaan pembangunan di antara para pihak⁴⁰.

b. Perekonomian China

Sejak reformasi ekonomi di tahun 1978, China tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di dunia, menyaingi Jepang dan Amerika Serikat dalam Gross Domestic Bruto. Sejak tahun 1990, perdagangan China mulai menunjukkan peningkatan surplus di angka US\$ 8,75 milyar, dengan mengalami kenaikan tajam di tahun 2005 yaitu sebesar US\$ 101,88 milyar, terpaut jauh dari surplus tahun 2004 sebesar US\$ 32,10 milyar. Surplus perdagangan terbesar adalah di tahun 2008 yaitu sebesar US\$ 295,46 milyar⁴¹.

Nilai ekspor China ke negara-negara ASEAN di tahun 2009 adalah 8,8% dari keseluruhan ekspor China. Uni Eropa (19,7%) dan Amerika Serikat (18,4%) masih merupakan tujuan ekspor terbesar China. Secara global, nilai perdagangan China adalah terbesar kedua setelah Amerika Serikat dengan persentase rasio mencapai 8,8% dari total perdagangan dunia⁴².

Pertumbuhan China yang pesat menyebabkan peningkatan kebutuhan konsumsi energi, khususnya batubara, minyak dan gas. China merupakan negara kedua setelah Amerika Serikat yang

⁴⁰ Ibid

⁴¹ IISD, *Elements of a Sustainable Trade Strategy for China*, Geneva: International Institute for Sustainable Development, 2010, hal.42.

⁴² Ibid, hal. 45.

paling banyak mengkonsumsi minyak yaitu sebesar 10% konsumsi minyak dunia⁴³. Meskipun China kayak akan sumber energi, akan tetapi produksinya tidak mampu memenuhi permintaan energi dalam negeri. Gap antara produksi dan permintaan menyebabkan China menjadi importir sumber energi seperti minyak bumi dan gas alam⁴⁴.

Industri merupakan konsumen energi terbesar di China yaitu sebanyak 70% dari total energi yang diproduksi. Kebutuhan energi yang besar tidak terlepas dari peran industri China sebagai industri global, yang memasok sebagian besar kebutuhan dunia. Produksi industri semen China adalah 48% dari seluruh industri semen di dunia, industri kaca sebesar 49%, industri baja sebesar 35% dan industri aluminium sebesar 28% dari total produksi di dunia⁴⁵.

3. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi yang tertuang dalam visi ASEAN 2020, untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran dan tingginya daya saing kawasan perekonomian ASEAN dimana terdapat kebebasan arus barang, jasa, investasi, arus modal dan arus tenaga kerja terampil. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi. Strategi ASEAN terdiri dari integrasi ASEAN dan meningkatkan daya saing perekonomian ASEAN. Dalam KTT

⁴³ Taneja, Pradeep. *China's Search for Energy Security and EU-China Relations*, *European Studies* 27 (2009): 259-273.

⁴⁴ Liyan Hu, Ter-Shing Cheng, *China's Energy Security and Geo-Economic Interest in Central Asia*, CEJISS, 2008.

⁴⁵ Pop, Irina Ionela, *China's Energy Strategy in Central Asia: Interactions with Russia, India and Japan*, University of Oradea, 2010.

ASEAN XII, disepakati mengenai percepatan pembentukan MEA di tahun 2015⁴⁶. Terdapat empat karakteristik kunci dalam MEA yaitu :

- a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi
- b. Daya saing perekonomian wilayah yang tinggi
- c. Wilayah pembangunan ekonomi wilayah yang adil
- d. Wilayah yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global⁴⁷.

3.2 Kondisi Faktor-Faktor Penentu Daya Saing Indonesia

3.2.1 Endowed Resource

Endowed resource adalah sumber daya alam atau bahan mentah yang didapatkan dari alam yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. *Endowed resource* dibedakan menjadi tiga kelompok besar yaitu sumber daya mineral yang terdiri dari energi dan raw material, sumber daya agrikultural, kehutanan dan perikanan serta sumber daya lingkungan.

1. Sumber Daya Mineral Energi

Dalam hal kepemilikan faktor sumber daya mineral, Indonesia merupakan negara penghasil energi terbesar di Asia Tenggara. Dari data yang dihimpun *Energy Information Administration* (EIA) cadangan mineral energi berupa batubara adalah yang terbesar, yaitu 4.770,80 mst (*million short ton*) 70% dari total cadangan batubara di ASEAN, disusul Thailand yang memiliki 22% atau 1.492,53 mst. Cadangan gas alam juga merupakan yang terbesar yaitu 45%, disusul Philipina sebesar 35%. Ladang minyak Indonesia memiliki cadangan sebesar 45% dari total cadangan di ASEAN disusul Malaysia 32% dan Brunei Darussalam sebesar 12%.

⁴⁶ ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord II*, Bali, 7 Oktober 2003, <http://www.aseansec.org/15159.htm> diakses 25 November 2010.

⁴⁷ Ibid

Posisi Indonesia dalam produksi batubara dan gas alam tetap mendominasi, dengan jumlah produksi masih di atas jumlah konsumsi, akan tetapi untuk minyak bumi, antara jumlah produksi (penyulingan) tidak dapat mengimbangi jumlah konsumsi. Kondisi yang berlawanan dengan Singapura dimana produksi (penyulingan) jauh di atas konsumsi dalam negerinya, meskipun bukan merupakan penghasil minyak mentah.

Tabel 3.1
Cadangan batubara, produksi, dan konsumsi di ASEAN

	Cadangan (2005) (Million Short Ton)	Produksi (2009) (Thousand Short Ton)	Konsumsi (2009) (Thousand Short Ton)
China	126.214,70	3.362.050,00	3.474.665,00
Indonesia	4.770,80	332.372,23	71.071,52
Thailand	1.492,53	19.363,31	35.605,87
Filipina	348,33	2.597,05	10.357,32
Malaysia	4,41	1.527,80	7.338,32
Singapura	-	-	6,61

Sumber: *Energy Information Administration*, <http://www.eia.doe.gov/>

Tabel 3.2
Cadangan gas alam terbukti, produksi, konsumsi, dan ekspor

	Proved Reserve (2010) (Trillion Cubic Feet)	Produksi (2009) (Billion Cubic Feet)	Konsumsi (2009) (Billion Cubic Feet)	Ekspor (2009) (Billion Cubic Feet)
China	107,00	2.929,03	3.075,48	117,25
Indonesia	106,00	3.058,63	1.297,47	1.259,69
Malaysia	83,00	2.662,75	1.026,61	1.087,35
Thailand	12,08	1.173,52	1.383,29	-
Filipina	3,48	131,37	111,24	-
Singapura	-	-	341,14	-

Universitas Indonesia

Sumber: *Energy Information Administration*, <http://www.eia.doe.gov/>

Tabel 3.3
Ladang minyak terbukti, produksi
dan konsumsi tahun 2009.

	Cadangan terbukti, British Petroleum (Thousand million barrels)	Produksi (Thousand barrels/day)	Konsumsi (Thousand barrels/day)
China	16	3.991	8.200
Indonesia	3,99	1.022	1.268
Malaysia	4	693	554
Filipina	0,14	24,57	313
Singapura	0	10,91	927
Thailand	0,44	338,57	940

Sumber: *Energy Information Administration*

2. Sumber Daya Mineral Non-Energi

Secara umum, Indonesia memiliki sumber daya mineral logam yang melimpah dibandingkan dengan negara anggota ASEAN lainnya. Kepemilikan cadangan tembaga dan emas mendominasi bersama dengan Philipina. Dari data produksi mineral tahun 2003, kecuali mineral zinc, Indonesia mendominasi produksi hampir semua mineral seperti bauksit, tembaga, emas, nikel dan tin.

Sumber daya mineral energi merupakan input penting dalam industri sebagai *raw material*. Sifatnya yang tidak dapat diciptakan menyebabkan pentingnya ketersediaan mineral ini dalam mendukung keberlanjutan industri suatu negara. Kondisi cadangan dan produksi mineral yang berperan sebagai *raw material* yang dimiliki Indonesia dan negara ASEAN lainnya terlihat dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5.

Universitas Indonesia

Tabel 3.4
Estimasi Cadangan Mineral Logam
(dalam metric ton, kecuali emas dalam ton)

	Bauksit	Tembaga	Emas	Nikel	Tin
Indonesia	2,8	4.772,2	3.379.486,0	598,9	0,5
Philipina	-	6.473,0	2.163.000,0	3.385,0	--
Thailand	-	95,5	2.746,0	-	0,3
Malaysia	18,0	0,8	0,1	75,0	0,9
Singapura	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat ASEAN

Tabel 3.5
Data Produksi Mineral ASEAN Tahun 2003

	Bauksit (kt)	Tembaga (kt)	Emas (t)	Nikel (kt)	Tin (kt)	Zinc (kt)
Indonesia	1.262,7	1.003,4	164,4	103,5	64,0	-
Philipina	-	20,4	39,0	19,5	-	-
Thailand	-	-	-	-	0,9	25,9
Malaysia	5,7	-	4,7	-	3,4	-
Singapura	-	-	-	-	-	-

Sumber : Sekretariat ASEAN dari *World Bureau of Metal Statistic 2005*

3. Luas Wilayah

Luas wilayah merupakan bagian dari *endowed resource* yang berperan dalam pembentukan daya saing dan dapat mempengaruhi produktivitas perekonomian suatu negara. Wilayah yang luas dan datar lebih disukai oleh industri daripada wilayah yang terbatas, karena akan mempengaruhi pergerakan sistem produksi. Kondisi wilayah yang sempit, mengharuskan bentuk distribusi sistem produksi yang vertikal, sehingga lebih banyak memerlukan sumber daya dari pada lokasi industri yang luas dan

Universitas Indonesia

datar. Kondisi luas wilayah Indonesia dan negara ASEAN lainnya dapat dilihat dalam tabel 3.6.

Tabel 3.6
Data Luas Daratan dan Lautan
dalam kilometer persegi

	Daratan (Km2)	Lautan (Km2)	Total	%
Indonesia	1,826,440	93,000	1,919,440	43%
Thailand	511,770	2,230	514,000	11%
Malaysia	328,550	1,200	329,750	7%
Philippina	298,170	1,830	300,000	7%
Singapura	638	10	648	0%

Sumber: *The World Factbook*

3.2.2 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan sarana penghubung dalam aktivitas perekonomian, dimana mobilitas sumber daya dipengaruhi secara langsung. Rendahnya kualitas infrastruktur mengakibatkan ketidakefisienan dalam perolehan sumber daya ekonomi. Selain menyebabkan rendahnya produktivitas, harga yang dihasilkan juga menjadi tidak ekonomis, dan menjadi lemah dalam bersaing.

Tidak hanya berpengaruh pada perolehan sumber daya, infrastruktur juga dapat mempengaruhi mobilitas tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi, serta mempengaruhi biaya distribusi dan waktu tempuh proses distribusi produk yang dihasilkan.

Gambaran mengenai kondisi infrastruktur Indonesia dan negara ASEAN lainnya berupa jalan, rel kereta api, pelabuhan laut dan pelabuhan udara dapat dilihat dalam tabel 3.7 dan tabel 3.8.

Tabel 3.7
Infrastructure Access Indicators in ASEAN Member Countries

	Electrification rate (% pop.with access)	Road density (area ¹)	Roads paved (% of total)	Rail density (area ¹)
Singapura	100,0	4.730,3	0,0	-
Malaysia	99,4	283,4	79,8	5,1
Thailand	99,3	352,4	98,5	8,7
Philipina	86,0	-	9,9	1,6
Indonesia	64,5	215,8	55,4	1,9

Sumber: Bank Dunia 2010; IEA 2009.

1. Area = km of asset per 1.000 square km of land area

Tabel 3.8
Peringkat Kualitas Infrastruktur Transportasi

Negara	Road	Rail Road	Port	Air Transport
Singapore	1	6	2	2
Malaysia	21	20	19	29
Thailand	36	57	43	28
China	53	27	67	79
Indonesia	84	56	96	69
Philippines	114	97	131	112

Sumber: The Global Competitiveness Index 2010-2011

3.2.3 Domestic Demand

Permintaan domestik menggambarkan kondisi besarnya permintaan terhadap barang atau jasa baik yang diproduksi dari dalam negeri atau luar negeri, sehingga untuk menghitungnya adalah total GDP yang menggambarkan total semua barang dan jasa yang diproduksi ditambah dengan impor dan dikurangi dengan ekspor (menggambarkan permintaan non domestik). permintaan domestik juga menggambarkan ukuran pasar yang mempengaruhi produktivitas

Universitas Indonesia

perusahaan. Semakin besar pasar domestik, maka skala ekonomi yang dimiliki perusahaan semakin besar. Berikut adalah gambaran kondisi permintaan domestik Indonesia dan negara ASEAN lainnya.

Tabel 3.9
Domestic Demand

(dalam jutaan US\$)

Negara	GDP	Total Ekspor	Total Impor	Domestic Demand
(1)	(2)	(3)	(4)	(2) – (3) + (4)
Indonesia	546,527.0	116,510.0	96,829.2	526,846.17
Thailand	264,322.8	152,497.2	133,769.6	245,595.24
Philipina	161,357.6	38,334.7	45,533.9	168,556.89
Malaysia	193,107.7	156,890.9	123,330.5	159,547.31
Singapura	182,701.7	269,832.5	245,784.7	158,653.91

Sumber: Sekretariat ASEAN, diolah penulis.

3.2.4 Workers

Untuk negara berkembang seperti Indonesia, jumlah angkatan kerja diukur dari jumlah penduduk yang berusia di antara 15-64 tahun. Dari sisi kuantitas angkatan kerja, Indonesia memiliki jumlah yang terbesar di ASEAN (Tabel 3.10).

Tabel 3.10
Angkatan Kerja (Usia 15+)
(dalam ribuan)

	2000	2010	2015	2020
China	728.656	797.593	817.051	817.478
Indonesia	96.958	117.578	126.886	135.501
Philippines	31.477	39.639	43.943	48.400
Thailand	34.304	38.977	40.162	40.794
Malaysia	9.726	12.250	13.369	14.401
Singapore	2.059	2.632	2.790	2.834

Sumber: ILO: *Labour and Social Trends in ASEAN 2010*

Sekarang, dimana penyediaan faktor-faktor produksi sudah mengglobal, kuantitas tenaga kerja tidak lagi menjadi faktor yang signifikan terhadap pembangunan daya saing. Mobilitas tenaga kerja antar negara sudah tinggi dengan meningkatnya transportasi, sehingga kekurangan tenaga kerja di suatu negara dapat dipenuhi dari pasar tenaga kerja global. Hal terpenting sekarang adalah kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing dalam pasar tenaga kerja global dan dapat mengimbangi perubahan lingkungan yang cepat dalam sistem produksi.

Untuk memperoleh kondisi mengenai kualitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, digunakan data sekunder dari WEF sebagaimana terlihat dalam tabel 3.11.

Tabel 3.11
Indeks Tingkat Pendidikan dan Pelatihan

	Peringkat	Score
Singapore	5	5,77
Malaysia	49	4,55
Thailand	59	4,25
Indonesia	66	4,18
Philippines	73	4,02

Sumber: *The Global Competitiveness Index 2010-2011*

Selain kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja, kondisi produktivitas tenaga kerja juga memberi gambaran penting mengenai peran tenaga kerja dalam membentuk daya saing nasional. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan ILO, berikut adalah kondisi produktivitas tenaga kerja di masing-masing negara anggota ASEAN:

Tabel 3.12
Output per Pekerja
(constant 2009 US\$)

	2000	2007	2008	2009
Singapore	80.564	92.618	86.226	74.790
Malaysia	29.782	37.111	38.376	37.837
Thailand	13.192	16.124	16.200	15.441
China	5.993	12.313	13.414	14.560
Philippines	9.044	10.356	10.562	10.642
Indonesia	7.552	9.821	9.915	9.888

Sumber: ILO: *Labour and Social Trends in ASEAN 2010*

3.2.5 Bureaucrats

Sejak tahun 2004, melalui pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi, Indonesia memulai upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi. Meski sudah berjalan 6 tahun, akan tetapi tidak terjadi perubahan yang signifikan terhadap kondisi birokrasi di Indonesia. Dari tabel 3.13 terlihat bahwa Indeks Persepsi Korupsi masih buruk dibandingkan negara ASEAN lainnya. Hal ini menandakan bahwa upaya yang sudah dilakukan KPK tidaklah cukup untuk menghasilkan kondisi birokrasi yang lebih baik dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand.

Tabel 3.13
Indeks Persepsi Korupsi

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002
Singapura	9.30	9.20	9.20	9.30	9.40	9.40	9.30	9.40	9.30
Malaysia	4.40	4.50	5.10	5.10	5.00	5.10	5.00	5.20	4.90
Thailand	3.50	3.40	3.50	3.30	3.60	3.80	3.60	3.30	3.20
Indonesia	2.80	2.80	2.60	2.30	2.40	2.20	2.00	1.90	1.90
Philipina	2.40	2.40	2.30	2.50	2.50	2.50	2.60	2.50	2.60

Sumber: *Transparency International*

3.2.6 Enterpreneurs

Kondisi entrepreneur tidak dapat dihitung berdasarkan kuantitasnya, akan tetapi dapat diukur dari besarnya hambatan yang dapat menghalangi aktivitas yang dilakukannya. Sebagaimana yang diuraikan dalam bab 2, dimana aktifitas entrepreneur meliputi:

- pengelolaan sumber daya produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal;
- pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian;
- inovator;
- pengisi kekosongan dan pelengkap *input*

Sebagai pengelola sumber daya produksi seperti tanah, tenaga kerja dan modal, entrepreneur membutuhkan kondisi lingkungan berupa infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitasnya. Buruknya infrastruktur dapat menghambat aktivitas pengelolaan sumber daya yang berujung pada keenganan *entrepreneur* untuk melanjutkan aktivitasnya atau memindahkan aktivitasnya ke lokasi yang lebih menguntungkan. Hambatan terhadap entrepreneur dalam hal infrastruktur, dapat dilihat dalam tabel 3.7 dan tabel 3.8.

Selain infrastruktur, faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dan perkembangan *entrepreneur* adalah kondisi birokrasi. Efisiensi birokrasi dapat mempengaruhi efektivitas kegiatan *entrepreneur*. Kompleksitas birokrasi, selain mengurangi efisiensi penggunaan sumber daya juga mengurangi keuntungan waktu, suatu hal penting yang dibutuhkan dalam aktivitas *entrepreneur*. Hambatan dalam bidang birokrasi dapat dilihat dalam tabel 3.13.

Aktifitas entrepreneur yang berhubungan dengan inovasi sangat dipengaruhi oleh jaminan negara untuk melindungi hasil karyanya atau hak kekayaan intelektual. Aktifitas inovasi seringkali merupakan tahapan bagi perkembangan inovasi selanjutnya, sehingga perlindungan

Universitas Indonesia

terhadapnya adalah hal yang menentukan bagi keberlanjutan inovasi. Tidak terlindunginya hasil inovasi akan menimbulkan keengganan entrepreneur untuk melanjutkan aktivitas atau bahkan menyebabkan meningkatnya *brain drain* inovator ke negara yang memiliki perlindungan lebih baik terhadap hak kekayaan intelektual. Kondisi perlindungan hak kekayaan intelektual di Indonesia diperlihatkan dalam tabel 3.14.

Tabel 3.14
Indeks Hak Kekayaan Internasional

	International Property Right Index	Legal and Political Environment	Physical Property Rights	Intellectual Property Rights
Singapura (12)	7.8	7.9	8.0	7.6
Malaysia (25)	5.8	6.2	5.6	5.6
Thailand (32)	5.4	4.7	6.9	4.4
Philipina (47)	4.2	3.3	5.0	4.3
Indonesia (47)	4.2	2.5	6.0	4.0

Sumber: *International Property Rights Index 2007*

Selain tiga kondisi yang berpengaruh terhadap perkembangan *entrepreneur*, kondisi yang tidak kalah penting adalah dukungan finansial dalam mendukung aktifitasnya. Kegiatan entrepreneur yang bersifat inovatif, atau memasuki bidang bisnis baru yang memiliki tingkat risiko tinggi membutuhkan dukungan finansial. Kondisi finansial dalam mendukung kegiatan entrepreneur dapat dilihat dalam besarnya tingkat bunga pinjaman dalam tabel 3.15.

Tabel 3.15
Tingkat Bunga Deposito Berjangka-3 bulan
(dalam persen)

Negara	2005	2006	2007	2008	2009
Singapura	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3
Thailand	2.00-3.00	3.25-4.75	2.00-2.25	1.35-1.88	0.65-0.75
Malaysia	3.0	3.2	3.2	3.0	2.0
Philippina	5.9	5.1	5.0	5.9	3.0
Indonesia	11.8	9.7	7.4	11.2	7.5

Sumber: *ASEAN Finance and Macro-economic Surveillance Unit Database*



Universitas Indonesia

BAB 4

ARAH REGIONALISME ASEAN DAN PILIHAN STRATEGI

4.1 Regionalisme Sebelum 1966

Regionalisme di Asia Tenggara tidak terlepas dari proses regionalisme politik yang terjadi di dunia. Seperti halnya yang terjadi dibelahan dunia lain, setelah perang dunia II, hubungan antar negara dipengaruhi oleh dua kekuatan hegemoni yaitu blok kapitalis (Barat) yang diwakili Amerika Serikat serta blok komunis yang diwakili China dan Uni Sovyet. Pada awal regionalisme, upaya untuk mempertahankan dan memperebutkan pengaruh serta kepentingan mewarnai proses regionalisme di kawasan Asia Tenggara.

Regionalisme di Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan SEATO yang merupakan respon Amerika Serikat atas kekalahan Perancis oleh komunis di Indochina. Kesamaan pandangan terhadap komunis sebagai musuh bersama merupakan dasar utama dari pembentukan SEATO. Pemberontakan komunis sudah menjadi masalah di Thailand dan Philipina sebelum kekalahan Perancis di tahun 1954. Pemerintah Philipina memiliki pengalaman menghadapi komunis pada saat pemberontakan Hukbalahap di tahun 1946 yang mencapai puncaknya antara tahun 1949 sampai dengan 1951¹. Meskipun sudah dapat ditumpas, kemenangan komunis di Indochina berpotensi membangkitkan kembali ancaman komunis bagi pemerintahan Philipina, sehingga rencana pembentukan SEATO ditanggapi positif.

¹ Kerkvliet B.J., *The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines*, University of California Press, 1977

Seperti halnya Philipina, pemberontakan komunis juga menjadi ancaman bagi Thailand. Keberadaan komunis sudah ada di Thailand sejak tahun 1929, dan memiliki hubungan dengan komunis Vietnam dan China². Pergerakan pasukan Ho Chi Minh yang sudah mendekati perbatasan Thailand melalui Laos, membuat pemerintah Thailand semakin merasa terancam. Oleh sebab itu, sebagai upaya untuk mendapatkan bantuan dalam menghadapi ancaman komunis, Thailand yang terbiasa dengan sikap netralnya, menyatakan dengan tegas posisinya sebagai negara anti komunis dalam konferensi Jenewa yang diselenggarakan pada pertengahan tahun 1954³. Ajakan Amerika Serikat untuk membentuk pakta pertahanan menghadapi komunis, tentunya merupakan jawaban dari kekhawatiran Thailand akan pergerakan komunis Vietnam. Di samping itu, posisi pangkalan militer Amerika Serikat⁴ yang berada di Philipina menjadi pertimbangan Thailand dalam memperoleh perasaan aman dari ancaman komunis.

Penolakan Indonesia untuk ikut masuk dalam keanggotaan SEATO menunjukkan bahwa persepsi terhadap sumber ancaman Indonesia berbeda dengan Thailand dan Philipina. Meskipun di tahun 1948 pemerintah Indonesia juga mengalami pemberontakan komunis, akan tetapi tidak membuat pemerintah Indonesia merasa terancam. Bahkan pada tahun-tahun tersebut, Indonesia mulai membina hubungan dengan negara komunis yaitu Uni Sovyet.

Malaysia yang mendapatkan kemerdekaan dari Inggris tahun 1957 juga menolak ikut serta dalam keanggotaan SEATO. Akan tetapi alasan yang melatarbelakanginya berbeda. Keikutsertaan Malaysia dalam SEATO yang cenderung anti komunis dan anti China, dikhawatirkan akan memprovokasi etnis China Melayu serta komunis Indonesia untuk meningkatkan perlawanan

² Jukes, G., *The Soviet Union in Asia*, University of California Press, 1973, hal.144

³ Joes, A.J., *Resisting Rebellion: The History and Politics of Counterinsurgency*, The University of Kentucky Press, 2004, hal.212

⁴ Ping, J.H., *Middle Power Statecraft: Indonesia, Malaysia, and The Asia Pasific*, Ashgate, 2005, hal.196.

terhadap pemerintah. Keanggotaan Malaysia dalam SEATO akan meningkatkan persepsi kaum komunis bahwa Federasi Malaysia tidak lebih dari kolonialisme bentuk baru. Posisi geografis Malaysia sangat rawan akan serangan komunis, dari perbatasan Thailand, dimana tempat partai komunis Thailand dan Malaysia bergabung, serta dari perbatasan Indonesia, dapat sewaktu-waktu melakukan serangan.

Gagasan Malaysia untuk membentuk ASA, dilatarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap pergerakan komunisme, sehingga untuk memenuhi kepentingan dalam menghadapi ancaman komunis tanpa menyebabkan gangguan stabilitas politik dalam negeri, dibentuklah organisasi yang bertujuan dalam pembangunan ekonomi untuk konsumsi politik dalam negeri sekaligus juga memperkuat kerjasama dengan negara lain dalam upaya membendung invasi komunis. Philipina dan Thailand yang merasa kepentingannya tidak tersalurkan dalam SEATO memandang ASA sebagai alternatif untuk mencapai kepentingannya tersebut.

Upaya Thailand membuat organisasi yang jauh dari kesan pengaruh negara hegemoni dengan mengedepankan aspek ekonomi tidak berhasil menarik Indonesia untuk ikut ambil bagian. Indonesia masih melihat ASA sebagai organisasi yang dipengaruhi kepentingan Blok Barat, meskipun keanggotaan yang terdapat dalam ASA adalah murni bagi negara-negara kawasan Asia Tenggara. Selain itu, sikap anti-komunis yang ada dalam ASA juga turut menghalangi masuknya Indonesia.

4.2 Regionalisme 1966-1997

a. Pembentukan ASEAN

Peristiwa menjelang tahun 1966 merupakan peristiwa kunci yang menentukan regionalisme Asia Tenggara berikutnya. Lepasnya Singapura dari Malaysia setelah konflik antar etnis yang terjadi pada Agustus 1965,

Universitas Indonesia

pemberontakan komunis di Indonesia pada September 1965, dan pemilihan umum di Philipina pada akhir Desember 1965 merupakan peristiwa kunci sebelum pembentukan ASEAN.

Di depaknya Singapura dari Federasi Malaysia, membuat negara tersebut kembali dihadapkan pada permasalahan ekonomi yang belum terselesaikan. Kondisi Singapura setelah lepas dari Malaysia digambarkan oleh Goh Keng Swee, Menteri Keuangan Singapura pertama:

*"We therefore sought a political merger with the then independent state of Malaya, hoping that the combined market would support ISI in the enlarge national territory. We succeeded in the political aim of merger in 1963, but our hopes for ISI were not realized. After two years, we were expelled from Malaysia to emerge as a small independent state on our own. It was a terrifying experience for Singaporeans of my generation. Our Economic problems remained unsolved, we had no natural resources and the population had been growing at a brisk pace. Further, between 1959 and 1963, the Communist United Front organizations attacked the government from every direction, giving us an unenviable reputation for political instability"*⁵.

Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura saat itu mengungkapkan kekhawatiran akan masa depan negaranya:

*"We had ben asked to leave Malaysia and go our own waywith no signposts to our next destination. We faced tremendous odds with an improbable chance to survival. ... We inherited the island without its hinterland, a heart without a body. ... My third and biggest headache was the economy – how to make a living for our people? ... On that 9th day of August 1965, I started out with great trepidation on a journey along an unmarked road to an unknown destination"*⁶.

⁵ Quah, J.S.T. Op. Cit, hal. 246.

⁶ Ibid, hal.248.

Economic security menjadi concern pimpinan Singapura karena menentukan keberlangsungannya sebagai suatu negara. Oleh sebab itu, Singapura akan memanfaatkan berbagai kesempatan untuk membawa kepentingan nasionalnya, termasuk dalam proses regionalisme ASEAN berikutnya.

Tidak hanya Singapura, kondisi perekonomian yang buruk juga dialami pemerintahan baru Indonesia di tahun 1966, krisis ekonomi dengan inflasi yang tinggi dan terisolasinya Indonesia dari dunia luar sejak keluar dari keanggotaan PBB di awal tahun 1965 merupakan masalah yang harus segera diatasi. Inflasi di tahun 1966 mencapai 365,5% dan krisis devisa yang berlangsung sejak tahun 1950an menyebabkan posisi devisa negatif US\$ 3 juta pada akhir tahun 1965⁷. Krisis devisa telah membuat industrialisasi Indonesia terhambat akibat dari tidak tersedianya devisa yang merupakan persyaratan untuk melakukan impor.

Bagi Malaysia tahun 1966, sembilan tahun sesudah kemerdekaannya, merupakan awal pelaksanaan program pembangunan lima tahunan⁸, sehingga kepentingan nasional Malaysia saat itu adalah mempertahankan kondisi internal maupun eksternal yang kondusif bagi perekonomiannya. Pemerintahan baru Philipina yang terbentuk di awal tahun 1965 tentunya memprioritaskan pada kebijakan populer dalam negeri.

Pemerintahan baru Philipina, Presiden Ferdinand Marcos yang menduduki kursi pemerintahan di awal 1966, segera melakukan perbaikan hubungan diplomatik yang sempat tegang akibat sengketa wilayah atas Sabah dengan Malaysia. Perbaikan hubungan diplomatik antara Philipina dan Malaysia diikuti dengan kesepakatan damai antara Indonesia dan Malaysia, yang menandai berakhirnya era konfrontasi.

⁷ Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Periode 1959-1966*. Jakarta: Bank Indonesia, hal. 14.

⁸ Ang, James B. *Financial Development and Economic Growth in Malaysia*, 2008, hal. 39.

Perubahan-perubahan tersebut menjadi momentum yang tepat bagi pembentukan organisasi regional. Kepentingan nasional yang sama yaitu perbaikan dan penguatan ekonomi dalam negeri dan persepsi terhadap sumber ancaman yang sama yaitu komunis, merupakan landasan bagi terbentuknya ASEAN.

Sebagai upaya perbaikan perekonomian masing-masing negara, pada KTT di Bali tahun 1976, diprogramkan pembentukan kerjasama ekonomi melalui komplementaritas industri dan peningkatan penggunaan sumber daya yang tersedia di negara ASEAN, sehingga selain menghemat devisa, juga dapat meningkatkan intra-trade ASEAN. Integrasi ekonomi ASEAN dimulai dengan pembentukan PTA di tahun 1977.

b. Pencapaian Upaya Integrasi Ekonomi

Upaya integrasi ekonomi ASEAN, secara resmi dimulai sejak terbentuknya PTA pada Februari 1977, yang diikuti dengan upaya peningkatan komplementaritas melalui AIP, AIC dan AIJV. Integrasi ekonomi yang lebih mendalam baru terjadi di tahun 1992 saat trend regionalisme berkembang pesat di dunia.

1) *Preferential Trade Arrangement (PTA)*

PTA merupakan jalan tengah yang mempertemukan dua kepentingan yang berbeda di antara negara anggota ASEAN, yaitu negara yang mendukung kebijakan liberalisasi perdagangan di kawasan dan negara yang mendukung proteksi. Negara yang mendukung liberalisasi pasar diantaranya adalah Singapura, Philipina dan Thailand. Sedangkan negara yang masih mendukung kebijakan proteksi adalah Indonesia dan Malaysia.

Universitas Indonesia

Kepentingan yang berbeda antara liberalisasi dan proteksi muncul menjelang KTT I yang akan diadakan di Bali pada tahun 1976. Singapura sebagai negara yang *economic security*-nya bergantung pada perdagangan internasional mulai melakukan upaya penggalangan dukungan dari negara-negara anggota ASEAN untuk memperjuangkan gagasannya dalam membentuk *free trade area*. Mengetahui bahwa Malaysia dan Indonesia cenderung akan menolak gagasannya, Singapura melakukan pendekatan terhadap Thailand dan Philipina.

Meskipun mendapat dukungan dari Thailand dan Philipina akan tetapi upaya Singapura untuk membentuk *free trade area* mengalami kegagalan setelah mendapat ganjalan dari Indonesia dan Malaysia. Indonesia merasa bahwa *free trade area* akan membahayakan pasar domestiknya dari serbuan produk luar ASEAN yang melalui pelabuhan Singapura. Selain itu, industri manufaktur di Indonesia belumah berorientasi ekspor, sehingga terbentuknya AFTA akan membahayakan keberlangsungan industri tersebut.

Meskipun *free trade area* gagal, namun dari hasil KTT I di Bali, kepentingan negara yang mendukung liberalisasi pasar akhirnya diakomodasi. Dalam *Bali Concord* disebutkan bahwa negara ASEAN akan melaksanakan pembentukan PTA sebagai tujuan jangka panjang. Hasil KTT I mengenai PTA ini kemudian ditindaklanjuti pada Februari 1977. Sebagai perlindungan bagi kepentingan negara yang masih menghendaki proteksi, PTA dilengkapi dengan ketentuan mengenai *Rules of Origin* yang dapat mencegah masuknya barang dari luar ASEAN yang memanfaatkan pengurangan tarif melalui PTA.

2) ASEAN Industrial Project (AIP)

AIP yang seharusnya merupakan industri perintis untuk menciptakan komplementaritas di wilayah Asia Tenggara menemui hambatan. Beberapa kegagalan disebabkan oleh benturan antara proyek AIP dengan proyek nasional yang sudah dijalankan oleh negara anggota lainnya. Seperti halnya kasus AIP Singapura yang akan memproduksi mesin diesel, berbenturan dengan industri diesel yang sudah dimiliki oleh Indonesia, Malaysia dan Philipina.

Negara yang memiliki industri mesin diesel di bawah 200 tenaga kuda (PK) mendesak Singapura agar AIP-nya hanya memproduksi mesin diesel di atas 200 tenaga kuda. Merasa bahwa desakan tersebut merugikan Singapura, karena permintaan pasar regional saat itu adalah 200 PK ke bawah, maka Singapura mengubah industri dieselnnya menjadi proyek nasional dan mengubah AIP nya menjadi industri yang memproduksi vaksin hepatitis B⁹. Sebagai bentuk balasan atas hambatan yang dilakukan Indonesia, Singapura hanya memberikan penyertaan saham sebesar 1% dari rencana semula sebesar 10% pada proyek AIP Indonesia¹⁰.

Kegagalan serupa terjadi dengan proyek AIP Thailand yang berencana membangun industri abu soda. Abu soda merupakan bahan penting untuk pembuatan kaca, dan sebagai campuran dalam industri deterjen, kertas, dan bahan kimia yang berbahan dasar sodium. Philipina yang merupakan konsumen bagi 40% abu soda menghendaki proyek tersebut untuk menjadi AIP-nya. Akan tetapi, proyek tersebut jatuh ke tangan Thailand dengan alasan negara tersebut memiliki kandungan *rock salt* (NaCl) yang besar sekitar 2 miliar ton. Berbeda dengan penilaian

⁹ Kurus, B. *Agreeing to Disagree: The Political Reality of ASEAN Economic Cooperation*, Asian Affairs Vol.2, No.1, 1993, pp. 28-41

¹⁰ Majalah Tempo, Op.Cit

awal proyek, ekonom Thailand menyatakan bahwa proyek tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, karena untuk memulai dibutuhkan investasi yang besar dalam hal infrastruktur penghubung antara lokasi penambangan *rock salt* dengan pelabuhan, sehingga akan lebih murah mengimpor dari luar negara ASEAN daripada harus membangun pabrik sendiri. Ketika pemerintah Thailand setuju untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan, masalah lain muncul, yaitu penolakan terhadap lokasi penambangan. Pemindahan lokasi menyebabkan investor berubah pikiran, karena dari hasil studi yang mereka lakukan, proyek yang akan didirikan menjadi tidak menguntungkan. Akhirnya pemerintah Thailand memutuskan untuk tidak melanjutkan proyek ini¹¹.

Melihat pada pengambilan proyek yang dilakukan oleh negara anggota ASEAN, seperti halnya industri pupuk urea di Malaysia dan superphosphate di Philipina, pertimbangan yang dilakukan kedua negara tidaklah cermat dan lebih kepada pemenuhan kepentingan masing-masing negara anggota. Seharusnya, semua negara berkomitmen dengan tujuan AIP yang dimaksudkan untuk meningkatkan komplementaritas produk di antara sesama anggota yang pada akhirnya akan meningkatkan intra-trade. Akan tetapi pemilihan yang dilakukan bukan menciptakan komplementaritas malah menciptakan persaingan di antara sesama anggota ASEAN.

Sebagai contoh, industri pupuk *superphosphate* (PT Petrokimia Gresik) yang sudah dibangun di Indonesia sejak tahun 1964¹² dan selesai pada tahun 1972¹³ jauh sebelum pembentukan AIP, begitu juga PUSRI Palembang yang merupakan pabrik pupuk urea, sudah dibangun sejak tahun 1959. Kesalahan pemilihan proyek kemudian menyebabkan

¹¹ ISEAS (1987), *ASEAN: The Task A Head*, Institute of Southeast Asian Studies, Singapura, hal. 53-54.

¹² <http://www.petrokimia-gresik.com/history.asp> diakses pada 10 Desember 2010.

¹³ <http://www.pusri.co.id/50profil03.php>, diakses pada 10 Desember 2010.

kegagalan AIP di Philipina yang kemudian diganti dengan pabrik tembaga.

3) *ASEAN Industrial Complementary (AIC)* dan *ASEAN Industrial Joint Venture (AIJV)*

AIC dan AIJV merupakan skema kerjasama di antara industri swasta yang memiliki tingkatan berbeda dalam proses produksi. Permasalahan yang berpotensi muncul adalah penentuan bagian (sparepart) yang diproduksi karena akan menentukan *value added* yang diperoleh masing-masing industri yang terlibat. Pihak yang terlibat akan enggan melanjutkan kerjasama ketika dihadapkan pada situasi dimana perubahan tahapan produksi yang ditentukan AIC dan AIJV memiliki *value added* yang lebih rendah dibandingkan tahapan sebelumnya.

4) *ASEAN Free Trade Area*

Walaupun baru dibentuk tahun 1992, konsep *free trade area* sudah diusulkan jauh sebelum tahun 1990an. Singapura sudah menggagas AFTA di tahun 1971, dan Philipina melalui presiden Marcos kembali menggagas dibentuknya *free trade area* di tahun 1982, akan tetapi gagasan tersebut tidak berhasil menghasilkan kesepakatan pada tingkat ASEAN karena keengganan Indonesia untuk menghilangkan kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri.

Keberhasilan pembentukan AFTA merupakan bentuk persepsi yang sama di semua negara anggota ASEAN atas munculnya ancaman baru terhadap perekonomian mereka. Pembentukan blok perdagangan di Eropa, Amerika Utara dan Amerika Selatan meningkatkan kekhawatiran akan dampak negatifnya terhadap perekonomian masing-masing negara. Sehingga semua negara sepakat untuk memperdalam integrasi ekonomi melalui pembentukan AFTA.

Universitas Indonesia

Tujuan utama AFTA untuk meningkatkan intra-trade ternyata sampai dengan tahun 2006 tidak dapat secara signifikan memenuhi harapan semula. *Intra-trade* sebesar 25,2% (tabel 4.1) merupakan persentase yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Uni Eropa yang mencapai 67,2% dan NAFTA 53,9%. Hal ini mencerminkan penambahan *value added* melalui AFTA tidak dilakukan secara signifikan. Rendahnya *intra-trade* juga menggambarkan masih kuatnya ketergantungan negara-negara ASEAN pada negara di luar kawasan.

Intra trade yang rendah juga menggambarkan berbagai kerjasama dan tahapan regionalisme sebelum dibentuknya AFTA. *Preferential Trade Arrangement* (PTA) merupakan bentuk tahapan regionalisme yang bertujuan untuk mengintegrasikan perekonomian di kawasan ASEAN, melalui peningkatan perdagangan. Upaya PTA padahal diperkuat dengan upaya menciptakan komplementaritas industri melalui ASEAN Industrial Project, ASEAN Industrial Complementary dan ASEAN Industrial Joint Venture, akan tetapi semua program ASEAN tidak memberi dampak yang signifikan terhadap integrasi kawasan.

Tabel 4.1 Intra-Regional Export Shares

	1992	1994	1996	1998	2000	2002	2004	2006
NAFTA	43.7%	48.0%	47.6%	51.0%	55.7%	56.7%	55.9%	53.9%
EU	59.5%	56.8%	62.8%	62.5%	61.6%	60.6%	60.7%	67.2%
ASEAN	19.1%	22.7%	22.9%	20.6%	23.9%	23.7%	22.2%	25.2%

Sumber: Laursen F. (2010)¹⁴

4.3 Regionalisme setelah 1997

a. FTA bilateral

Krisis moneter 1997 merupakan awal dari perubahan pola integrasi ekonomi di Asia Tenggara. ASEAN tidak lagi dipergunakan sebagai satu-

¹⁴ Laursen F., *Comparative Regional Integration: Europe and Beyond*, Ashgate, 2010, hal.240.

satunya kendaraan dalam proses regionalisme. Masing-masing negara anggota ASEAN dapat membentuk bilateral FTA dengan negara non-ASEAN atau institusi regional lainnya. Perubahan pola regionalisme tersebut diawali oleh Singapura yang mulai membuat perjanjian FTA bilateral dengan negara lain.

Setelah krisis moneter, Singapura memandang bahwa AFTA telah kehilangan momentum, dan hal tersebut berpengaruh pada kepentingan nasional Singapura dalam aspek perdagangannya. Sebagai tindak lanjutnya, di akhir tahun 1990an, Singapura mulai merintis bilateral *free trade area* dengan negara lain tanpa melalui ASEAN. Negosiasi FTA dengan Selandia Baru dilakukan pada tahun 1999, dan ditandatangani tanggal 2 Januari 2001. Jepang dan Singapura mencapai kesepakatan FTA pada 12 Oktober 2001. Negosiasi FTA dengan Amerika Serikat dirintis Singapura pada Desember 2000. Dengan dukungan koalisi bisnis yang terdiri dari 75 anggota di antaranya Boeing, ExxonMobil, dan UPS akhirnya pada 4 September 2003 FTA tersebut ditandatangani¹⁵.

Melihat bahwa apa yang dilakukan Singapura dapat melemahkan posisi tawar ASEAN dalam melakukan negosiasi dengan negara lain atau kawasan lain, Malaysia menyalahkan tindakan Singapura. Menteri Luar Negeri Malaysia, Syed Hamid Albar mengatakan, "*Singapore may not have done anything wrong in legal terms but morally, the (Singapore) Republic's action showed that it had undermine friendship in ASEAN*"¹⁶. Secara legal memang Singapura tidak melakukan kesalahan, sebab tidak ada larangan yang dikeluarkan ASEAN bagi anggotanya untuk melakukan kesepakatan *free trade area* dengan negara di luar kawasan ASEAN. Akan tetapi, kesepakatan Singapura dengan negara di luar kawasan praktis mengurangi *bargaining power* ASEAN dalam melakukan negosiasi perdagangan, karena Asia Tenggara sudah terbuka melalui Singapura.

¹⁵ Nanto, D.K. *The US-Singapore Free Trade Area*, CRS Report for Congress, 2004.

¹⁶ Daquila, T.C., *The Economies of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand*, Nova Publisher, 2005, hal. 186.

Akan lebih mudah untuk melakukan negosiasi FTA secara bilateral dibandingkan dengan FTA multilateral, karena hanya melibatkan dua kepentingan.

Meskipun pada awalnya Malaysia mengancam bilateral FTA yang dilakukan Singapura, akan tetapi pada tahun 2003 Malaysia juga melakukan negosiasi bilateral FTA dengan negara di luar kawasan ASEAN. Langkah ini dapat dipahami sebagai upaya Malaysia untuk menyeimbangkan *comparative advantage* negaranya terhadap Singapura. Pada sisi produksi, akan menguntungkan bagi suatu investor luar negeri atau *multinational corporation* untuk menempatkan lokasi usahanya pada negara yang memiliki banyak kesepakatan FTA. Hal ini disebabkan sifat dari aktivitas MNC atau investor luar negeri yang memiliki jaringan produksi global, sehingga melibatkan kegiatan ekspor impor barang antara/ setengah jadi. Dengan adanya FTA, maka transaksi tidak akan dikenai bea masuk, selain juga tidak ada hambatan non tarif dan diskriminasi barang.

Sedangkan pada sisi penjualan, negara yang memiliki FTA bilateral dengan negara tujuan ekspor memiliki *comparative advantage* dibandingkan dengan negara yang tidak terikat FTA. Dalam kasus Singapura, pada industri yang menghasilkan produk sejenis dengan tujuan ekspor sama yaitu Amerika Serikat, maka *comparative advantage* ada pada Singapura. Akan terjadi perbedaan harga yang dapat mempengaruhi keputusan konsumen yang diakibatkan selisih bea masuk.

Pengaruh-pengaruh terhadap *comparative advantage* tersebut selanjutnya akan mempengaruhi keputusan investor atau MNC untuk melanjutkan usahanya di negara tanpa FTA yang menguntungkan. Sehingga untuk mempertahankan FDI atau investasi, suatu negara akan mempertimbangkan membentuk FTA bilateral meskipun tidak memberikan keuntungan secara langsung pada negara yang terlibat, selain bertahannya FDI.

Universitas Indonesia

b. ASEAN China *Free Trade Area* (ACFTA)

ACFTA merupakan hasil dari hubungan yang sudah lama terjalin antara ASEAN dan China. Hubungan yang tegang sebelum tahun 1970an, lambat laun mulai mencair. Dimulai dengan pembukaan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Philipina di tahun 1975, yang kemudian diikuti Thailand di tahun 1977. Bantuan China kepada Thailand saat konflik Kamboja, di saat negara ASEAN lainnya enggan membantu secara langsung, semakin membuat hubungan di antara kedua negara semakin membaik. Indonesia yang sebenarnya sudah memiliki hubungan resmi perdagangan sejak tahun 1985, baru membuka hubungan diplomatik dengan China di tahun 1991, yang kemudian diikuti oleh Singapura di tahun yang sama.

Membaiknya hubungan diplomatik secara resmi antara ASEAN 5 dengan China membuka jalan bagi perkembangan hubungan yang lebih erat, di di antaranya, pada tahun 1996, China menjadi mitra dialog ASEAN. Setelah krisis moneter, harapan akan pengaruh positif dari pertumbuhan ekonomi China terhadap perbaikan kondisi perekonomian negara ASEAN pasca krisis moneter semakin meningkat. Setelah disepakati mengenai kerangka kerjasama komprehensif antara China dan ASEAN di tahun 2002, akhirnya pada tahun 2004, ACFTA resmi diimplementasikan.

Kepentingan China di kawasan tidak terlepas dari upayanya memperluas perekonomiannya secara global. Perekonomian China yang *outward looking* sangat tergantung pada hubungannya dengan negara di dunia. Ketergantungan pada pasar konsumsi bagi produknya, maupun ketergantungan pada pasar yang menyediakan input bagi industrinya. Kedua hal tersebut harus dijaga oleh China demi keberlangsungan perekonomiannya. Salah satu terhambat maka, akan

Universitas Indonesia

terjadi perlambatan perekonomian China yang diakibatkan berkurangnya produktivitas.

Strategi yang telah dilakukan China untuk memenuhi kebutuhan pemasaran produknya antara lain melalui keanggotaan di WTO. Masuknya China menjadi anggota WTO akan memperkecil risiko mendapat perlakuan diskriminatif atas barangnya, selain itu, China secara otomatis akan mendapatkan status MFN dari Amerika Serikat. Pasar Amerika Serikat merupakan pasar terbesar dan penting bagi China. sebelum menjadi anggota WTO China harus berjuang untuk memperoleh status MFN yang ditinjau setiap tahun sekali. Pemberian status MFN seringkali dikaitkan dengan masalah di luar perekonomian seperti pelaksanaan HAM China di mata Amerika Serikat, atau pelanggaran hak cipta oleh China.

Selain untuk memenuhi kebutuhan pasar bagi produknya, China harus dapat menjamin ketersediaan *raw material* bagi industrinya serta tercukupinya sumber energi pembangkit listrik. Industri raksasa China sangat haus akan *raw material* dan konsumsi listrik, mengingat China merupakan pemasok skala dunia produk-produk yang intensif menggunakan *raw material* dan energi listrik. China memenuhi kebutuhan sebesar 35% pasar dunia, semen 50% dan aluminium 28%¹⁷. Tidak mengherankan apabila ketersediaan sumber energi dan *raw material* merupakan bagian dari *economic security*. Untuk menjamin ketersediaan input tersebut, China mulai aktif menjalin hubungan dengan negara penghasil sumber energi dan sumber mineral untuk memenuhi kebutuhan listrik, konsumsi bahan bakar dan input untuk proses produksi. ASEAN sebagai kawasan penghasil sumber energi dan *raw material* menjadi penting bagi keamanan *supply* energi China. Kesepakatan pembelian gas alam yang dihasilkan Proyek Tangguh merupakan salah satu dari upaya tersebut.

¹⁷ World Bank, *World Development Report 2010: Development and Climate Change*, World Bank Publication, 2010. Hal. 202.

Sebagai bagian dari strategi China, maka dijalankan dua track untuk mengamankan kedua kepentingan tersebut, yaitu dengan melakukan integrasi multilateral untuk mengamankan pasar bagi produknya dan melakukan integrasi regional untuk mengamankan pasokan input industrinya. China melakukan integrasi multilateral melalui keanggotaannya di WTO, dan melakukan integrasi regional dengan Asia Tenggara melalui pembentukan ACFTA, serta dengan negara-negara penghasil sumber energi di wilayah Asia Tengah, melalui pembentukan SCO (*Shanghai Cooperation Organization*).

ACFTA tidak hanya merupakan wujud dari kepentingan China saja. ASEAN pun memiliki harapan memperoleh keuntungan dari perjanjian tersebut. Pasar China memiliki daya tarik bagi berbagai negara untuk memasukinya, termasuk Amerika Serikat dan Eropa. Melalui ACFTA, ASEAN berharap dapat memasuki pasar China dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi China. Dibandingkan dengan AFTA yang hanya membuka pasar sekitar 583 juta jiwa, terbukanya pasar sebagai implikasi ACFTA lebih besar lagi yaitu sekitar 1,883 milyar jiwa.

Selain pasar, ACFTA juga memberi harapan bagi ASEAN untuk memperluas blok kerjasama perekonomian Asia Tenggara menjadi Asia Timur yang dapat menyaingi Blok Amerika Utara (NAFTA) dan Blok Eropa (Uni Eropa). Bersama dengan Jepang, dan Korea, kekuatan kawasan Asia Timur akan menjadi seimbang, bahkan dapat lebih unggul, dengan berbagai ketersediaan faktor-faktor produksi maupun besarnya pasar regional.

Selain memberikan harapan dan peluang, ACFTA, tentunya juga memberikan ancaman, khususnya bagi industri yang tidak dapat bersaing dengan produk China yang sejenis dengan produknya. Kondisi perekonomian China mampu mendukung industrinya untuk memiliki daya saing di pasar luar negeri. Hampir semua negara merasakan serbuan produk China di pasar domestiknya, tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan data ekspor dan impor di

Universitas Indonesia

tahun 2010, tercatat perdagangan Indonesia terhadap China terus mengalami defisit. Delapan bulan pertama 2010, defisit yang dialami hampir 50% dari nilai ekspor.

Tabel 4.2 Neraca perdagangan Indonesia-China Tahun 2010

	Ekspor	Impor	Surplus (Defisit)
Januari	1,076,671,812	1,442,999,323	(366,327,511)
Pebruari	1,069,138,822	1,416,486,811	(347,347,989)
Maret	1,185,493,358	1,380,843,998	(195,350,640)
April	1,092,077,515	1,554,811,167	(462,733,652)
Mei	1,131,828,132	1,609,787,434	(477,959,302)
Juni	1,111,613,891	2,036,492,482	(924,878,591)
Juli	1,070,202,622	1,982,162,360	(911,959,738)
Agustus	1,299,918,584	2,041,473,021	(741,554,437)
	9,036,944,736.00	13,465,056,596	(4,428,111,860.00)

Sumber: Badan Pusat Statistik

c. *Free Trade Area* setelah ACFTA

Setelah melakukan FTA dengan China yang merupakan negara Asia Timur, ASEAN kemudian membentuk FTA dengan negara di kawasan Asia Timur lainnya seperti Jepang dan Korea, serta dengan negara di kawasan Asia Selatan yaitu India yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang pesat. Australia dan Selandia Baru yang merupakan negara dengan wilayah geografis dekat dengan ASEAN juga turut membuat kesepakatan FTA.

Perluasan FTA ini dapat dipahami sebagai kegagalan ASEAN untuk membentuk Asia Tenggara sebagai kawasan yang dapat terintegrasi secara mandiri. Kegagalan menciptakan *intra-trade* yang sudah diupayakan sejak tahun 1970an, baik dengan PTA, kerjasama industri pada tataran perusahaan

Universitas Indonesia

milik negara, maupun kerjasama antara industri sektor swasta menunjukkan bahwa ketergantungan kepada negara atau kawasan di luar Asia Tenggara tidak memungkinkan bagi ASEAN untuk menciptakan kawasan yang eksklusif. Di samping itu, berbagai insentif yang diberikan ternyata tidak dapat mengimbangi keuntungan yang ditawarkan kawasan atau negara lain.

d. Pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015.

Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah bentuk regionalisme/integrasi ekonomi yang lebih mendalam dari *free trade area*, dimana tidak hanya arus barang dan jasa yang bebas, akan tetapi juga arus investasi dan tenaga kerja terampil. Secara teoritis, keuntungan yang dicapai dari MEA adalah besar, diantaranya, biaya produksi menjadi lebih rendah, karena industri dapat memilih sumber daya yang paling efisien, yang pada gilirannya akan mengurangi harga yang terbentuk, sehingga dapat bersaing dengan produk dari luar wilayah ASEAN.

Akan tetapi, seperti halnya PTA dan berbagai kerjasama industri yang mendukungnya (AIP, AIC dan AIJV), yang secara rasional ekonomi memberikan keuntungan bagi negara yang terlibat, perbedaan kepentingan menjadi faktor penghambat. MEA membutuhkan *political will* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk regionalisme sebelumnya (*free trade area* dan PTA). Harmonisasi pada beberapa kebijakan, di antaranya kebijakan investasi dan kebijakan tenaga kerja, menghadapi kepentingan regional pada kepentingan nasional. Benturan dua kepentingan tersebut seringkali dimenangkan oleh kepentingan nasional, yang kemudian terjadi tindak balasan di antara negara anggota ASEAN.

Lepas dari peran *political will* pemerintah dalam integrasi ekonomi, keberhasilan suatu integrasi ekonomi ditentukan dan tercermin dari aktifitas ekonomi yang terjadi. Sektor swasta yang menjalankan aktifitasnya secara

Universitas Indonesia

alamiah, aktifitasnya akan mengikuti kondisi di lingkungan regional. Apabila bentuk kerjasama dan bentuk penghapusan hambatan yang selama ini diprogramkan berhasil, maka akan tercermin dari aktifitas bisnis yang dilakukan oleh sektor swasta. Aktifitas bisnis akan bergerak lebih besar dalam wilayah regional apabila kondisi regional memang memberikan keuntungan yang lebih dibandingkan kondisi di luar regional. Intra-trade ASEAN, dapat memberikan gambaran kondisi regional bagi sektor swasta. Rendahnya *intra-trade* ASEAN dibandingkan dengan NAFTA dan Uni Eropa menggambarkan bahwa kondisi regional tidak menguntungkan secara umum bagi aktifitas perdagangan, dibandingkan dengan wilayah di luar ASEAN.

Keraguan tersebut bertambah dengan resistensi negara anggota ASEAN atas pengaruh yang ditimbulkan MEA ini. Malaysia yang kepentingan nasionalnya dapat terancam dengan bebasnya aliran masuk tenaga kerja terampil kemungkinan akan melakukan upaya penghambatan, yang dapat memicu tindakan serupa dari negara ASEAN lainnya.

4.4 Pola Regionalisme ASEAN

Melihat pada proses regionalisme ASEAN, tahapan yang dilalui tidaklah jauh dari teori regionalisme. Regionalisme ASEAN dimulai dari *regional awareness*, *regional interstate-cooperation* sampai *state-promoted regional integration*.

Regional awareness terbentuk dalam perang dingin dimana terdapat persepsi yang sama pada mayoritas negara ASEAN terhadap sumber ancaman. Thailand dan Philipina pada tahun 1950an memiliki persepsi yang sama, yaitu komunis merupakan sumber ancaman terhadap keberlangsungan pemerintahan sehingga terdorong untuk ikut serta dalam pembentukan SEATO yang diprakarsai Amerika Serikat. Malaysia dan Singapura, juga memiliki persepsi yang sama mengenai sumber ancaman. Berdasarkan persepsi tersebut, tidak

Universitas Indonesia

lama setelah kemerdekaannya, Malaysia bersama dengan Thailand dan Philipina kemudian memprakarsai berdirinya ASA di tahun 1960an.

Persepsi yang berbeda ditunjukkan oleh Indonesia. Pada saat terbentuknya SEATO, Indonesia menolak untuk ikut serta karena memandang bahwa kerjasama keamanan kolektif tidaklah menyelesaikan masalah sesungguhnya. Pandangan tersebut tidak terlepas dari pengalamannya berhubungan dengan negara Barat saat perjuangan diplomasi untuk memperoleh pengakuan kemerdekaan dari Internasional. Keamanan regional ditentukan oleh kekuatan masing-masing negara dalam menjamin keamanan dalam negerinya sendiri. Sebagai wujud dari sikapnya, Indonesia memprakarsai berdirinya Gerakan Non-Blok di tahun 1955.

Perbedaan sikap juga ditunjukkan pada saat pembentukan ASA di tahun 1960an. Meskipun tujuan pendirian ASA ditekankan pada ekonomi, akan tetapi tidak dapat menghilangkan persepsi Indonesia akan sikap anti-komunis yang terdapat dalam ASA. Pada saat itu, bahkan Indonesia memiliki hubungan yang dekat dengan Uni Sovyet dan China.

Adanya persepsi yang sama di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia, Thailand, Malaysia, Philipina dan Singapura, baru terjadi diawal 1966 saat di Indonesia terjadi pergantian pemerintahan. Persepsi yang sama terhadap sumber ancaman diikuti dengan kepentingan yang sama, yaitu prioritas pembangunan dan penguatan ekonomi. Sehingga dengan motivasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, melalui stabilitas keamanan regional agar semua negara dapat memfokuskan sumber dayanya untuk kegiatan perekonomian, maka dibentuklah ASEAN di tahun 1967. Berdirinya ASEAN menandai perubahan pola regionalisme dari *regional awareness* menjadi *regional interstate-cooperation*.

Universitas Indonesia

Kerjasama antar negara di kawasan Asia Tenggara mulai intens dilakukan sejak dibentuknya ASEAN. Lingkup kerjasama yang diupayakan adalah ekonomi, sosial dan budaya. Pada dekade awal pembentukan ASEAN pola regionalisme belum mengarah pada integrasi regional. Gagasan integrasi regional melalui pembentukan *free trade area* baru muncul di tahun 1971 oleh Singapura. Akan tetapi kepentingan Indonesia dan Malaysia untuk melindungi industri dalam negerinya masih kuat. Sehingga gagasan Singapura yang didukung oleh Philipina dan Thailand dimentahkan pada KTT I di Bali.

Perbedaan kepentingan masing-masing negara ASEAN menemui titik temu dengan dibentuknya PTA di tahun 1977. PTA merupakan bentuk awal integrasi ekonomi, akan tetapi tidak sedalam *free trade area*. PTA menghilangkan batasan tarif secara selektif berdasarkan negara dan komoditi. Sedangkan *free trade area* menghilangkan batasan tarif berdasarkan negara.

Masih kuatnya proteksionisme di beberapa negara ASEAN menyebabkan tidak efektifnya PTA. Tujuan untuk meningkatkan *intra-ASEAN trade* sebagai bentuk integrasi ekonomi tidak tercapai secara maksimal. Komoditi yang masuk dalam PTA adalah komoditi yang jarang menjadi transaksi di antara negara ASEAN.

Kegagalan PTA diikuti dengan kegagalan proyek kerjasama industri. AIP sebagai bentuk kerjasama industri yang bertujuan untuk meningkatkan komplementarisme di antara negara ASEAN tidak berhasil. Begitu juga dengan proyek kerjasama ASEAN yang melibatkan sektor swasta (AIC), menemui kegagalan disebabkan oleh adanya keengganan perusahaan yang terlibat mendapatkan *value added* yang lebih sedikit. Selain egoisme yang ditunjukkan masing-masing negara ASEAN untuk memprioritas kepentingan nasionalnya, ketergantungan pada negara non-ASEAN dalam pelaksanaan proyek tersebut masih besar. Proyek AIP Malaysia dan Indonesia sebagian besar didanai oleh

Universitas Indonesia

Jepang. Tahapan pertama integrasi regional melalui PTA tidak dapat mencapai tujuannya.

Integrasi ekonomi tahap kedua terjadi pada awal tahun 1990an, saat dimana perang dingin usai. Berakhirnya perang dingin mendorong maraknya regionalisme di berbagai kawasan di dunia, Amerika Latin, Eropa, dan Amerika Utara. Hal tersebut kemudian menimbulkan kesamaan persepsi di antara negara ASEAN mengenai pentingnya penguatan integrasi regional menghadapi trend pembentukan blok perdagangan. Semua negara sepakat membentuk *free trade area* (AFTA) sebagai upaya meningkatkan kekuatan perekonomian regional tanpa adanya resistensi seperti yang terjadi pada integrasi ekonomi tahap pertama. Bahkan rencana implementasi yang semula direncanakan berlangsung selama lima belas tahun, dipercepat menjadi sepuluh tahun. Akan tetapi, integrasi ekonomi tahap kedua sebagai respon bersama terhadap perubahan lingkungan internasional terhambat dengan adanya krisis moneter di tahun 1997, yang menimpa hampir semua negara ASEAN.

Perkembangan integrasi ekonomi melalui liberalisasi kembali melambat dengan adanya krisis moneter. Singapura yang apatis dengan perkembangan liberalisasi perdagangan di kawasan akhirnya mengubah kebijakan perdagangannya. Terdorong oleh kepentingan nasionalnya untuk meningkatkan perdagangan internasional, berbagai kesepakatan bilateral *free trade area* dibentuk. Meskipun sempat menimbulkan kekecewaan dari negara anggota ASEAN, langkah Singapura ini akhirnya diikuti oleh negara anggota ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand.

Langkah Singapura dan negara anggota ASEAN lainnya membentuk kesepakatan *free trade area* dengan negara di luar kawasan ASEAN, kemudian merubah pola regionalisme ASEAN dari *inward looking* menjadi *outward looking*. Setelah menjalin kesepakatan *free trade area* dengan China, ASEAN

melanjutkan kesepakatan lainnya dengan berbagai negara di kawasan lainnya seperti Jepang, Korea, India, Australia dan Selandia Baru.

Dari pola regionalisme ASEAN yang sudah diuraikan, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menentukan arah regionalisme ASEAN, di antaranya adalah:

1) Kepentingan nasional

Resistensi negara anggota ASEAN terhadap proses regionalisme seringkali disebabkan adanya benturan kepentingan antara kepentingan nasional dan kepentingan regional. Negara dalam hal ini dihadapkan pada kekuatan politik dalam negeri untuk menentukan keterlibatannya dalam proses regionalisme ASEAN. Adakalanya secara politik sebenarnya negara anggota ASEAN memiliki kekuatan untuk terlibat dalam regionalisme, akan tetapi karena keengganan mengorbankan prioritas kepentingan nasional demi kepentingan regional suatu negara tidak secara serius terlibat dalam regionalisme. Dengan demikian, ketika terjadi benturan antara kepentingan nasional dengan kepentingan regional, maka kekuatan politik dan kemauan politik masing-masing negara menjadi kunci utama.

Dalam contoh di atas, kegagalan proyek mesin diesel AIP Singapura disebabkan keengganan dari beberapa negara untuk mengorbankan prioritas kepentingan nasionalnya, meskipun secara politik pimpinan negara mampu untuk terlibat dalam proyek tersebut. Pemerintah Indonesia, saat itu memiliki kekuatan politik untuk menentukan kebijakan terhadap proyek AIP, akan tetapi enggan mengorbankan kepentingannya. Hal yang berbeda terjadi pada Thailand, dimana kemauan (politik) untuk melaksanakan proyek abu soda AIP, terbentur dengan kekuatan politik dalam negeri yang menolak pelaksanaan proyek tersebut.

Universitas Indonesia

2) Pengaruh negara di luar kawasan

Regionalisme Asia Tenggara selama ini dipengaruhi oleh perekonomian negara di luar kawasan. Pergerakan perdagangan yang tidak dapat diarahkan ke dalam lingkup regional, menunjukkan masih kuatnya pengaruh tersebut serta menunjukkan ketergantungan perekonomian kawasan terhadap negara di luar kawasan. Negara tujuan ekspor ASEAN yang dominan adalah Amerika Serikat, China, Jepang dan Uni Eropa, sehingga regionalisme ke depan akan dipengaruhi oleh hubungan ASEAN dengan keempat negara ini.

3) Pengaruh *non-state actor*

Selain kepentingan masing-masing negara, seiring perkembangan regionalisme, aktor yang terlibat dan menentukan arah regionalisme tidak lagi merupakan dominasi negara. *Non-state actor* seperti perusahaan multinasional, dan masyarakat sipil, turut menentukan arah dan bentuk regionalisme. Penolakan masyarakat sipil terhadap regionalisme akan mempengaruhi keputusan pemerintah, seperti dalam kasus AIP Thailand. Dalam kasus FTA bilateral antara Singapura dan Amerika Serikat, keputusan kongres dipengaruhi oleh koalisi MNC yang beroperasi dan memiliki kepentingan di Singapura, di antaranya anggota di antaranya Boeing, ExxonMobil, dan UPS.

4.5 Identifikasi *Opportunity* dan *Threat* dari Regionalisme ASEAN

Untuk melakukan identifikasi pengaruh regionalisme ASEAN, penulis menggunakan definisi *economic security* yang sudah diuraikan di bab 2. *Economic security* didefinisikan sebagai “kombinasi dari kondisi...menjamin kuantitas maksimum reproduksi sumber daya”

Dari definisi *economic security* tersebut, penulis mengidentifikasi adanya *opportunity* pada regionalisme, apabila:

- regionalisme tersebut meningkatkan kemungkinan penggunaan kuantitas maksimum reproduksi sumber daya perekonomian;
- dan sebaliknya, mengidentifikasi regionalisme sebagai ancaman apabila:
- regionalisme mengakibatkan kemungkinan penurunan kuantitas maksimum reproduksi sumber daya perekonomian.

Selain itu, mengetahui peluang atau ancaman Indonesia, dapat diperoleh melalui identifikasi terhadap kelemahan atau kekuatan negara lain yang terlibat dalam regionalisme. Kelemahan negara lain, seperti halnya kekuatannya, dapat menjadi peluang bagi Indonesia.

Peluang dan ancaman yang dapat diidentifikasi dari proses regionalisme yang terjadi di ASEAN adalah:

4.5.1 Peluang/ Opportunity

a) Opportunity dari AFTA.

Seperti disebutkan dalam awal-awal regionalisme, bahwa alasan Singapura untuk bergabung dengan Malaysia adalah disebabkan oleh kelangkaan sumber daya dan terbatasnya wilayah geografis. Kelangkaan sumber daya geografis, dapat diatasi melalui liberalisasi perdagangan dan pengembangan industri yang memiliki *value added* tertinggi. Berkembangnya industri yang memiliki *value added* tentunya meningkatkan upah yang berpengaruh juga terhadap besaran upah industri lainnya, termasuk industri yang menggunakan tenaga kerja secara intensif. Peningkatan upah dalam industri yang padat tenaga kerja menyebabkan penurunan *comparative advantage*, yang mempengaruhi keberlangsungan industri tersebut. Hal tersebut semakin diperparah dengan peningkatan biaya property yang tinggi oleh karena keterbatasan geografis tidak dapat mendukung pengembangan

Universitas Indonesia

industri. Kedua permasalahan yang dihadapi Singapura tersebut menjadi peluang bagi Indonesia yang memiliki wilayah geografis yang luas dan tenaga kerja yang melimpah.

Dengan adanya AFTA tentunya membuat beban tarif masuk atas lalu lintas bahan baku atau barang jadi dari dan ke semua negara di ASEAN menjadi tidak ada. Sehingga pilihan untuk relokasi ke negara lain yang merupakan anggota ASEAN dapat menjadi pilihan yang menguntungkan. Indonesia yang memiliki wilayah kepulauan terdekat dengan Singapura memiliki peluang yang lebih besar untuk dijadikan sebagai tujuan relokasi, dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya.

b) Peluang dari ACFTA

- Pertumbuhan industri yang pesat di China meningkatkan kebutuhan akan *raw material* dan sumber energi.
- Dengan ACFTA, pasar yang terbuka bagi Indonesia adalah peluang besar khususnya bagi industri yang *outward looking*. Dibandingkan dengan AFTA, ACFTA membuka peluang pasar sebesar 463% dibandingkan AFTA yang hanya sebesar 40%.
- Pertumbuhan ekonomi China dan peningkatan hubungan dengan Asia Tenggara atau ASEAN melalui ACFTA, akan membuat Amerika Serikat dan Jepang bereaksi. Reaksi tersebut merupakan peluang untuk menarik manfaat dari persaingan antara negara perekonomian besar tersebut.

c) MEA tahun 2015

MEA menciptakan mobilitas barang dan jasa, tenaga kerja, dan mobilitas modal. Sehingga akan menciptakan alternatif bagi *entrepreneur* dalam memperoleh sumber finansial dan lokasi dengan infrastruktur yang mendukung.

4.5.2 Ancaman/ Threat

Mengidentifikasi ancaman memiliki cara yang sama seperti dalam identifikasi peluang. Selain secara langsung melihat efek yang ditimbulkan regionalisme, dapat juga melalui identifikasi terhadap kelemahan atau kekuatan dari negara-negara yang terlibat dalam regionalisme.

a) Ancaman Bilateral FTA

- Meningkatnya FTA bilateral yang dilakukan oleh negara ASEAN menciptakan potensi ancaman bagi Indonesia. Bagi penjual luar negeri yang produknya dibutuhkan oleh perusahaan Indonesia, akan lebih menguntungkan melakukan penjualan barang melalui Singapura yang terikat FTA daripada menjual langsung ke Indonesia yang tidak terikat FTA. Perbedaan tarif bea masuk yang mempengaruhi keuntungan akan menyebabkan maraknya penggunaan Singapura sebagai *trojan horse*. Melalui mekanisme keagenan, pembelian berbagai produk yang bernilai tinggi, misalnya barang modal, harus melalui Singapura. Tarif 0% dari negara asal produk dan tarif 0% berdasarkan fasilitas AFTA akan menguntungkan kedua belah pihak (Singapura dan negara asal produk). Bagi Indonesia, hal tersebut merugikan dalam dua hal, pertama adalah bea masuk yang tidak bisa dipungut, dan

Universitas Indonesia

kedua adalah penambahan biaya keagenan pada produk akan menyebabkan nilai barang menjadi lebih tinggi dari sebenarnya.

- Bilateral FTA akan menjadi ancaman yang berpotensi menimbulkan *surprise* terhadap perekonomian Indonesia, khususnya apabila mempengaruhi investasi asing dan investasi domestik. Sifatnya yang bilateral akan menyebabkan sulit dideteksi, jika proses kesepakatan yang dilalui tidak dilakukan secara terbuka. Terhadap investasi asing, bilateral FTA berpengaruh pada dua sisi, pertama adalah menyebabkan investasi di negara ASEAN lainnya (yang membuat bilateral FTA) lebih menguntungkan daripada di Indonesia, dan kedua adalah menyebabkan investasi di Indonesia merugikan.

Menyebabkan investasi di negara lain lebih menguntungkan apabila FTA bilateral yang dilakukan, menyebabkan penurunan biaya dalam proses produksi dan atau menaikkan kemampuan bersaing produknya. Perubahan yang disebabkan oleh FTA bilateral tersebut dapat mempengaruhi keputusan investor untuk melanjutkan operasinya atau tidak di Indonesia, meskipun sebenarnya FTA bilateral tidak menyebabkan kerugian terhadap investasinya.

Pengaruh yang kedua dimana bilateral FTA dapat menyebabkan kerugian bagi investor di Indonesia apabila, di negara (ASEAN) yang melakukan bilateral FTA beroperasi perusahaan pesaing investor. Perbedaan biaya produksi dan komparatif harga jual akan menyebabkan kerugian dalam bersaing, sehingga pilihan bagi investor di Indonesia adalah beroperasi di negara (ASEAN) yang melakukan bilateral FTA untuk menyeimbangkan posisi terhadap pesaingnya atau

Universitas Indonesia

mencari negara lain yang memiliki kondisi lebih menguntungkan dibandingkan Indonesia atau negara (ASEAN) yang melakukan bilateral FTA.

Perpindahan investasi (domestik maupun FDI) akan mengancam *economic security* melalui penurunan aktifitas reproduksi sumber daya ekonomi Indonesia. Sumber daya ekonomi yang terancam tidak dapat dikelola dengan maksimum akibat ketiadaan investasi adalah tenaga kerja dan *raw material*.

b) Ancaman ACFTA

- Ancaman ACFTA adalah semakin derasnya produk China yang masuk ke Indonesia. Dari tabel 4.1 sudah terlihat bahwa neraca perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan negatif. Ancaman menjadi nyata apabila produk yang masuk adalah produk yang sejenis dengan yang diproduksi di Indonesia. Industri infant yang hanya tergantung dari permintaan pasar domestik akan terancam tutup. Selain terancam oleh deindustrialisasi, neraca perdagangan yang terus menerus defisit akan menggerus cadangan devisa negara. Hal tersebut membahayakan stabilitas keuangan nasional dan *economic security* Indonesia.

4.6 Pembahasan Faktor Penentu Daya Saing Indonesia

4.6.1 *Endowed resource*

Dalam model “ser-M”, *endowed resource* merupakan sumber daya yang dipergunakan oleh subject dalam mekanisme pembentukan daya saing. Kuantitas dan kualitas memberi dampak positif bagi mekanisme tersebut.

Universitas Indonesia

4.6.2 *Infrastruktur*

Infrastruktur menempati kedudukan sebagai environment dalam mekanisme pembentukan daya saing. Berfungsinya suatu subject (pekerja, *entrepreneur*, birokrasi) dalam mengelola sumber daya, dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas infrastruktur yang tersedia dalam mekanisme. Dengan demikian, selain sebagai faktor yang menentukan daya saing, infrastruktur juga merupakan faktor penting untuk menentukan lokasi aktivitas perekonomian bagi pelaku ekonomi, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Berdasarkan kondisi infrastruktur yang diuraikan dalam bab 3, terlihat bahwa dibandingkan dengan ASEAN 5, infrastruktur Indonesia masih sangat jauh kualitasnya. Rendahnya kualitas infrastruktur jalan, rel kereta api, pelabuhan udara dan laut menyulitkan *entrepreneur* sebagai *subject* (dalam mekanisme pembentukan daya saing) untuk menjangkau sumber-sumber ekonomi dan menghubungkannya dengan pasar.

4.6.3 *Domestic Demand*

Seperti halnya infrastuktur, domestik demand berperan sebagai pembentuk environment dalam mekanisme pembentukan daya saing. Sebagai penyerap hasil produksi, maka semakin besar ukuran domestik demand memberi dampak yang positif terhadap mekanisme tersebut. Berdasarkan kondisi yang diuraikan dalam bab 3, Indonesia memiliki *domestic demand* yang besar sehingga memiliki potensi untuk meningkatkan kapasitas ekonomi industri domestik.

4.6.4 *Workers*

Pekerja sebagai faktor produksi yang berperan dalam membentuk output, dapat berkedudukan sebagai *subject* maupun *resource* dalam mekanisme pembentukan daya saing. Dalam kedudukannya sebagai *subject*, pekerja menentukan efisiensi pemakaian sumberdaya dalam

Universitas Indonesia

kondisi lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan yang berpengaruh terhadap mekanisme ini dapat berupa upah maupun fasilitas pendukung kualitas hidup pekerja. Produktivitas tenaga kerja Indonesia yang rendah menunjukkan kelemahan dalam dua hal, pertama adalah rendahnya output disebabkan oleh kualitas ketrampilan tenaga kerja Indonesia, dan yang kedua adalah rendahnya output akan mempengaruhi pengembangan kualitas tenaga kerja.

4.6.5 *Bureaucrats*

Dalam mekanisme pembentukan daya saing, birokrat dapat berposisi sebagai *subject* maupun *environment*. Sebagai *environment*, birokrat mempengaruhi bagaimana pengelolaan sumber daya yang dilakukan oleh *subject*. Birokrat dapat menjadi katalisator maupun menjadi *barrier* bagi pengelolaan sumber daya. Masih tingginya tingkat korupsi dalam lingkungan birokrasi menunjukkan masih rendahnya efisiensi birokrasi sebagai *subject* dalam perekonomian dan sebagai *environment* yang mendukung aktifitas perekonomian.

4.6.6 *Entrepreneurs*

Entrepreneur menempati kedudukan sebagai *subject* dalam mekanisme pembentukan daya saing. Lingkungan yang memberikan pengaruh dapat berupa kemudahan finansial, regulasi yang mendukung, birokrasi yang efisien, serta *law enforcement* yang melindungi hasil aktifitasnya.

Berdasarkan kondisi yang digambarkan dalam bab 3, terlihat bahwa hambatan yang dialami *entrepreneur* Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara anggota ASEAN lainnya dalam hal infrastruktur, inefisiensi birokrasi, perlindungan hak kekayaan intelektual dan finansial.

4.7 Identifikasi *Strength* dan *Weakness*

Dari kondisi berbagai faktor penentu daya saing yang telah diuraikan untuk menunjukkan tingkat produktivitas relatif terhadap negara anggota ASEAN lainnya, berikut adalah kekuatan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi:

4.7.1 Kekuatan

Dari uraian mengenai kondisi faktor penentu daya saing Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa kekuatan, yaitu:

- Melimpahnya *endowed resource* berupa energi dan *raw material*

Sumber daya alam merupakan *input* penting dalam proses produksi yang menunjang keberlangsungan industri. Indonesia memiliki variasi sumber daya mineral yang penting sebagai *raw material* industri. Selain variasinya, kuantitasnya juga lebih besar dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Faktor *endowment* yang dimiliki Indonesia dan memiliki nilai lebih dibanding negara ASEAN adalah wilayah yang merupakan faktor produksi yang tidak dapat diciptakan. Meskipun beberapa negara dapat menciptakan wilayah baru dengan perluasan daratan, akan tetapi hal tersebut tidaklah memiliki nilai ekonomis dibandingkan dengan negara yang sudah dianugerahi wilayah yang luas.

- Pasar domestik yang besar

Jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu sekitar 231 juta merupakan potensi pasar yang besar. Dalam AFTA, secara kuantitas, pasar domestik Indonesia merupakan 40% dari total pasar yang tercipta. Pasar domestik yang besar ini memberikan

Universitas Indonesia

keuntungan bagi industri domestik yang *inward looking*. Seperti halnya pasar domestik China yang meupakan peluang bagi industri Indonesia yang *outward looking*, begitu juga dengan pasar domestik Indonesia.

Sehingga persaingan yang terjadi di pasar domestik adalah persaingan antara industri domestik *inward looking* dengan industri negara lain yang *outward looking*. Dalam *free trade area*, meskipun tarif bea masuk sudah nol, atau mendekati nol, akan tetapi industri *inward looking* tetap diuntungkan dalam hal biaya transportasi maupun asuransi.

4.7.2 Weakness

Dari uraian mengenai kondisi faktor penentu daya saing, dapat diidentifikasi beberapa kelemahan, yaitu:

– Kondisi Infrastruktur yang buruk

Infrastruktur merupakan hal yang utama dalam menunjang perekonomian. Semakin kompleks aktivitas ekonomi, maka infrastruktur yang dibutuhkan-pun semakin meningkat. Tidak hanya kuantitas, kualitas-pun menjadi hal yang utama. Infrastruktur tidak hanya berupa jalan, atau transportasi, akan tetapi juga komunikasi, maupun informasi.

Kondisi infrastruktur Indonesia masih lemah, yang mengakibatkan hambatan dalam aktivitas perekonomian dan keengganan investor untuk beroperasi di Indonesia. Infrastruktur yang lemah seperti listrik membuat biaya produksi meningkat dan terbatasnya kapasitas produksi. Kemacetan yang diakibatkan infrastruktur transportasi menyebabkan hambatan waktu dan biaya.

Wilayah geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan menjadi salah satu penyebab terhambatnya pembangunan infrastruktur. Tidak ekonomisnya infrastruktur yang dibangun dalam geografis yang terpecah-pecah menyebabkan tingkat pengembalian modal yang lama, sehingga tidak menghasilkan efek domino, perluasan pembangunan infrastruktur.

– Inefisiensi birokrasi

Korupsi yang terjadi di Indonesia, dan belum mampu memperbaiki persepsi masyarakat dunia, merupakan salah satu refleksi dari ketidakefisienan birokrasi. Korupsi memberikan pengaruh yang negatif tidak saja kepada faktor produktivitas dalam negeri akan tetapi juga berpengaruh pada masuknya faktor produktivitas dari luar negeri. Dalam mekanisme “SER-M” (Subject, Environment and Resource-Mechanism), pada level dimana birokrasi berperan sebagai sebagai subjek, korupsi melemahkan efisiensi penggunaan resource dalam berbagai cara. *Resource* berupa modal akan tergerus untuk biaya “siluman”, di samping *resource* waktu yang terbuang percuma untuk melewati hambatan yang diciptakan birokrasi tersebut.

Pada tingkatan dimana birokrasi berperan sebagai “*environment*”, korupsi menimbulkan suasana yang tidak nyaman bagi investor luar negeri, memberikan jalan panjang yang mengurangi efisiensi sumber daya, serta menghambat terbentuknya *entrepreneur*, faktor produksi yang berpotensi dalam meningkatkan teknologi dan inovasi. Lingkungan yang tercipta tidak dapat menghasilkan kekuatan daya saing akan tetapi justru melemahkan daya saing nasional. Dalam perannya sebagai “*resource*” dalam sistem pembentukan daya saing nasional, birokrasi yang korup

Universitas Indonesia

merupakan input “*garbage*” yang akan menghasilkan output berupa “*garbage*” juga. Sehingga jelas bahwa, korupsi masih merupakan kelemahan yang menghambat daya saing nasional, memberikan pengaruh negatif pada perekonomian nasional.

– Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah

Rendahnya produktivitas pekerja di Indonesia dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya masih memperlihatkan banyaknya permasalahan yang ada dalam aktivitas perekonomian di Indonesia. Rendahnya produktivitas memberikan efek negatif pada perekonomian, di antaranya permasalahan kualitas pekerja dan kualitas hidup pekerja.

– Hambatan yang tinggi pada *entrepreneurs*

Kondisi perekonomian Indonesia, dimana selain pembiayaan perbankan yang tinggi, permasalahan birokrasi yang tidak efisien menjadi penghambat pertumbuhan *entrepreneur* yang merupakan perintis dalam bidang bisnis dan industri. Di samping itu, lemahnya penegakan hukum untuk menjamin hak kekayaan intelektual, akan mengurangi minat dan perkembangan penemuan yang menjurus pada peningkatan teknologi yang memberikan efek positif bagi perekonomian nasional.

4.8 Strategi

Berdasarkan hasil identifikasi peluang dan ancaman yang ada dalam regionalisme ASEAN serta kondisi faktor-faktor penentu daya saing Indonesia, maka dapat disusun matriks TOWS sebagai berikut:

Tabel 4.3 Matriks TOWS

Faktor Internal Faktor Eksternal	Internal Strength (S)	Internal Weakness (W)
Eksternal Opportunities (O) 1. Peningkatan biaya operasi untuk industri yang padat karya dan mahal lokasi di Singapura 2. Peningkatan kebutuhan <i>raw material</i> dan energi China 3. Pengaruh China di kawasan 4. Pasar China yang besar 5. Pasar tenaga kerja MEA	S-O Strategy: Maxi-Maxi $S_{1,2}O_2$ $S_{1,2}O_{1,2}$	W-O Strategy: Mini-Maxi $W_{1,3}O_4$ W_4O_2 $W_{1,2}O_1$
Eksternal Threats (T) 1. Bilateral FTA sebagai Trojan horse 2. Pengaruh negatif bilateral FTA terhadap investasi dalam negeri 3. Serbuan produk China ke dalam pasar domestik	S-T Strategy: Maxi-Mini $S_{1,2}T_3$	W-T Strategy: Mini-Mini <i>Defensive Strategy</i>

Universitas Indonesia

Berdasarkan matriks tersebut, pilihan strategi yang tersedia adalah:

4.8.1 Strategi SO (maxi-maxi)

Strategi maxi-maxi ini disusun dengan tujuan memaksimalkan pemanfaatan kekuatan internal negara untuk memperoleh keuntungan maksimal dari peluang yang terdapat dalam lingkungan eksternal.

1. Strategi S_1O_2

Strength (S_1) : ketersediaan *raw material* dan sumber energi.

Opportunity (O_2) : peningkatan kebutuhan industri China akan *raw material* dan *supply* sumber energi pembangkit listrik.

Langkah pertama: menarik industri China yang memiliki orientasi pada lokasi sumber input, bisa berbentuk FDI atau melakukan aliansi stratejik dengan perusahaan di Indonesia.

Langkah kedua: mendapatkan teknologi untuk eksplorasi yang tidak diperoleh dari perusahaan Barat.

Langkah ketiga: memainkan persaingan di antara negara dalam mengamankan *energy security*-nya untuk mendapatkan benefit yang lebih di antaranya transfer teknologi dan kesediaan membangun infrastruktur.

Strategi S_1O_2 semakin diperkuat apabila dikombinasikan dengan *chance event* yang terjadi dan menguntungkan posisi Indonesia. *Chance event* tersebut misalnya terjadinya embargo dari penyuplai biji besi China. Sehingga posisi tawar Indonesia akan semakin meningkat, dan akan memperkuat negosiasi untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perjanjian.

2. Strategi $S_{1,2}O_{1,2}$

Strength ($S_{1,2}$) : ketersediaan *raw material* dan pasar domestik yang besar.

Opportunity ($O_{1,2}$) : peningkatan biaya produksi untuk industri yang *labor intensive* di Singapura dan peningkatan kebutuhan *raw material* di China.

Langkah: Menarik industri *outward looking* China yang membutuhkan lokasi terdekat dengan *raw material*.

4.8.2 Strategi WO (mini-maxi)

Strategi ini disusun dengan tujuan untuk meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan perolehan keuntungan dari peluang yang disediakan lingkungan eksternal. Meminimalkan kelemahan dapat dilakukan dengan mengembangkan area yang lemah atau mempergunakan kekuatan entitas luar yang memiliki kelebihan di dalam area tersebut.

1. Strategi $W_{1,3}O_4$

Weakness (W_1 dan W_3) : kualitas infrastruktur dan produktivitas tenaga kerja rendah.

Opportunity (O_4) : Pasar domestik China yang besar.

Langkah pertama: bersama-sama dengan industri *outward looking* di Malaysia atau Singapura yang bertujuan memasukkan produk ke China untuk membentuk rantai produksi yang paling efisien melalui pemanfaatan IMS-GT (Indonesia Malaysia Singapura- Growth Triangle), sehingga produk yang masuk ke China dapat bersaing dengan produk domestik atau produk sejenis dari negara lain.

Pembentukan cluster industri juga dapat mengatasi biaya pembangunan infrastruktur yang terkendala kondisi geografis Indonesia.

2. Strategi W_4O_2

Weakness (W_4): *barrier* yang tinggi pada *entrepreneur*

Opportunity (O_2): peningkatan kebutuhan *raw material* dan sumber energi di China.

Langkah: aliran modal dan investasi yang lancar dengan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN dapat dimanfaatkan oleh *entrepreneur* untuk mengatasi hambatan finansial di Indonesia. Melalui pendanaan yang mudah dan ringan, *entrepreneur* dapat berkembang untuk memperoleh opportunity dari proses regionalisme.

3. Strategi $W_{1,2}O_1$

Weakness ($W_{1,2}$): infrastruktur dan birokrasi yang buruk

Opportunity (O_1): peningkatan kebutuhan Singapura akan lokasi dan tenaga kerja untuk industrinya

Langkah: Kebutuhan Singapura akan pemanfaatan lokasi dan tenaga kerja di Indonesia sebagai tempat beroperasi industrinya, dapat dijadikan sebagai *bargaining power* untuk mengurangi kelemahan Indonesia, yaitu melalui pengembangan infrastruktur wilayah, dan tercapainya perjanjian ekstradisi pelaku kasus korupsi.

4.8.3 Strategi ST (maxi-mini)

Strategi maksimi-mini dibuat untuk meminimalkan atau menghindari ancaman eksternal dengan menggunakan kekuatan internal yang dimiliki.

1. Strategi $S_{1,2}T_3$

Ancaman (T_3): Serbuan produk dari China mengancam keberlangsungan sektor-sektor industri domestik yang sejenis.

Kekuatan ($S_{1,2}$): Tersedianya *raw material*, pasar domestik yang besar.

Langkah pertama: menciptakan kerja sama antara industri domestik dengan industri China (misal: firm A) yang merupakan pesaing dari firm B (industri yang produknya menyerbu pasar Indonesia).

Keuntungan komparatif yang diperoleh firm A dibandingkan firm B: berkurangnya biaya *raw material*, biaya transportasi produk ke pasar domestik Indonesia dan lebih cepat merespon perubahan permintaan domestik.

Keuntungan bagi industri domestik: terhindar dari ancaman kebangkrutan, meningkatkan kapasitas produksi, *share* keuntungan, dan memungkinkan firm B mengalihkan tujuan ekspornya.

Langkah kedua: menciptakan kerjasama dengan firm B untuk memperluas pasar di negara mitra FTA Indonesia. Keuntungan yang diperoleh firm B adalah kedekatannya dengan input produksi dan pasar outputnya. Sedangkan bagi industri domestik Indonesia, keuntungan yang diperoleh adalah selain terhindar dari kebangkrutan, juga memperoleh keuntungan lain berupa peningkatan kapasitas produksi serta adanya peluang menjadi industri *outward looking*.

4.8.4 Strategi WT (mini-mini)

Strategi WT hanya dapat berfokus pada upaya penghindaran ancaman, atau upaya meminimalisasi ancaman. Untuk menghindari ancaman dari serbuan produk dari luar negeri ke pasar domestik, beberapa hal yang dapat dilakukan adalah:

Universitas Indonesia

1. Strategi meminimalkan atau menghindari T_1
Strategi untuk meminimalkan ancaman penggunaan FTA bilateral sebagai *trojan horse* dapat dilakukan dengan cara individual maupun bersama dengan negara lain. Cara individu dapat ditempuh melalui pengawasan dokumentasi *Rules of Origin* pada negara yang dicurigai melakukan praktik tersebut. *Surveillance* terhadap negara *suspect* tidak hanya dilakukan di dalam negeri akan tetapi juga dilakukan di negara *trojan horse* atau negara asal produk tersebut.
2. Strategi meminimalkan atau menghindari T_2
 T_2 adalah ancaman dari bilateral FTA yang dilakukan negara anggota ASEAN dan mempengaruhi investasi asing maupun domestik di Indonesia. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kondisi ini minimal adalah dengan menyeimbangkan kondisi komparatif advantage investasi di Indonesia.
3. Strategi meminimalkan atau menghindari T_3
 - Bekerjasama dengan negara yang mengalami ancaman serupa untuk membentuk aliansi strategik.
 - Standarisasi produk baik kesehatan maupun keamanan, labelisasi, yang dilakukan dengan ketat.
 - Pengawasan yang ketat terhadap praktik dumping.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan di bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa dinamisme regionalisme ASEAN masih dipengaruhi oleh interaksi kepentingan nasional masing-masing negara. Sehingga ketika regionalisme ASEAN dihadapkan pada keharusan untuk mengorbankan prioritas dan kepentingan nasionalnya, maka keberhasilannya akan sangat tergantung dari kekuatan politik dan kemauan politik dari pemerintah masing-masing negara.

Pengaruh lain yang juga mempengaruhi regionalisme ASEAN adalah ketergantungan yang tinggi terhadap perekonomian negara di luar kawasan. Ketergantungan tersebut menyebabkan banyak kegagalan pada upaya integrasi ASEAN yang lebih mendalam. Program untuk mengurangi ketergantungan negara lain melalui AIP, AIC dan AIJV dengan menciptakan komplementaritas di antara negara ASEAN tidak berhasil meningkatkan intra-ASEAN trade.

Regionalisme ASEAN ke depan akan dipengaruhi oleh kepentingan *non-state actor* yang beroperasi di negara anggota ASEAN. Perusahaan multinasional yang memiliki keterikatan dengan perusahaan multinasionalnya, meningkatkan kebutuhan akan efisiensi transaksinya. Sehingga semakin berpengaruh perusahaan tersebut terhadap perekonomian di suatu negara akan semakin menentukan kebijakan regionalisme negara tersebut.

Perubahan pola regionalisme ASEAN, tentunya mempengaruhi lingkungan *economic security* Indonesia, bisa *favorable* (peluang) maupun

unfavorable (ancaman). Berikut adalah hasil identifikasi mengenai peluang dan ancaman di bab 4.

Peluang yang dapat diidentifikasi yaitu:

- Peningkatan biaya produksi di Singapura menjadi peluang bagi Indonesia untuk memperoleh limpahan kapasitas produksi, khususnya dari industri yang intensif menggunakan tenaga kerja.
- Pertumbuhan industri di China yang meningkatkan kebutuhan energi dan sumber daya mineral.
- Pasar domestik China yang besar, memberi peluang bagi industri Indonesia yang *outward looking*.
- Perebutan pengaruh maupun sumber energi di kawasan akan membawa persaingan dikawasan.
- Pembentukan MEA 2015 menciptakan alternatif dalam mencari sumber finansial dan lokasi yang memiliki infrastruktur baik.

Ancaman:

- penggunaan FTA bilateral sebagai upaya memasukkan barang ke dalam wilayah ASEAN melalui fasilitas AFTA.
- Bilateral FTA akan mempengaruhi investasi asing maupun domestik di Indonesia.
- ACFTA menjadi ancaman ke depan bagi industri Indonesia yang menghasilkan produk serupa dengan produk China di pasaran domestik.

Dari pembahasan kondisi faktor penentu daya saing, meskipun peringkat Indonesia selalu berada di bawah negara pendiri ASEAN, pada kenyataannya masih terdapat kekuatan yang dapat dipergunakan untuk menyusun strategi menghadapi regionalisme ASEAN. Di antara kekuatan yang dapat diidentifikasi adalah:

- Sumber daya alam berupa mineral dan energi serta luas wilayah.

Universitas Indonesia

- Pasar domestik yang besar.

Sementara kelemahan yang dapat diidentifikasi yaitu:

- Infrastruktur masih merupakan kelemahan yang mendasar bagi perekonomian Indonesia. Kondisi kualitas infrastruktur Indonesia masih di bawah negara lain di ASEAN khususnya Thailand, Singapura dan Malaysia. Selain mempengaruhi perekonomian internal secara negatif, buruknya infrastruktur menyebabkan investor mengalihkan investasinya ke negara yang kondisi infrastrukturnya lebih baik.
- Kondisi birokrasi di Indonesia yang masih menggambarkan tingginya tingkat korupsi tinggi, dibandingkan dengan negara pendiri ASEAN.
- Produktivitas tenaga kerja yang masih rendah.
- Rendahnya pertumbuhan entrepreneurship di Indonesia yang diakibatkan oleh buruknya infrastruktur yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, tingginya pembiayaan melalui perbankan, birokrasi yang tidak efektif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual yang tdiak memadai.

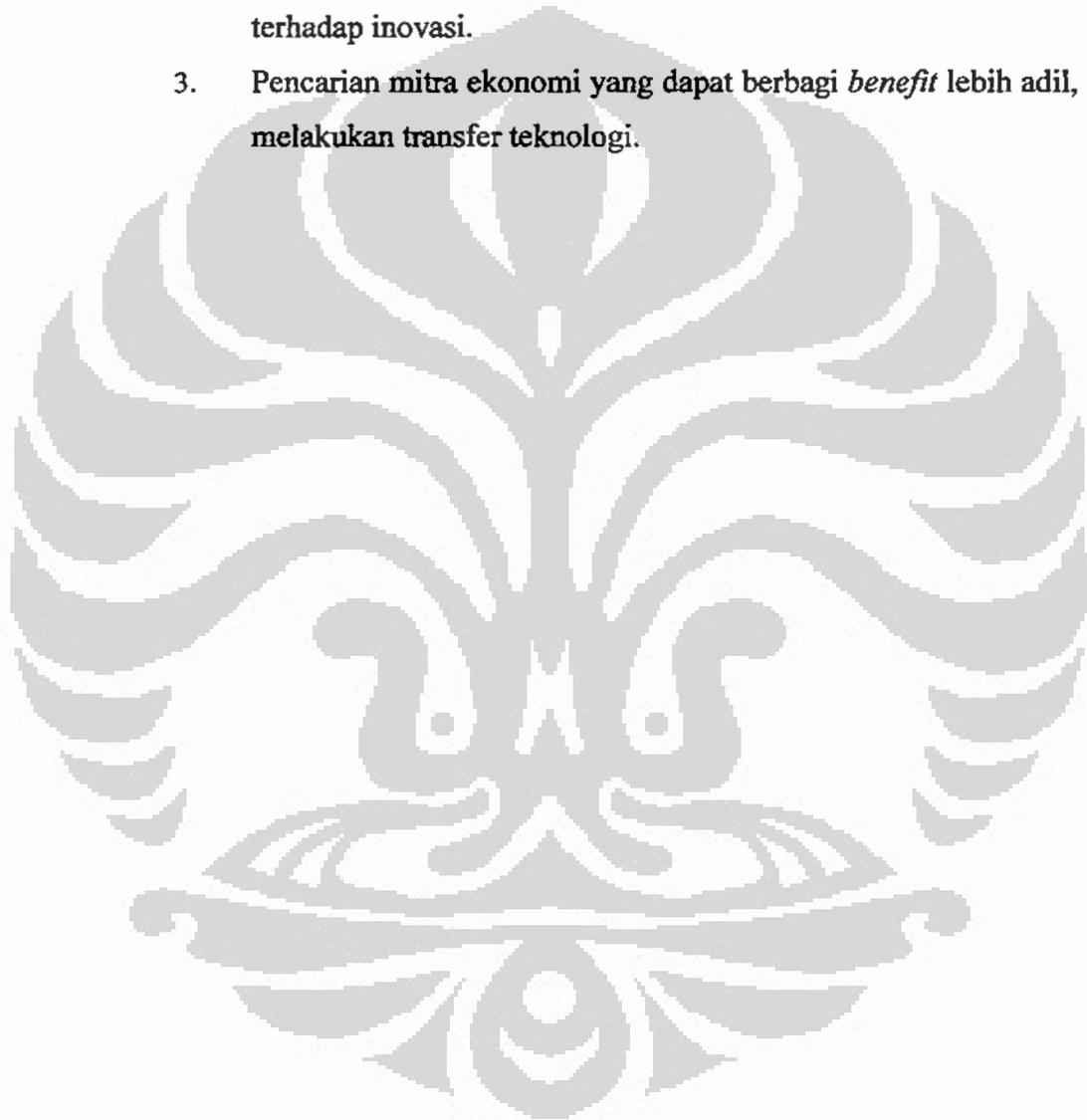
Berdasarkan identifikasi terhadap kondisi faktor penentu daya saing, ternyata Indonesia memiliki beberapa kekuatan internal. Dengan demikian pilihan strategi yang tersedia tidak hanya berupa kombinasi antara *Weakness* dengan *Opportunity* dan *Threat* saja (strategi WO dan strategi WT), melainkan juga melibatkan *Strength* (strategi SO dan ST).

5.2 SARAN

Regionalisme yang semakin mengarah pada multilateralisme adalah fenomena yang tidak dapat dihindari lagi. Seberapapun kekuatan *domestic demand* yang dimiliki, tidak akan mampu melepas ketergantungan dengan sistem perekonomian dunia. Sehingga hal terpenting yang dilakukan adalah penguatan perekonomian internal melalui:

Universitas Indonesia

1. Penguasaan teknologi yang mampu mereproduksi sumber daya dengan *value added* tertinggi, sehingga kekuatan sebagai negara penghasil *raw material* dapat ditingkatkan menjadi negara penghasil produk olahan/manufaktur.
2. Pengembangan terhadap bidang-bidang yang masih menjadi kelemahan internal, seperti infrastruktur, efisiensi birokrasi, dan perlindungan terhadap inovasi.
3. Pencarian mitra ekonomi yang dapat berbagi *benefit* lebih adil, dan mau melakukan transfer teknologi.



Universitas Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, S. *Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat Sinergi ASEAN di Tengah Kompetisi Global*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008.
- ASEAN Secretariat. *ASEAN Economic Co-operation: Transition and Transformation*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1997.
- Banlaoi, R.C. *The Philippines and Australia: Defense and Security Cooperation Against Terrorism*, Quezon City: PIPVTR, 2008.
- Charles, Eugenia. *A Future of Small States: Overcoming Vulnerability*, London: Commonwealth Secretariat, 1997.
- Daquila, Huy, *Singapore and ASEAN in the Global Economy: The Case of Free Trade Agreements*, California: University California Press, 2003.
- Daquila, T.C., *The Economies of Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, and Thailand*, New York: Nova Publisher, 2005.
- Fineman, D. *A Special Relationship: The United States and Military Government in Thailand, 1947-1958*, Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.
- Gouda, F., Zaalberg, T.B. *American Visions of the Netherlands East Indies/ Indonesia: US Foreign Policy and Indonesian Nationalism, 1920-1949*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2002.
- Grugel, J., Hout, W. *Regionalism Across the North-South Divide: State Strategies and Globalization*, 2005.
- Hadi, Syamsul., Wibowo, I. *Merangkul China: Hubungan Indonesia-China pasca Suharto*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Koontz, H., Weihrich H. *Essentials of Management: An International Perspective*, New Delhi: Tata McGraw-Hill, ed(7), 2004.
- Hayashi, Mitsuhiro, *SMEs, Subcontracting and Economic Development in Indonesia: With Reference to Japan's Experience*, Tokyo: Japan International Cooperation Publishing Co.,Ltd, 2005.

- Hurrel, A. *Regionalism in Theoretical Perspectives*, dalam Louise Fawcett dan Andrew Hurrel, eds., *Regionalism in World Politics: Regional Organization and International Order*, Oxford University Press, 1995.
- IISD, *Elements of a Sustainable Trade Strategy for China*, Genewa: International Institute for Sustainable Development, 2010.
- Insaniwati, I.N. *Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya*, Magelang: IndonesiaTera, 2002.
- International Labor Organization, *Labor and Social Trends in ASEAN 2010: Sustaining Recovery and Development through Decent Work*, ILO, 2010.
- ISEAS. *ASEAN: The Task A Head*, Singapura: Institute of Southeast Asian Studies, 1987.
- Jhingan, M.L., *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, terjemahan oleh Guritno, D., Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2008.
- Joes, A.J., *Resisting Rebellion: The History and Politics of Counterinsurgency*, Lexington: The University Press of Kentucky, 2004.
- Jukes, G., *The Soviet Union in Asia*, California: University of California Press, 1973.
- Kerkvliet B.J. *The Huk Rebellion: A Study of Peasant Revolt in the Philippines*, California: University of California Press, 1977.
- Kuratko, D.F., *Entrepreneurship: Theory, Process, Practice*, (edisi 8), Mason: South Western Cengage Learning, 2009.
- Laursen F. *Comparative Regional Integration: Europe and Beyond*, Surrey: Ashgate, 2010.
- Lebang, T., Susanto A.F. *Sahabat Lama, Era Baru: 60 Tahun Pasang Surut Hubungan Indonesia-Rusia*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- Nafziger Wayne E., *Economic Development*, New York: Cambridge University Press, 2006.
- Nijkamp P., Moomaw R.L., Traistaru I, *Entrepreneurship, investment, and spatial dynamics: Lessons and Implications for enlarged EU*, Cheltenham: Edward Elgar, 2006.
- Ooi, Guat Tin, *Preferential Trading Arrangement (PTA): an analysis of potential effects on intra-ASEAN trade*, Singapura, 1981.

Ping, J.H., *Middle Power Statecraft: Indonesia, Malaysia, and The Asia Pasific*, Ashgate, 2005.

Porter E. Michael, *The Competitive Advantage of Nations*, London: The Macmillan Press Ltd, 1990.

Quah, J.S.T, *Public Administration Singapore-Style*, Emerald, 2010.

Severino, R.C., *Southeast ASEAN in Search of An ASEAN Community: Insights From The Former ASEAN Secretary General*, Singapore: ISEAS, 2006.

Tangkilisan H.N., *Manajemen Publik*, Jakarta: Grasindo, 2005.

Tarling, N. *Cambridge History of Southeast Asia*, Vol.2, Part II, Cambridge University Press, 1999.

United Nations, *Asia-Pasific Trade and Investment Report 2009: Trade Led Recovery and Beyond*, Thailand, 2009.

Weatherbee, D.E., Emmers, R. *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Autonomy*, Rowman & Littlefield, 2005.

Winarno, B. *Globalisasi: Peluang dan Ancaman bagi Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2008.

World Bank, *World Development Report 2010: Development and Climate Change*, World Bank Publication, 2010.

Jurnal Ilmiah dan Penelitian

Aiginger Karl. "Competitiveness: From a Dangerous Obsession to a Welfare Creating Ability with Positive Externalities", *Journal of Industry, Competition, and Trade*, 6:2 (2006): 161-177.

Ang, James B. *Financial Development and Economic Growth in Malaysia*, New York: Routledge, 2008.

Bhattacharyay, *Infrastructure for ASEAN Economic Connectivity and Integration*, *ASEAN Economic Bulletin*, 27:2 (2010): 200-220.

Bogdanova, A. *Economic Growth and Income Convergence: Impact of European Integration*, Norges Handelshoyskole, 2010.

Bono, N. *Regionalism in East Asia: The Transformation of Regional Political Economy in East Asia*, *Ritsumeikan Policy Science*, 10:1(2002): 117-130.

- Chia Siow Yue, *ASEAN-China Free Trade Area*, Hongkong, 2004
- Cosbey Aaron, Tay Simon, Lim Hank, *The Rush to Regionalism: Sustainable Development and Regional/ Bilateral Approaches to Trade and Investment Liberalization*, 2004.
- Daquila, T.C., Huy, L.H., *ASEAN in The Global Economy: The Case of Free Trade Agreements*, *ASEAN Survey*, 43:6 (2003): 908-928.
- Dong-Sung Cho, *From National Competitiveness to Bloc and Global Competitiveness*, 1998.
- Dong Sung Cho, H. Chang Moon. *A Nation's International Competitiveness in Different Stages of Economic Development*, *Advances in Competitiveness Research (ACR)*, 6:1 (1998):
- Franklin J.F. *The Hollow Pact: Pacific Security and The Southeast Asia Treaty Organization*, Midwestern State University, Texas, 2006.
- Gao Xian, *Regionalization of Emerging Countries: a Case Study of East Asia, Brasil*, 2005.
- Grebliauskas, A. *Analysis of Threats to Economic Security of Lithuania*, Kaunas Vytautas Magnus University, 2003.
- Herlisrianto, Igor, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menggagas Pembentukan ASEAN Security Community Tahun 2003*, UI, Depok, 2008.
- Jiang Yong, *Economic Security: Redressing Imbalance*, *China Security*, Vol. 3, No.2, 2007.
- Khor, Martin. *Bilateral/ Regional Free Trade Agreements: An Outline of Elements, Nature and Development Implications*, Third World Network, 2005.
- Kurus, B. *Agreeing to Disagree: The Political Reality of ASEAN Economic Cooperation*, *Asian Affairs*, 2:1(1993): 28-41
- Liyan Hu, Ter-Shing Cheng, *China's Energy Security and Geo-Economic Interest in Central Asia*, *CEJISS*, 2:2 (2008).
- Medalla M. Erlinda dan Balboa D. Jenny, *The Impact of ASEAN-China FTA Early Harvest Program: The Case of the Philippines with Focus on Short-Run Effects on the Agriculture Sector*, 2007.
- Nanto, D.K. *The US-Singapore Free Trade Area*, CRS Report for Congress, 2004.

Nuechterlein, D.E. *Thailand and SEATO: A Ten Year Appraisal*, Asian Survey, 4:12 (1964): 1174-1181.

Pierre Asselin, *New Perspectives on Dien Bien Phu*, Honolulu: University of Hawaii, 1997.

Pop, Irina Ionela, *China's Energy Strategy in Central Asia: Interactions with Russia, India and Japan*, University of Oradea, ABI/ INFORM Global (Proquest) database, 2010.

Pukeliene, V., Cepaitiene, N. *Economic Security: a Regional Public Goods Approach*, Kaunas: Vytauto Didžiojo Universitetas, ABI/ INFORM Global (Proquest) database, 2007.

Rahman, K.M. *Japan-Malaysia Free Trade Agreement: Expectations and Achievements*, Journal of Comparative International Management, 2008.

Snyder, D.C., Gregory, Sean. *Economic Intelligence in the Post-Cold War Era: Issue for Reform*, Washington: Federation of American Scientists, 1997.

Sukendar, *Keanggotaan China di WTO dan Dampaknya terhadap Hubungan Ekonomi China-Amerika Serikat*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.

Syal, Huma Nawaz. *Pakistan and Malaysia: Economic and Trade Relations*, The Institute of Strategic Studies Islamabad, 2007.

Taneja, Pradeep. *China's Search for Energy Security and EU-China Relations*, ABI/ INFORM Global (Proquest) database, 2009.

Dokumen, majalah

ASEAN, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation*, Phnom Penh, 4 Nopember 2002.

Bank Indonesia, *Sejarah Bank Indonesia: Periode 1959-1966*, Jakarta, hal. 14.

Dewan Perwakilan Rakyat, *Laporan Kegiatan Komisi VI DPR RI Masa Sidang II Tahun Sidang 2009-2010*, 13 Maret 2010, Jakarta, 2010, halaman 2.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association of South East Asian Nations and The People's Republic of China, Phnom Penh, 4 November 2002.

Malaysia's Free Trade Agreements (FTAs), Matrade, Kuala Lumpur, 2008.

Internet

ASEAN, *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements*, Manila, 1977, <http://www.aseansec.org/1376.htm> diakses 25 November 2010.

ASEAN, *Basic Agreement on ASEAN Industrial Projects*, Kuala Lumpur, 1980. <http://www.aseansec.org/1362.htm> diakses 25 November 2010.

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) Dikhawatirkan Rugikan Industri, http://kadin-indonesia.or.id/id/berita_isi.php?news_id=3970, diakses 5 April 2010.

ASEAN, *Declaration of ASEAN Concord II*, Bali, 7 Oktober 2003, <http://www.aseansec.org/15159.htm> diakses 25 November 2010.

Dawis, Aimee, ASEAN-China FTA: Lesson to learn for policy makers, <http://www.thejakartapost.com/news/2010/01/21/aseanchina-fta-lessonslearn-policy-makers.html>, diakses 5 April 2010.

<http://www.petrokimia-gresik.com/history.asp> diakses pada 10 Desember 2010.

<http://www.pusri.co.id/50profil03.php>, diakses pada 10 Desember 2010.

Gagal di Pasar Sendiri, Majalah Tempo, 12 Mei 1984, <http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1984/05/12/EB/mbm.19840512.EB40551.id.html>, diakses 13 November 2010.

Singapore FTAs, <http://www.fta.gov.sg/index.asp>, diakses tanggal 20 April 2010.

WTO, <http://rtais.wto.org/ui/PublicSearchByMember.aspx>, update per 1 Oktober 2010, diakses tanggal 5 November 2010.